CV. ASKARA SASTRA MEDIA

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Dr. Halik, S.S., M.Si
Suprapto Estede
Rokhamah, SST., M.Pd
Dadan Zulkifli
Cahyadi, S.Pd., M.Pd
Muhammad Haizul Falah, S.Sos., M.Hub.Int
Romana Octavia Debora Pessak, S.H., M.H
Umar Mahdi, S.H., M.H
Sintya Paula Junaedy, S.H., M.H
Immanuel Christian Pontorondo, S.H., M.H

PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

Penulis:
Dr. Halik, S.S., M.Si
Suprapto Estede
Rokhamah, SST., M.Pd
Dadan Zulkifli
Cahyadi, S.Pd., M.Pd
Muhammad Haizul Falah, S.Sos., M.Hub.Int
Romana Octavia Debora Pessak, S.H., M.H
Umar Mahdi, S.H., M.H
Sintya Paula Junaedy, S.H., M.H
Immanuel Christian Pontorondo, S.H., M.H

ASKARA SASTRA
MEDIA

PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

Penulis :
Dr. Halik, S.S., M.Si
Suprapto Estede
Rokhamah, SST., M.Pd
Dadan Zulkifli
Cahyadi, S.Pd., M.Pd
Muhammad Haizul Falah, S.Sos., M.Hub.Int
Romana Octavia Debora Pessak, S.H., M.H
Umar Mahdi, S.H., M.H
Sintya Paula Junaedy, S.H., M.H
Immanuel Christian Pontorondo, S.H., M.H

Editor dan Desain Cover :
Lambrika Dwi

Ukuran:
viii hal + 210 hal; 14,8cm x 21cm

Diterbitkan Oleh :

ASKARA SASTRA MEDIA

Jln. Al-Hidayah, Jombang, Jawa Timur – 61481
Email : askarasastramedia@gmail.com

ISBN : 978-623-89960-9-4
Terbitan: Juni 2025

Hak Cipta Pada Penulis
Hak Cipta dilindungi Undang – Undang
Dilarang Keras Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan Cara Apapun
Tanpa Seizin Dari Penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah-Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya dihadapan para pembaca. Kemudian, tak lupa *shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan ahli keluarganya yang mulia.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan ini, individu diajarkan nilai-nilai dasar demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya menjunjung tinggi hukum, toleransi, dan keberagaman. Pendidikan Kewarganegaraan juga berperan penting dalam menanamkan rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, dan kesadaran terhadap pentingnya menjaga persatuan dan integrasi nasional, sehingga generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang menjaga dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tujuan penulisan buku Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada pembaca, khususnya peserta didik, tentang konsep dan praktik

kewarganegaraan yang baik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Buku ini dirancang agar mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila, semangat nasionalisme, demokrasi, serta kesadaran hukum dan hak asasi manusia, guna membentuk warga negara yang berkarakter, bertanggung jawab, serta aktif dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan berkeadaban. Dengan demikian, buku ini menjadi sarana penting dalam mendukung pendidikan karakter dan memperkuat integrasi nasional melalui jalur pendidikan formal.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah berpartisipasi. Terakhir seperti kata pepatah bahwa" Tiada Gading Yang Tak Retak" maka penulisan buku ini juga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan masukkan yang dapat diberikan guna menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN **1**

1.1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan **1**

1.2. Pentingnya Memahami Pendidikan Kewarganegaraan **2**

1.3 Asal Usul Pendidikan Kewarganegaraan **4**

1.4 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan **5**

1.5 Dasar – Dasar Hukum dan Konstitusi **7**

1.6 Hak dan Kewajiban Warga **8**

1.7 Demokrasi dan Proses Politik **9**

1.8 Keragaman dan Toleransi **11**

1.9 Metode Pembelajaran **12**

1.10 Peran Guru dalam Pendidikan Kewarganegaraan. **14**

1.11 Strategi Pembelajaran Efektif **15**

1.12 Tantangan dalam Pendidikan Kewarganegaraan .. **16**

1.13 Kesimpulan **17**

BAB II MAKNA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN **21**

2.1 Konsep Kewarganegaraan dalam Pendidikan Kewarganegaraan **21**

2.2 Nilai – Nilai Dasar dalam Pendidikan Kewarganegaraan **28**

2.3 Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa **33**

2.4 Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membangun Masyarakat Madani 37

BAB III ISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 44

3.1 Identitas Nasional..... 44

3.2 Konstitusi dan Norma Hukum..... 48

3.3 Demokrasi di Indonesia 52

3.4 Hak Asasi Manusia (HAM) 55

3.5 Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme 58

BAB IV TUJUAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN..... 63

4.1 Pendahuluan 63

4.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan 64

4.3 Implementasi Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembelajaran..... 80

4.4 Kesimpulan..... 83

BAB V 85

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA 85

5.1 Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia 85

5.2 Nilai-nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan.... 91

5.3 Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Lembaga Pendidikan 95

BAB VI IDENTITAS DAN INTEGRASI NASIONAL..... 101

6.1 Konsep Dasar Identitas Nasional 101

6.2 Konsep Integrasi Nasional..... 105

6.3 Hubungan antara Identitas Nasional dan Integrasi Nasional..... 109

6.4 Dinamika Identitas dan Integrasi Nasional di Indonesia 113

6.5 Upaya Memperkuat Identitas dan Integrasi Nasional di Era Modern..... 117

BAB VII BANGSA DAN IDENTITAS 123

7.1 Pengertian Bangsa dan Identitas Nasional 123

7.2 Pembentukan dan Perkembangan Identitas Bangsa Indonesia 125

7.3 Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengusulan Identitas Nasional..... 129

7.4 Tantangan dalam Menjaga Identitas Bangsa di Era Globalisasi 133

BAB VIII IDENTITAS NASIONAL INDONESIA..... 138

8.1 Konsep Identitas Nasional..... 138

8.2 Pembentukan Identitas Nasional Indonesia 142

8.3 Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembentukan Identitas Nasional 146

8.4 Tantangan dan Ancaman terhadap Identitas Nasional di Era Modern..... 147

BAB IX NEGARA KEBANGSAAN INDONESIA 153

9.1 Konsep Negara Kebangsaan..... 153

9.2 Lahir dan Berkembangnya Negara Kebangsaan Indonesia 157

9.3 Dasar – Dasar Negara Kebangsaan Indonesia 160

9.4 Nilai – Nilai dalam Negara Kebangsaan Indonesia162

BAB X PENGEMBANGAN INTEGRASI DI INDONESIA 167

10.1 Konseptual Integrasi di Indonesia..... 167

10.2 Urgensi Pengembangan Integrasi di Indonesia ... 171

10.3 Tantangan Kontemporer Integrasi Nasional 173

10.4 Studi Kasus: Papua dan Ancaman Disintegrasi Nasional..... 177

10.5 Strategi Penguatan Integrasi Nasional..... 181

DAFTAR PUSTAKA 184

BAB I
HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

1.1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Gustilianto dalam Danang Prasetyo (Prasetyo et al., 2023, pp. 18–20), pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Selanjutnya menurut Najicha (Najicha & Kurniawati, 2023, pp. 99–100) pendidikan kewarganegaraan adalah mencakup pemahaman tentang hukum, norma, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan negara. Sementara menurut Arsil pendidikan kewarganegaraan adalah individu diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Asril et al., 2023, pp. 1301–1302). Salah satu komponen utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah pemahaman tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial ekonomi. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan kepada individu tentang hak-hak tersebut dan bagaimana mereka dapat menikmati hak-hak tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan kewarganegaraan juga mencakup pemahaman tentang sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku di suatu negara. Sistem pemerintahan adalah cara bagaimana suatu negara dijalankan dan dikelola, sedangkan hukum adalah aturan-aturan yang mengatur tata cara hidup bermasyarakat. Memahami sistem pemerintahan dan hukum, individu dapat lebih memahami bagaimana kebijakan publik dibuat dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan tentang pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Partisipasi aktif ini dapat berupa keterlibatan dalam proses politik, seperti memilih pemimpin, atau keterlibatan dalam kegiatan sosial yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nazmi et al., 2025, pp. 1–5). Pendidikan kewarganegaraan mendorong individu untuk tidak hanya menjadi penerima pasif dari kebijakan publik, tetapi juga menjadi agen perubahan yang aktif berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat.

1.2. Pentingnya Memahami Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan penting bagi individu dan masyarakat karena membentuk kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara (Pratama & Rahmat, 2018, pp. 171–173). Pendidikan kewarganegaraan membekali individu dengan pengetahuan tentang hukum, norma, dan nilai-nilai yang berlaku,

sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan cara yang bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu manfaat utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah meningkatnya partisipasi aktif individu dalam proses politik dan sosial (Bukoting, 2023, pp. 70–71). Partisipasi ini tidak hanya membantu individu untuk memahami isu-isu yang dihadapi masyarakat, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan (Sihaloho et al., 2023, pp. 831–837).

Pendidikan kewarganegaraan juga berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Memahami hak asasi manusia, individu dapat menuntut keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan adil, tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial ekonomi (Fajri et al., 2024, pp. 238–342). Hal ini dapat membantu mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan juga membantu membangun toleransi dan keragaman dalam masyarakat. Memahami pentingnya toleransi, individu dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan orang-orang yang berbeda dari mereka (Rusmiati, 2023, pp. 249–250). Pendidikan kewarganegaraan mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang cerdas dan kritis. Individu yang mendapatkan pendidikan kewarganegaraan dapat menganalisis informasi dengan

bijak, memahami implikasi dari kebijakan publik, dan membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari (Pradanna, 2023, pp. 22–25). Pendidikan kewarganegaraan mendorong individu untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga untuk aktif mencari kebenaran dan mempertanyakan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. (Aziz & Najicha, 2024, pp. 12–13).

1.3 Asal Usul Pendidikan Kewarganegaraan

Sejarah awal dan perkembangan konsep pendidikan kewarganegaraan memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan perkembangan pemikiran politik dan pendidikan di berbagai belahan dunia. Sejarah awal konsep ini dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, di mana pendidikan dianggap sebagai sarana untuk membentuk karakter dan moral individu (Dwi Septiwiharti, 2024, pp. 1–3). Istilah "pendidikan kewarganegaraan" sendiri mulai dikenal secara luas pada masa Renaisans di Eropa, ketika pemikiran tentang kewarganegaraan dan hak-hak individu mulai berkembang. Pada abad ke-18, konsep pendidikan kewarganegaraan semakin mendapatkan perhatian dengan munculnya gerakan pencerahan di Eropa. Pemikir-pemikir seperti Jean-Jacques Rousseau dan John Locke menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk warga negara yang bebas dan bertanggung jawab (Burke, 2015, pp. 4–7). Rousseau, misalnya, dalam karyanya "Emile, or On Education", mengemukakan pandangannya tentang pendidikan yang harus

berfokus pada pengembangan karakter dan moral individu (Suma, n.d., pp. 60–63).

Perkembangan konsep pendidikan kewarganegaraan juga dipengaruhi oleh perubahan politik dan sosial yang terjadi selama Revolusi Prancis dan masa-masa berikutnya . Pada masa itu, ide-ide tentang kebebasan, kesetaraan, dan hak asasi manusia menjadi semakin populer, dan dianggap sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat (Ashri, 2018, pp. 1–11). Pada abad ke-20, konsep pendidikan kewarganegaraan semakin diperluas dengan memasukkan aspek-aspek baru seperti pendidikan politik, pendidikan hukum, dan pendidikan sosial. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada pengetahuan tentang hukum dan norma, tetapi juga pada keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam kelompok. Hal ini mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membangun masyarakat yang demokratis dan adil (Kusnadi, 2024, pp. 166–169).

1.4 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membentuk individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk

menanamkan nilai-nilai kewarga-negaraan seperti tanggung jawab, keadilan, dan toleransi, sehingga individu dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan orang-orang yang berbeda dari mereka. Salah satu tujuan penting dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mempersiapkan individu agar menjadi warga negara yang cerdas dan kritis (Sofha et al., 2023, p. 409). Hal ini berarti bahwa individu harus mampu menganalisis informasi dengan bijak, memahami implikasi dari kebijakan publik, dan membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Seorang warga negara memahami hak asasi manusia, dapat menuntut keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan dengan adil, tanpa memandang ras, agama, gender, atau status sosial ekonomi. Hal ini dapat membantu mengurangi diskriminasi dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk membangun toleransi dan keragaman dalam masyarakat (Simanjuntak et al., 2023, pp. 69–70). Memahami pentingnya toleransi, individu dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan orang-orang yang berbeda dari mereka, mengajarkan bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan harus dihargai, bukan dijadikan alasan untuk konflik dan perselisihan. Hal ini dapat menciptakan suasana yang damai dan kondusif untuk kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

1.5 Dasar – Dasar Hukum dan Konstitusi

Hukum dasar dan konstitusi merupakan fondasi utama dari sistem hukum suatu negara, yang berfungsi sebagai panduan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak-hak warga negara. Konstitusi adalah dokumen tertulis yang mengatur prinsip-prinsip dasar dan struktur pemerintahan, serta menetapkan hak dan kewajiban warga negara (Hasan et al., 2024, pp. 44–45). Selain itu, konstitusi juga berfungsi sebagai penjaga kebebasan individu dan memastikan bahwa pemerintah beroperasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Salah satu aspek penting dari konstitusi adalah pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya sistem checks and balances yang efektif. Misalnya, lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan, lembaga legislatif untuk membuat undang-undang, dan lembaga yudikatif untuk menegakkan hukum (Pangaribuan et al., 2023, pp. 2–3). Pembagian kekuasaan ini membantu menjaga keseimbangan dan mencegah terjadinya tirani.

Konstitusi juga menetapkan berbagai hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Hak-hak ini mencakup kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Penetapan hak asasi manusia dalam konstitusi memastikan

bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan setara, serta memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya tanpa rasa takut. Selain itu, konstitusi juga mengatur berbagai prinsip dasar seperti supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan prinsip non-diskriminasi (Wahyuni & Desiandri, 2024, pp. 961–963). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil dan tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial ekonomi. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, konstitusi berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak individu dan mempromosikan keadilan sosial.

1.6 Hak dan Kewajiban Warga

Prinsip-prinsip demokrasi dan proses politik merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan representatif. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dari warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Proses politik, di sisi lain, merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok dalam masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik dan memilih perwakilan mereka di lembaga pemerintahan (Butarbutar & Triadi, 2024, pp. 268–269). Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah kebebasan berbicara dan menyuarakan pendapat. Kebebasan ini memungkinkan warga negara untuk mengkritik kebijakan pemerintah, mengajukan ide-ide baru, dan

berpartisipasi dalam diskusi publik tanpa rasa takut akan pembalasan atau penindasan. Kebebasan berbicara juga mencakup hak untuk membentuk dan bergabung dengan partai politik, serta hak untuk berpartisipasi dalam kampanye politik.

Kesetaraan adalah prinsip lain yang sangat penting dalam demokrasi. Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial ekonomi. Kesetaraan dalam demokrasi bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses kekuasaan politik dan mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Partisipasi aktif warga negara dalam proses politik juga merupakan ciri khas demokrasi (Hamidah, 2021, pp. 679–682). Partisipasi ini dapat berupa pemilihan umum, di mana warga negara memberikan suara mereka untuk memilih perwakilan mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Selain itu, partisipasi juga bisa berupa keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil, gerakan sosial, dan kegiatan politik lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dan memperjuangkan hak-hak mereka.

1.7 Demokrasi dan Proses Politik

Prinsip-prinsip demokrasi mencakup kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dari warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Proses politik, di sisi lain, merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok dalam

masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik dan memilih perwakilan mereka di lembaga pemerintahan. Salah satu prinsip utama dalam demokrasi adalah kebebasan berbicara dan menyuarakan pendapat. Kebebasan ini memungkinkan warga negara untuk mengkritik kebijakan pemerintah, mengajukan ide-ide baru, dan berpartisipasi dalam diskusi publik tanpa rasa takut akan pembalasan atau penindasan (Syamsidar et al., 2023, pp. 1–3). Kebebasan berbicara juga mencakup hak untuk membentuk dan bergabung dengan partai politik, serta hak untuk berpartisipasi dalam kampanye politik.

Proses politik melibatkan berbagai aktor, termasuk individu, kelompok, partai politik, dan lembaga pemerintahan. Proses ini dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang relevan dengan masyarakat, diikuti dengan pembentukan kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Proses politik juga mencakup negosiasi dan kompromi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda, serta implementasi dan evaluasi kebijakan yang telah diambil (Hutabarat et al., 2025, pp. 23–27). Melalui proses politik, dikan kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kepentingan dan aspirasi dari mayoritas warga negara, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.

1.8 Keragaman dan Toleransi

Keragaman dan toleransi dalam masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai. Keragaman mencakup perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu dan kelompok dalam masyarakat, seperti perbedaan ras, agama, budaya, bahasa, dan pandangan hidup. Toleransi, di sisi lain, adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut, serta menerima keberadaan orang-orang yang berbeda tanpa rasa diskriminasi atau penindasan. Salah satu aspek penting dari keragaman adalah pengakuan terhadap hak-hak individu. Setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan identitasnya dan menjalani kehidupan sesuai dengan keyakinannya. Pengakuan ini memungkinkan setiap orang untuk hidup dengan martabat dan kebebasan, tanpa harus merasa terpaksa untuk mengubah atau menutupi identitasnya (P. T. Handayani et al., 2024, pp. 2891–2892). Toleransi terhadap perbedaan ini sangat penting untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat, karena membantu mencegah konflik dan ketegangan yang dapat timbul akibat ketidaksetujuan atau prasangka.

Selain itu, keragaman juga memberikan kekayaan budaya yang dapat memperkaya kehidupan masyarakat. Setiap individu membawa pengalaman, tradisi, dan perspektif unik yang dapat berkontribusi pada keragaman budaya. Dengan menghargai dan merayakan keragaman ini, masyarakat dapat belajar dari satu sama lain dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang

berbagai budaya. Toleransi dalam hal ini berarti menghormati dan mendengarkan pandangan orang lain, serta terbuka terhadap pertukaran budaya yang konstruktif. Pentingnya toleransi juga tercermin dalam upaya mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan. Toleransi memungkinkan setiap individu untuk mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang, tanpa memandang latar belakang mereka. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik dalam masyarakat (Riswandie, 2023, pp. 299–301). Adanya toleransi, setiap individu dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan.

1.9 Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran berbasis proyek {*Project-Based Learning/PBL*} merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan pada penggunaan proyek atau kegiatan nyata sebagai sarana untuk mempelajari konsep dan keterampilan. Dalam metode ini, siswa didorong untuk terlibat aktif dalam proyek yang relevan dengan materi pelajaran, sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan pengetahuan secara kontekstual. PBL bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas siswa. Salah satu karakteristik utama dari PBL adalah fokus pada pencapaian tujuan pembelajaran yang spesifik dan relevan. Dalam proses ini, siswa bekerja secara mandiri

atau dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan proyek yang telah ditentukan (Sari et al., 2024, pp. 281–282). Proyek tersebut bisa berupa penelitian, pembuatan produk, atau penyelidikan masalah tertentu yang berkaitan dengan kurikulum. Melalui proyek ini, siswa mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi topik secara mendalam dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi.

Pembelajaran berbasis proyek juga menekankan pentingnya refleksi dan evaluasi diri. Siswa diharapkan untuk merefleksikan proses pembelajaran mereka, mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan, serta mengevaluasi hasil kerja mereka. Refleksi ini membantu siswa untuk belajar dari pengalaman mereka dan meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Selain itu, PBL juga mendorong siswa untuk berkomunikasi dengan guru dan teman sekelas mereka mengenai kemajuan proyek dan masalah yang mungkin muncul. Keuntungan lain dari metode PBL adalah kemampuannya untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan minat siswa. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih topik proyek yang mereka minati, metode ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran (Nurhayati et al., 2025, pp. 70–71). Selain itu, PBL juga memungkinkan guru untuk mengarahkan dan mendukung siswa secara individu, serta memberikan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa meningkatkan kinerja mereka.

1.10 Peran Guru dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Peran guru dalam mendidik siswa kewarganegaraan sangat penting untuk membentuk individu yang bertanggung jawab dan aktif dalam masyarakat. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mengembangkan sikap patriotisme dan nasionalisme (Sitinjak et al., 2024, pp. 90–94). Melalui pendekatan yang interaktif dan kontekstual, guru dapat mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dengan cara yang menarik dan bermakna bagi siswa (Januardi et al., 2024, pp. 796–797). Salah satu aspek kunci dari peran guru adalah kemampuan mereka untuk menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang mudah dipahami oleh siswa . Ini termasuk menggunakan metode pengajaran yang berbeda, seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan kegiatan proyek, untuk memperkaya pengalaman belajar siswa (Romadhon & Winahyu, 2024, pp. 3–8). Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata.

Selain itu, guru juga memiliki peran dalam menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang terkait dengan kewarganegaraan. Mereka harus menjadi teladan yang baik bagi siswa, menunjukkan sikap hormat, keadilan, dan tanggung jawab dalam interaksi sehari-hari (Wulansari et al., 2025, pp. 36–38). Dengan demikian, siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan

menerapkannya dalam kehidupan mereka sebagai warga negara yang baik.

1.11 Strategi Pembelajaran Efektif

Pendidikan kewarganegaraan memerlukan pendekatan pengajaran yang efektif untuk memastikan bahwa siswa memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Beberapa strategi pengajaran yang dapat digunakan termasuk pendekatan kontekstual, di mana materi pelajaran disampaikan dalam konteks situasi nyata atau relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Hal ini membantu siswa melihat aplikasi praktis dari apa yang mereka pelajari dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar. Strategi lain adalah penggunaan metode interaktif seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan kegiatan proyek (Mazna et al., 2024, pp. 2–5). Metode ini tidak hanya memfasilitasi pembelajaran kolaboratif, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi penerima pasif informasi, tetapi juga menjadi pembuat keputusan yang bertanggung jawab.

Selain itu, pengajaran berbasis proyek (*project-based teaching*) dapat digunakan untuk mengajarkan kewarganegaraan. Pendekatan ini melibatkan siswa dalam proyek yang kompleks dan multidisiplin, yang memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi isu-isu sosial dan politik secara mendalam.

Melalui proyek ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan penelitian, analisis, dan presentasi, yang semuanya penting dalam kehidupan bermasyarakat. Penggunaan teknologi juga dapat menjadi strategi pengajaran yang efektif dalam pendidikan kewarganegaraan. Dengan memanfaatkan platform digital dan aplikasi, guru dapat menyajikan materi pelajaran secara interaktif dan menarik (Hulu et al., 2024, pp. 10756–10759). Misalnya, video animasi, simulasi, dan forum diskusi online dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dan memperluas wawasan mereka tentang isu-isu kewarganegaraan.

1.12 Tantangan dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Kurangnya minat siswa dalam proses belajarangan yang sering dihadapi oleh pendidik. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan fenomena ini, termasuk metode pengajaran yang monoton, materi pelajaran yang kurang menarik, dan kurangnya keterlibatan siswa dalam kegiatan kelas. Ketika siswa merasa bahwa materi pelajaran tidak relevan dengan kehid mereka atau tidak menantang cukup, mereka mungkin kehilangan motivasi untuk belajar. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Guru perlu mencari cara untuk membuat pelajaran lebih interaktif dan menarik, misalnya dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, dan kegiatan hands-on yang

memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif (Simanullang et al., 2024, pp. 3–6). Selain itu, memberikan pilihan kepada siswa dalam memilih topik yang mereka minati juga dapat membantu meningkatkan minat mereka terhadap materi pelajaran.

Kurangnya minat siswa juga bisa disebabkan oleh lingkungan kelas yang tidak mendukung, seperti suasana yang kaku atau kurangnya dukungan dari teman sebaya. Guru dapat berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif, di mana siswa merasa dihargai dan didukung. Ini bisa dilakukan dengan mendorong kerjasama dan komunikasi yang baik di antara siswa, serta memberikan pujian dan umpan balik positif untuk hasil kerja mereka. Selain itu, tantangan kurangnya minat siswa juga terkait dengan peran teknologi dalam pendidikan (H. Handayani et al., 2025, pp. 341–345). Meskipun teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkaya pengalaman belajar, ketergantungan yang berlebihan pada perangkat digital juga dapat mengurangi minat siswa terhadap materi pelajaran. Guru perlu menemukan keseimbangan yang tepat antara penggunaan teknologi dan metode pengajaran tradisional yang tetap relevan dan menarik bagi siswa.

1.13 Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan di Masa Depan, Pendidikan kewarganegaraan memain-kan peran penting dalam membentuk individu yang bertanggung jawab dan aktif dalam masyarakat. Di

masa depan tantangan global seperti perubahan iklim, tidak-setaraan sosial, dan dinamika politik yang kompleks, pemahaman tentang kewarganegaraan menjadi semakin esensial. Pendidikan ini membekali siswa dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta keterampilan untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Salah satu aspek kunci dari pendidikan kewarganegaraan adalah pengembangan kesadaran sipil. Siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan, memahami nilai-nilai kebersamaan, dan menghormati hak asasi manusia. Ini membantu menciptakan generasi yang lebih toleran dan inklusif, yang mampu hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik, seperti pemilihan umum, untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan dihormati.

Di era digital, pendidikan kewarganegaraan harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Media sosial dan platform digital lainnya menjadi alat yang kuat untuk menyebarkan informasi dan mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, siswa perlu dilatih untuk menggunakan teknologi dengan bijak, mengkritisi informasi yang diterima, dan berkomunikasi secara efektif dan etis di ruang digital. Ini penting untuk mencegah penyebaran hoaks dan memastikan bahwa diskusi online berlangsung secara konstruktif.

Pendidikan kewarganegaraan juga harus mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Mereka perlu memahami isu-isu internasional seperti migrasi, perdagangan global, dan keamanan dunia. Dengan pemahaman ini, mereka dapat menjadi warga negara yang lebih bijaksana, yang mampu membuat keputusan yang berinformasi dan berkontribusi pada dialog global yang konstruktif. Ini juga termasuk kemampuan untuk bekerja sama dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dan memahami perspektif global.

BAB II
MAKNA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

2.1 Konsep Kewarganegaraan dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Konsep kewarganegaraan dalam pendidikan kewarganegaraan mengacu pada pemahaman tentang status, hak, kewajiban, dan peran individu sebagai anggota suatu negara. Konsep ini menjadi landasan dalam membentuk warga negara yang berpengetahuan, bertanggung jawab, dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep kewarganegaraan mencakup aspek hukum, identitas, partisipasi, dan moral yang bertujuan membentuk warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan berkontribusi bagi bangsa dan dunia. Pendidikan Kewarganegaraan sangat berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta membekali individu dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan global.

1. Pengertian Kewarganegaraan

   Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dijelaskan bahwa warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan

dijamin pelaksanaannya. Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara, yaitu warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 1 dan 2). Sementara itu, status kewarganegaraan seseorang ditentukan dengan tiga dasar: dasar kelahiran, yakni ius sanguinis (keturunan, hubungan darah) dan ius soli (tempat lahir); dasar perkawinan, yakni asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat; dan dasar naturalisasi atau pewarganegaraan, baik aktif maupun pasif.

Pengertian kewarganegaraan merupakan dasar pokok yang menjelaskan status hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang. Secara sederhana, kewarganegaraan berarti diakui secara resmi sebagai anggota suatu negara, yang memberikan hak untuk menikmati berbagai fasilitas seperti perlindungan hukum, layanan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, status kewarganegaraan juga mewajibkan setiap individu untuk memenuhi kewajiban, seperti mentaati peraturan dan ikut serta dalam kegiatan yang mendukung pembangunan negara. Pemahaman ini menekankan bahwa hak dan kewajiban selalu berjalan beriringan (Suharyadi, 2017).

Lebih lanjut, pengertian kewarganegaraan dalam kaitannya dengan pendidikan mengajarkan bahwa setiap warga negara harus memahami peran mereka dalam sistem

pemerintahan dan kehidupan sosial. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai keadilan, kedisiplinan, dan tanggung jawab, sehingga setiap individu dapat menikmati hak, baik secara pasif maupun aktif, berkontribusi pada kemajuan bangsa. Dengan demikian, konsep kewarganegaraan menjadi jembatan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi, yang mana hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan (Arifin, 2019).

Dalam Islam, konsep kewarganegaraan lebih luas dari sekedar hubungan formal antara individu dan negara. Islam memandang warganegara sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi, yang memiliki tanggung jawab kepada Allah untuk menjaga keseimbangan sosial, politik, dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Islam menekankan bahwa seorang warganegara di samping memiliki hak atas perlindungan dan keadilan, lebih utama juga mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam menegakkan nilai-nilai kebaikan dan mencegah kemungkaran. Beberapa prinsip penting yang berkaitan dengan kewarganegaraan dalam Islam adalah keadilan, musyawarah dan tanggung jawab sosial.

2. Dimensi Kewarganegaraan

   Dimensi kewarganegaraan mencakup tiga aspek utama yang saling melengkapi, yaitu aspek hukum, politik, dan

sosial. Aspek hukum berkaitan dengan pengakuan formal terhadap status seorang individu sebagai warga negara, yang diwujudkan melalui dokumen resmi seperti KTP atau paspor. Dokumen-dokumen ini selain menegaskan status hukum, juga membuka akses kepada berbagai hak sipil dan perlindungan dari negara. Menurut Nugroho (2015), pengakuan status hukum merupakan fondasi awal yang memastikan setiap warga negara memiliki landasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa.

Di sisi lain, aspek politik dan sosial menambahkan dimensi partisipasi dan identitas kebangsaan. Partisipasi politik melibatkan keterlibatan aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, seperti pemilu dan forum diskusi publik, yang merupakan bagian integral dari sistem demokrasi. Peran aktif warga negara itu dimulai sejak penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga menjadi bagian dari pemanfaat hasil keputusan. Sedangkan aspek sosial menitikberatkan pada identitas kebangsaan, di mana individu membangun rasa cinta tanah air dan menghargai keragaman budaya. Menurut Kusumawati (2018), identitas kebangsaan yang kuat mampu menyatukan berbagai elemen masyarakat, sekaligus memperkuat solidaritas antarwarga di tengah dinamika globalisasi.

Jadi, kewarganegaraan tidak cuma sebatas status hukum seseorang dalam suatu negara, melainkan mencakup pula berbagai aspek yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu aspek identitas, partisipasi, dan moral/etika. Dimensi identitas berkaitan dengan kesadaran dan kebanggaan sebagai bagian dari suatu bangsa dan negara. Identitas kewarganegaraan mencerminkan bagaimana seseorang merasa memiliki dan terikat dengan negaranya. Dimensi partisipasi menekankan keaktifan warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di negaranya. Warga negara yang baik di samping menikmati haknya juga harus aktif dalam membangun masyarakat dan negara. Sedangkan dimensi moral dan etika berkaitan dengan nilai-nilai moral dan etika yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kewarganegaraan bukan hanya soal status, tetapi juga tentang bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dimensi-dimensi tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar bagi pembentukan warga negara yang bertanggung jawab, berkontribusi aktif, dan memiliki kesadaran nasional yang tinggi.

Kristian Stokke mengemukakan bahwa politik kewarganegaraan mencakup tiga dimensi, yakni upaya-upaya memperjuangkan keanggotaan, hak-hak dan partisipasi. Ketiganya tersosialisasi dalam bentuk gerakan-

gerakan memperjuangkan nasionalime dan indentitas; keadilan dan redistribusi kesejahteraan; serta gerakan pro-demokrasi (Hiariej, 2017).

3. Pentingnya Kesadaran Kewarganegaraan

   Kesadaran kewarganegaraan merupakan hal pokok dalam membangun masyarakat yang aktif dan memiliki rasa melu handarbeni (ikut memiliki) terhadap negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, individu diajak untuk memahami bahwa hak-hak yang dinikmati harus diimbangi dengan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Pendidikan ini menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan solidaritas, sehingga setiap warga negara tidak sekadar menjadi penerima manfaat melainkan juga pelaku aktif dalam pembangunan bangsa. Hidayat (2020) menyatakan bahwa kesadaran kewarganegaraan merupakan dasar utama bagi terciptanya masyarakat yang demokratis dan harmonis.

   Lebih jauh, kesadaran kewarganegaraan mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan politik. Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban, warga negara menjadi lebih kritis terhadap berbagai kebijakan yang ada dan terlibat dalam upaya perbaikan sistem pemerintahan. Melalui kegiatan seperti diskusi publik, partisipasi dalam pemilu, dan kegiatan sosial lainnya, individu dapat mengekspresikan aspirasi dan turut

serta dalam pengambilan keputusan. Sari (2016) menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk karakter warga yang benar-benar mengerti haknya serta memahami betapa pentingnya tanggung jawab sosial demi kemajuan bersama. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang konsep kewarganegaraan melalui pendidikan memberikan landasan kuat bagi setiap warga negara. Dengan mengintegrasikan aspek hukum, politik, dan sosial, pendidikan kewarganegaraan dapat memfasilitasi pengakuan hak secara formal, sekaligus juga menumbuhkan semangat untuk berkontribusi aktif dalam kehidupan bernegara. Melalui proses ini, nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran akan tanggung jawab bersama dapat terus berkembang dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera (Fauzi, 2018). Pendidikan kewarganegaraan menjadi alat strategis untuk memperkuat identitas nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks, sehingga setiap warga negara memiliki peran yang jelas dalam menjaga keutuhan bangsa. Kesadaran kewarganegaraan ini sangat penting karena mendorong peran aktif dalam kehidupan bernegara, menumbuhkan sikap toleransi dan solidaritas sosial, serta mendukung pembangunan karakter bangsa, terutama dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

2.2 Nilai – Nilai Dasar dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan menanamkan nilai-nilai dasar seperti penghargaan terhadap hak asasi manusia, toleransi, keadilan, dan semangat demokrasi sebagai fondasi dalam membentuk karakter dan identitas bangsa. Melalui pendidikan ini, generasi muda didorong untuk memahami peran aktif mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab, menghormati perbedaan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik demi terciptanya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Nilai-nilai tersebut dapat memperkuat kesadaran akan hak dan kewajiban, serta mendorong pengembangan sikap kritis dan keterampilan dialog dalam menghadapi dinamika global yang kompleks (Suryadi, 2019; Kemendikbud, 2020).

1. Nilai Demokrasi

   Menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, keadilan, dan kesetaraan hak.

   Nilai demokrasi merupakan nilai utama dalam pendidikan kewarganegaraan karena ia menekankan pentingnya kebebasan berpendapat, keadilan, kesetaraan hak dan partisipasi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, makna demokrasi di samping berarti sistem pemerintahan, juga mencakup sikap dan perilaku yang mendukung kebebasan individu untuk menyampaikan ide dan aspirasi tanpa ragu dan rasa takut.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai tersebut agar setiap warga negara dapat memahami bahwa hak untuk bersuara dan berpartisipasi merupakan bagian dari upaya bersama mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera (Sari, 2016). Pendidikan ini mengajak peserta didik untuk mengapresiasi perbedaan pendapat sebagai kekayaan demokrasi yang memperkuat keberagaman dan membuka ruang diskusi konstruktif dalam kehidupan sosial.

Selain daripada itu, nilai demokrasi juga menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan hak di antara seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan mendorong generasi muda untuk memahami bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang, memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan serta kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik di lingkungan tempat pendidikan, masyarakat, maupun dalam ranah politik. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang nilai demokrasi diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan mampu mengatasi ketidaksetaraan sosial yang ada (Arifin, 2019).

Nilai demokrasi juga menanamkan sikap toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial, yang menjadi fondasi

dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai demokrasi, warga negara dapat berkontribusi dalam menciptakan tata kehidupan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

2. Nilai Kebangsaan

   Cinta tanah air, nasionalisme, dan penghormatan terhadap simbol negara.

   Nilai kebangsaan merupakan elemen pokok dalam pendidikan kewarganegaraan yang menekankan cinta tanah air dan semangat nasionalisme. Nilai ini mengajarkan setiap individu untuk memiliki rasa bangga dan menghargai identitas sebagai warga negara Indonesia. Melalui pendidikan kewarganegaraan, peserta didik diajak untuk mengenal sejarah, budaya, dan perjuangan bangsa yang menjadi dasar pembentukan identitas nasional. Pengenalan terhadap simbol-simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara, bahwa itu semua selain sebagai simbol formal, juga merupakan representasi nilai-nilai luhur yang menginspirasi rasa persatuan dan kesatuan (Kusumawati, 2018). Dengan cara ini, generasi muda dapat membangun karakter yang kuat dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa.

   Nilai kebangsaan juga berperan signifikan dalam membentuk sikap nasionalisme yang konstruktif, di mana

penghormatan terhadap simbol negara harus disertai dengan pemahaman mendalam akan arti pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah. Pendidikan kewarganegaraan memberikan ruang bagi peserta didik untuk memahami tantangan-tantangan global dan bagaimana nilai-nilai kebangsaan dapat menjadi landasan dalam menghadapi perubahan zaman. Melalui kegiatan-kegiatan seperti upacara bendera, diskusi sejarah, dan kegiatan-kegiatan kebudayaan, nilai kebangsaan diinternalisasi sehingga tumbuh rasa tanggung jawab untuk terus melestarikan warisan budaya dan semangat patriotisme (Fauzi, 2018). Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat menghasilkan warga negara yang cerdas secara intelektual dan memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi.

3. Nilai Toleransi dan Keberagaman

   Menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya dalam kehidupan bernegara.

   Nilai toleransi dan keberagaman menjadi aspek penting dalam pendidikan kewarganegaraan yang harus ditanamkan sejak dini agar tercipta harmoni dalam masyarakat multikultural. Nilai ini menekankan pentingnya menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya sebagai kekayaan yang memperkaya kehidupan berbangsa. Pendidikan kewarganegaraan memberikan pemahaman

bahwa perbedaan tersebut bukanlah sebuah alasan untuk konflik, melainkan kesempatan untuk saling belajar dan menguatkan kerukunan antarwarga. Dengan membangun sikap toleransi, setiap individu diajak untuk melihat perbedaan sebagai potensi positif yang dapat menyatukan masyarakat dalam semangat persatuan dan kesatuan (Hidayat, 2020). Penghargaan terhadap keberagaman juga mendorong dialog antarbudaya yang konstruktif dan membantu mengurangi prasangka serta diskriminasi dalam lingkungan sosial.

Lebih dari itu, pendidikan yang mengusung nilai toleransi dan keberagaman juga dapat mendorong masyarakat untuk aktif mencari pemahaman lintas budaya dan mengembangkan sikap inklusif. Peserta didik didorong untuk berinteraksi dengan berbagai kelompok masyarakat, memahami perspektif yang berbeda, dan belajar untuk hidup berdampingan secara damai. Pendekatan ini sangat penting dalam kaitan globalisasi yang membawa berbagai pengaruh budaya asing, sehingga menjaga identitas lokal dan nasional menjadi semakin menantang. Melalui pendidikan kewarganegaraan, diharapkan setiap individu dapat menjadi agen perubahan yang mampu mengedepankan dialog dan kerjasama lintas budaya, serta menolak segala bentuk intoleransi yang berpotensi merusak persatuan bangsa (Sari, 2016). Dengan penguatan

nilai toleransi, masyarakat dapat membangun lingkungan yang harmonis, inklusif, dan mampu menghadapi tantangan zaman secara bersama-sama.

2.3 Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan toleransi sejak dini. Melalui pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, pendidikan ini mendorong generasi muda untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta mengembangkan sikap kritis dan empati terhadap perbedaan. Proses pembelajaran yang interaktif dan kontekstual membantu peserta didik menginternalisasi nilai-nilai moral dan etika yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan harmonis. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan dapat membentuk karakter individu serta berkontribusi pada pembentukan identitas nasional yang kuat dan berdaya saing di era globalisasi.

1. Membentuk Warga Negara yang Bertanggung Jawab

   Pendidikan kewarganegaraan memegang peran penting dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab dengan menumbuhkan kesadaran atas hak dan kewajiban yang dimiliki. Melalui pembelajaran yang sistematis, individu diajak untuk memahami bahwa hak-hak yang

diperoleh dari negara harus disertai dengan tanggung jawab untuk turut serta menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Proses ini mencakup pemahaman mengenai berbagai hak sipil, politik, dan sosial yang melekat pada status sebagai warga negara, sekaligus menekankan pentingnya kewajiban untuk mematuhi hukum dan berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat (Suharyadi, 2017).

Dalam hubungannya dengan hal ini, pendidikan kewarganegaraan diharapkan mampu mentransfer pengetahuan secara teoritis, sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika ke dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta didik diajarkan untuk menghargai kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang aplikatif. Keterlibatan aktif dalam kegiatan seperti diskusi kelompok, simulasi pemungutan suara, dan proyek pengabdian masyarakat membantu individu menyadari perlunya berperan serta secara konstruktif. Hasilnya adalah terbentuknya generasi yang betul-betul memahami hak-haknya, serta siap menjalankan kewajiban demi terciptanya masyarakat yang adil dan berintegritas (Arifin, 2019).

2. Meningkatkan Kecerdasan Politik

   Pendidikan kewarganegaraan juga berperan strategis dalam meningkatkan kecerdasan politik, khususnya di

kalangan mahasiswa. Dengan pemahaman mendalam tentang sistem politik, hukum, dan pemerintahan, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi kebijakan publik dan dinamika politik nasional. Pengetahuan ini memberikan landasan bagi mereka untuk memahami mekanisme demokrasi, sehingga mampu membedakan antara informasi yang valid dan hoaks. Melalui pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, mahasiswa didorong untuk aktif mengikuti proses politik, seperti pemilihan umum dan forum diskusi publik, yang diharapkan mampu membentuk sikap kritis dan konstruktif (Nugroho, 2015).

Di samping itu, peningkatan kecerdasan politik juga membantu mahasiswa menyadari hubungan erat antara aspek hukum dan kehidupan sehari-hari. Mereka diajak untuk memahami bagaimana peraturan perundang-undangan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemerataan keadilan sosial. Pemahaman ini diperlukan untuk membekali mereka dengan kemampuan analisis terhadap isu-isu strategis dalam negeri, sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi positif dalam merumuskan solusi bagi permasalahan yang ada. Di era globalisasi ini, kecerdasan politik menjadi modal penting bagi generasi muda agar mampu beradaptasi dan

menghadapi tantangan baru dalam sistem pemerintahan yang semakin kompleks (Hidayat, 2020).

3. Menanamkan Semangat Bela Negara

   Semangat bela negara merupakan salah satu nilai utama yang harus ditanamkan melalui pendidikan kewarganegaraan agar generasi muda memiliki motivasi yang tinggi dalam menjaga kedaulatan negara. Melalui berbagai kegiatan edukatif, seperti upacara bendera, peringatan hari kemerdekaan, dan diskusi mengenai sejarah perjuangan bangsa, peserta didik didorong untuk menginternalisasi rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap identitas nasional. Pendidikan ini memberikan pemahaman bahwa bela negara bukan semata-mata tanggung jawab aparat pertahanan, melainkan tugas bersama setiap warga negara dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah. Pemahaman ini menjadi bekal penting untuk melawan berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri (Kusumawati, 2018).

   Lebih jauh lagi, menanamkan semangat bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan mendorong generasi muda untuk aktif berkontribusi dalam berbagai upaya pembangunan nasional. Generasi muda diajak untuk memahami perlunya pertahanan negara secara teoritis, dan juga didorong untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang mendukung keamanan dan ketahanan bangsa. Partisipasi

dalam organisasi kepemudaan dan program-program pengabdian masyarakat merupakan contoh nyata bagaimana semangat bela negara dapat diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Motivasi ini, jika ditanamkan secara konsisten, akan menghasilkan warga negara yang siap berkorban demi kepentingan bersama dan berperan aktif dalam menjaga keutuhan negara, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah global (Fauzi, 2018).

2.4 Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membangun Masyarakat Madani

Membangun masyarakat madani sangat penting karena menciptakan lingkungan sosial yang demokratis, inklusif, dan berkeadaban. Masyarakat madani mengedepankan partisipasi aktif warga negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan toleransi antar perbedaan, sehingga memungkinkan terwujudnya dialog terbuka dan keadilan sosial. Dengan fondasi tersebut, setiap individu mendapatkan ruang untuk berkembang dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, yang diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Di samping memperkuat persatuan dan kohesi sosial, hal ini juga mendukung pencapaian kesejahteraan bersama dan stabilitas nasional.

1. Masyarakat Madani sebagai Tujuan

   Masyarakat madani merupakan cita-cita ideal yang ingin dicapai melalui pendidikan kewarganegaraan, di mana setiap individu hidup dalam lingkungan yang demokratis, berkeadilan, dan menghargai hukum serta hak asasi manusia (HAM). Konsep ini menekankan bahwa pembangunan bangsa itu tidak cuma soal aspek ekonomi dan teknologi, melainkan juga tentang nilai-nilai sosial dan budaya yang mampu menciptakan keharmonisan antarwarga. Pendidikan kewarganegaraan berperan besar dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut dengan mengajarkan arti demokrasi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap HAM sejak dini. Hal ini diharapkan mampu membentuk masyarakat yang betul-betul sadar akan haknya, serta memahami tanggung jawabnya sebagai bagian dari kehidupan bernegara (Sari, 2016).

   Dalam praktiknya, pembentukan masyarakat madani dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui program pendidikan yang aplikatif. Sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga masyarakat berperan dalam menyebarluaskan nilai-nilai tersebut melalui diskusi, seminar, dan kegiatan sosial yang mendukung partisipasi aktif warga negara. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan menjadi alat strategis untuk menciptakan ruang publik yang inklusif dan

terbuka, di mana perbedaan pendapat dihargai dan setiap individu merasa memiliki bagian dalam proses pembangunan bangsa. Pendekatan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat mekanisme demokrasi dan menjamin hak-hak asasi manusia secara merata (Hidayat, 2020).

2. Peran Institusi Pendidikan

   Institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi, memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan pemikiran kritis generasi muda. Di lingkungan kampus, mahasiswa tidak sekadar diajarkan ilmu pengetahuan secara teoretis, tetapi juga diberikan ruang untuk mengembangkan diskursus dan pemikiran yang kritis terhadap berbagai fenomena sosial-politik. Melalui perkuliahan, seminar, dan diskusi terbuka, perguruan tinggi menjadi tempat di mana nilai-nilai demokrasi dan keadilan dapat ditanamkan secara mendalam. Proses pembelajaran yang interaktif ini memotivasi mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam forum publik dan menyuarakan aspirasinya, sehingga mereka tumbuh menjadi warga negara yang kritis dan bertanggung jawab (Arifin, 2019).

   Lebih lanjut, kampus juga berperan sebagai laboratorium ide yang mendorong inovasi dan kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Kegiatan ekstrakurikuler, penelitian, dan kerja sama dengan berbagai

lembaga pemerintahan atau swasta memungkinkan mahasiswa mengasah kemampuan analitis dan strategis. Hal ini di samping mampu meningkatkan kecerdasan politik, juga dapat memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi yang mendasar. Dengan demikian, peran institusi pendidikan dalam membentuk pemikiran kritis dan sikap demokratis menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat madani yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global (Fauzi, 2018).

3. Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat

   Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan elemen pokok dalam upaya membangun bangsa yang maju dan beradab. Pendidikan kewarganegaraan menekankan pentingnya sinergi antara kedua pihak tersebut dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik yang berkeadilan. Pemerintah memiliki peran sebagai pembuat kebijakan yang harus menyediakan kerangka hukum dan infrastruktur bagi pembangunan, sedangkan masyarakat bertugas untuk mengawasi, memberikan masukan, serta berperan aktif dalam implementasi kebijakan tersebut. Kerjasama ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial yang menjadi fondasi masyarakat madani (Kusumawati, 2018).

Selain itu, kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat membuka peluang untuk dialog konstruktif yang dapat mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Melalui forum-forum diskusi, musyawarah, dan mekanisme partisipatif lainnya, warga negara memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi dan kritik yang membangun terhadap kebijakan publik. Sinergi ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, juga menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap pembangunan bangsa. Menurut Nugroho (2015), keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap perumusan kebijakan akan memperkuat kepercayaan publik dan mendorong terciptanya lingkungan yang harmonis, adil, serta berdaya saing tinggi. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi modal utama dalam mewujudkan masyarakat madani yang sesungguhnya.

Jadi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan menghargai hak asasi manusia. Masyarakat madani bukan sekadar konsep, tetapi merupakan tujuan nyata yang dapat dicapai melalui pendidikan yang berbasis nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan. Institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi, berperan dalam membentuk pemikiran kritis dan

sikap demokratis generasi muda melalui berbagai kegiatan akademik dan sosial yang aplikatif. Kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari seluruh elemen bangsa.

Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan, generasi muda akan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Pembangunan masyarakat madani menjadi tanggung jawab pemerintah dan membutuhkan keterlibatan aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi berkembangnya nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hukum dan HAM. Dengan cara ini, bangsa Indonesia dapat terus bergerak menuju masa depan yang lebih beradab dan maju.

BAB III
ISI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

3.1 Identitas Nasional

Identitas nasional adalah suatu ciri khas atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu bangsa dan menjadi pembeda utama dari bangsa lain. Identitas ini mencerminkan nilai-nilai, budaya, simbol, serta sistem sosial dan politik yang dianut oleh suatu negara. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional adalah unsur-unsur yang menjadi penanda keberadaan bangsa Indonesia, baik dalam bentuk simbolik (seperti bendera dan lambang negara) maupun dalam bentuk nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun.

1. Unsur-Unsur Identitas Nasional

   Unsur identitas nasional Indonesia meliputi bahasa nasional (Bahasa Indonesia), bendera Merah Putih, lagu kebangsaan "Indonesia Raya," lambang negara Garuda Pancasila, semboyan "Bhinneka Tunggal Ika," serta konstitusi negara (UUD 1945). Selain itu, nilai-nilai Pancasila, agama, adat istiadat, seni dan budaya, serta sejarah perjuangan bangsa juga menjadi bagian penting dari identitas nasional. Unsur-unsur ini berfungsi sebagai pemersatu yang mengikat seluruh warga negara Indonesia dalam satu kesatuan.

2. Fungsi Identitas Nasional

   Identitas nasional memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi utamanya adalah sebagai alat pemersatu masyarakat yang majemuk, memperkuat jati diri bangsa, serta memperkokoh integrasi nasional. Identitas ini juga berfungsi sebagai pelindung dari pengaruh negatif globalisasi dan sebagai alat diplomasi budaya di kancah internasional. Dengan memiliki identitas yang kuat, suatu bangsa dapat tetap eksis dan berdaulat dalam dinamika global.

3. Pembentukan Identitas Nasional

   Proses pembentukan identitas nasional tidak terjadi secara instan, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Di Indonesia, identitas nasional terbentuk melalui perjuangan melawan kolonialisme, proses perumusan Pancasila, dan proklamasi kemerdekaan. Seiring waktu, pengalaman sosial, politik, dan budaya terus memperkuat identitas ini. Pembentukan identitas nasional juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, media massa, dan kebijakan pemerintah.

4. Tantangan terhadap Identitas Nasional

   Meskipun identitas nasional memiliki peran penting, keberadaannya sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam era globalisasi. Arus budaya asing yang masuk secara masif dapat mengikis nilai-nilai lokal dan

nasional, terutama di kalangan generasi muda. Selain itu, konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) serta sikap primordialisme juga menjadi ancaman serius terhadap keutuhan identitas nasional. Oleh karena itu, penguatan identitas nasional harus menjadi prioritas dalam berbagai sektor kehidupan.

5. Strategi Penguatan Identitas Nasional

   Penguatan identitas nasional dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelestarian budaya lokal, penguatan karakter bangsa, serta peningkatan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan kepada seluruh lapisan masyarakat. Media juga memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan konten-konten yang memperkuat semangat kebangsaan.

6. Peran Pendidikan dalam Pembentukan Identitas Nasional

   Pendidikan memiliki posisi sentral dalam membentuk identitas nasional. Melalui kurikulum dan proses pembelajaran, siswa dapat dikenalkan pada sejarah bangsa, nilai-nilai Pancasila, dan pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, kerja sama, dan gotong royong akan menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air pada peserta

didik, sehingga mereka menjadi agen penguat identitas nasional di masa depan.

7. Identitas Nasional dalam Perspektif Global

   Dalam dunia yang makin terbuka, identitas nasional juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika global tanpa kehilangan jati dirinya. Indonesia perlu memanfaatkan identitas nasional sebagai daya saing budaya, sekaligus memperkenalkan kekayaan lokal ke panggung internasional. Upaya seperti diplomasi budaya, pengenalan kuliner dan seni tradisional di luar negeri, serta penguatan produk dalam negeri menjadi langkah penting dalam mempertahankan identitas nasional di tengah globalisasi.

8. Simbol-Simbol Identitas dan Peranannya

   Simbol-simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara bukan hanya hiasan, tetapi mengandung nilai historis dan ideologis yang kuat. Ketika simbol-simbol ini dihormati dan dimaknai dengan benar, maka rakyat akan memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga warisan dan martabat bangsa. Misalnya, upacara bendera setiap Senin bukan hanya ritual rutin, tetapi sarana untuk menanamkan nilai nasionalisme sejak dini.

3.2 Konstitusi dan Norma Hukum

Konstitusi merupakan hukum dasar yang memuat prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan suatu negara. Secara etimologis, konstitusi berasal dari bahasa Latin constitutio, yang berarti menetapkan atau membentuk. Dalam konteks kenegaraan, konstitusi menjadi landasan tertinggi dalam sistem hukum dan pemerintahan. Menurut Jimly Asshiddiqie (2009), konstitusi tidak hanya mencakup aturan tertulis seperti UUD, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dan prinsip dasar yang hidup dalam praktik ketatanegaraan suatu bangsa. Dengan demikian, konstitusi bersifat normatif sekaligus ideologis.

1. Fungsi Konstitusi dalam Negara

   Konstitusi memiliki beberapa fungsi pokok, yaitu sebagai alat pembatas kekuasaan, penjamin hak asasi manusia, pengatur hubungan antara lembaga negara, serta penentu identitas dan arah ideologi bangsa. Dalam sistem demokrasi, konstitusi menjadi tameng utama terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Sebagai norma tertinggi (*grundnorm*), semua peraturan perundang-undangan harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Hal ini sesuai dengan prinsip *supremacy of constitution.*

2. Norma Hukum: Definisi dan Karakteristik

   Norma hukum adalah kaidah sosial yang mengandung perintah, larangan, atau kebolehan yang bersifat mengikat

dan memiliki sanksi jika dilanggar. Norma hukum berbeda dari norma sosial lainnya karena keberadaannya ditegakkan oleh negara melalui institusi yang sah, seperti pengadilan atau aparat penegak hukum. Menurut Satjipto Rahardjo (2009), norma hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga sarat dengan nilai moral dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3. Hubungan Konstitusi dan Norma Hukum

   Konstitusi merupakan sumber tertinggi dari semua norma hukum dalam suatu sistem hukum. Setiap norma hukum yang dibuat, baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah, harus sejalan dengan konstitusi. Dalam teori hierarki norma Hans Kelsen, konstitusi menempati posisi tertinggi dalam tata urutan norma hukum. Oleh karena itu, jika ada norma hukum yang bertentangan dengan konstitusi, maka norma tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme judicial review oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Jenis-jenis Konstitusi dan Implikasinya terhadap Norma Hukum

   Konstitusi dapat dibedakan menjadi konstitusi tertulis (written constitution) dan tidak tertulis (*unwritten constitution*). Negara seperti Indonesia menganut konstitusi tertulis melalui Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan konstitusi tertulis memberikan kepastian hukum dan

menjadi pedoman bagi pembentukan norma hukum lainnya. Di sisi lain, konstitusi tidak tertulis, seperti di Inggris, lebih mengandalkan praktik kebiasaan, konvensi, dan keputusan pengadilan sebagai sumber norma hukum.

5. Perubahan Konstitusi dan Dinamika Norma Hukum
   Konstitusi bukanlah dokumen yang statis; ia dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perubahan konstitusi dapat berimplikasi langsung terhadap perubahan norma hukum. Sebagai contoh, amandemen UUD 1945 yang dilakukan sejak tahun 1999 hingga 2002 telah membawa perubahan besar terhadap sistem hukum Indonesia, termasuk lahirnya lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan pergeseran sistem kekuasaan legislatif-eksekutif.
6. Penegakan Norma Hukum Berdasarkan Konstitusi
   Penegakan norma hukum harus mengacu pada nilai-nilai konstitusional seperti keadilan, kesetaraan, dan supremasi hukum. Dalam konteks ini, peran lembaga peradilan sangat penting. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi benteng terakhir dalam menjaga agar setiap norma hukum tidak menyimpang dari konstitusi. Selain itu, penegakan hukum yang konstitusional juga menuntut aparat penegak hukum bertindak profesional dan independen.

7. Tantangan dalam Implementasi Konstitusi dan Norma Hukum

   Meskipun konstitusi dan norma hukum telah ditetapkan secara formal, tantangan dalam implementasinya masih sangat besar. Praktik hukum yang koruptif, lemahnya budaya hukum, serta tumpang tindih peraturan seringkali membuat konstitusi dan norma hukum tidak efektif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan institusi hukum dan pendidikan hukum yang berbasis pada nilai-nilai konstitusional untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

8. Peran Masyarakat dalam Menegakkan Konstitusi dan Norma Hukum

   Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan konstitusi dan norma hukum. Partisipasi aktif dalam pengawasan publik, advokasi hukum, serta penggunaan hak konstitusional seperti hak uji materi di Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat bukan hanya slogan, tetapi juga prinsip operasional dalam negara hukum. Menurut Maria Farida Indrati (2010), konstitusi yang demokratis harus memberikan ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada warga negara.

9. Penutup

   Konstitusi dan norma hukum adalah dua pilar utama dalam membangun negara hukum yang adil dan demokratis.

Keduanya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Konstitusi memberikan arah, batas, dan nilai-nilai dasar, sementara norma hukum mengatur perilaku konkret dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya harus ditegakkan secara konsisten untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan umum.

3.3 Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Secara historis, demokrasi Indonesia mengalami berbagai dinamika sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer, namun sering mengalami instabilitas politik akibat pergantian kabinet yang terlalu sering. Hal ini menyebabkan munculnya gagasan untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin pada era Presiden Soekarno, yang berlangsung dari akhir 1950-an hingga pertengahan 1960-an. Masa ini ditandai oleh kuatnya kekuasaan eksekutif dan melemahnya lembaga-lembaga demokrasi seperti parlemen dan partai politik.

Setelah jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto ke tampuk kekuasaan pada tahun 1966, Indonesia memasuki era Orde Baru yang dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Meskipun secara formal masih menggunakan istilah demokrasi, pada praktiknya sistem ini sangat otoriter. Pemerintah mengontrol ketat kebebasan pers,

membatasi oposisi politik, dan mengatur hasil pemilu melalui Golongan Karya (Golkar) sebagai partai dominan. Masa ini juga ditandai oleh pembangunan ekonomi yang cukup pesat, tetapi dibayangi oleh pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang merajalela.

Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Setelah Presiden Soeharto mundur, Indonesia memasuki era Reformasi yang ditandai dengan liberalisasi politik, desentralisasi kekuasaan, dan pemilu yang lebih terbuka dan kompetitif. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan antara tahun 1999 hingga 2002 memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemisahan kekuasaan, pemilihan langsung presiden dan kepala daerah, serta pembentukan lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu karakteristik utama demokrasi Indonesia pasca-Reformasi adalah pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Pemilihan presiden secara langsung pertama kali dilakukan pada tahun 2004. Sejak itu, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih secara langsung tidak hanya presiden dan wakil presiden, tetapi juga anggota legislatif dan kepala daerah. Hal ini mencerminkan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat secara lebih nyata dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Namun, meskipun demokrasi Indonesia telah berkembang secara prosedural, tantangan tetap ada pada aspek substansial. Politik uang, dinasti politik, intoleransi, dan rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat masih menjadi hambatan dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Selain itu, peran partai politik sebagai pilar utama demokrasi belum sepenuhnya maksimal dalam menjalankan fungsi edukasi, artikulasi kepentingan, dan rekrutmen politik yang sehat.

Media sosial juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, media digital memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun di sisi lain, munculnya hoaks, polarisasi, dan ujaran kebencian menjadi tantangan baru yang mengancam kualitas demokrasi. Literasi digital menjadi semakin penting dalam membentuk warga negara yang kritis dan bertanggung jawab.

Lembaga-lembaga negara yang independen seperti KPK, Ombudsman, dan Komnas HAM memainkan peran penting dalam menjaga prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, independensi lembaga-lembaga ini seringkali mendapat tekanan dari kekuasaan politik, yang menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih belum sepenuhnya mapan. Kuatnya eksekutif dan lemahnya kontrol parlemen serta masyarakat sipil juga menjadi catatan penting.

Dalam konteks global, demokrasi Indonesia kerap disebut sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia yang tumbuh di negara mayoritas Muslim. Keberhasilan Indonesia dalam menggelar pemilu damai secara berkala menjadi model bagi negara-negara berkembang lainnya. Meski demikian, demokrasi tidak boleh dianggap sebagai sistem yang statis. Diperlukan penguatan terus-menerus terhadap nilai-nilai demokrasi seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas agar sistem ini tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Sebagai kesimpulan, demokrasi Indonesia merupakan hasil dari proses panjang dan penuh tantangan. Dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin, lalu ke demokrasi Pancasila, hingga akhirnya demokrasi konstitusional pasca-Reformasi. Meskipun telah mengalami kemajuan signifikan, demokrasi Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan yang menuntut perbaikan struktural dan kultural. Partisipasi aktif masyarakat, penguatan lembaga demokrasi, dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci utama dalam mewujudkan demokrasi yang matang dan berkelanjutan.

3.4 Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang secara inheren dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, bahasa, atau status lainnya. HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut (inalienable), yang

berarti hak-hak ini melekat pada setiap individu hanya karena mereka adalah manusia. Konsep HAM bertujuan untuk melindungi martabat manusia dan menjamin bahwa setiap orang diperlakukan dengan adil dan setara di depan hukum.

Secara historis, gagasan HAM berkembang melalui perjuangan panjang umat manusia terhadap penindasan dan ketidakadilan. Tonggak penting dalam sejarah HAM modern adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*/UDHR) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Dokumen ini menjadi dasar hukum dan moral bagi pengembangan berbagai instrumen HAM di tingkat nasional maupun internasional.

HAM mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, dan hak atas peradilan yang adil, hingga hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Dalam praktiknya, hak-hak ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, yang berarti pelanggaran terhadap satu hak akan berdampak pada pelaksanaan hak lainnya.

Secara konseptual, HAM dibagi menjadi beberapa generasi. Generasi pertama meliputi hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berbicara dan hak memilih. Generasi kedua mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan dan pekerjaan. Sementara itu, generasi ketiga berfokus pada solidaritas kolektif seperti hak atas pembangunan, lingkungan yang

bersih, dan perdamaian. Pembagian ini menunjukkan bahwa HAM terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

HAM juga diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, perlindungan HAM diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 28A hingga 28J. Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mempertegas komitmen negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah wujud konkret dari pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia.

Meskipun berbagai perangkat hukum telah disiapkan, pelanggaran HAM masih sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pelanggaran tersebut dapat berupa kekerasan terhadap kelompok minoritas, penindasan politik, pelanggaran hak buruh, hingga konflik bersenjata yang menimbulkan korban sipil. Oleh karena itu, penegakan HAM memerlukan komitmen kuat dari negara, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat sipil.

Peran lembaga internasional seperti PBB, Amnesty International, dan Human Rights Watch sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan HAM di tingkat global. Organisasi-organisasi ini berfungsi sebagai pengawas, pelapor, dan advokat bagi korban pelanggaran HAM. Selain itu, mekanisme seperti Dewan HAM PBB dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

menjadi sarana penting untuk mengadili pelanggaran HAM berat, termasuk genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pendidikan HAM juga memegang peranan vital dalam mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya, diharapkan akan tumbuh budaya saling menghargai dan menghormati antarindividu. Pendidikan HAM seharusnya dimulai sejak dini di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, agar nilai-nilai kemanusiaan dapat tertanam dengan baik.

Dengan demikian, HAM bukan hanya merupakan konsep hukum atau politik, melainkan juga nilai moral universal yang harus dijunjung tinggi oleh setiap individu dan bangsa. Perlindungan terhadap HAM menjadi indikator penting bagi kemajuan suatu negara dan kualitas peradabannya. Negara yang menghormati dan melindungi HAM akan menciptakan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

3.5 Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang suatu bangsa terhadap diri dan lingkungan sekitarnya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks Indonesia, wawasan kebangsaan berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 serta realitas kebhinekaan yang membentuk identitas nasional. Konsep ini mencerminkan semangat

untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara dalam menghadapi tantangan global maupun domestik.

1. Tujuan Wawasan Kebangsaan

   Tujuan utama dari wawasan kebangsaan adalah menciptakan rasa cinta tanah air, memperkuat integrasi nasional, dan membentuk sikap serta perilaku warga negara yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya. Hal ini penting untuk membangun solidaritas antarwarga negara yang berasal dari latar belakang etnis, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda. Wawasan kebangsaan juga berperan dalam memperkokoh karakter bangsa yang demokratis dan bermartabat.

2. Dimensi Wawasan Kebangsaan

   Wawasan kebangsaan memiliki beberapa dimensi penting, antara lain dimensi ideologis, historis, sosiokultural, dan geografis. Dimensi ideologis berkaitan dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila; dimensi historis merujuk pada perjuangan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan; dimensi sosiokultural menyoroti pentingnya keberagaman dalam persatuan; sementara dimensi geografis menekankan pentingnya wilayah sebagai satu kesatuan yang utuh.

3. Nasionalisme sebagai Pilar Kebangsaan

   Nasionalisme adalah semangat kebangsaan atau rasa cinta yang mendalam terhadap tanah air. Nasionalisme

mendorong individu untuk mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dalam sejarah Indonesia, nasionalisme telah menjadi kekuatan pendorong dalam perjuangan melawan kolonialisme dan membentuk identitas nasional. Nasionalisme juga menjadi landasan dalam membangun negara yang mandiri dan berdaulat.

4. Ciri-Ciri Nasionalisme yang Sehat

   Nasionalisme yang sehat ditandai oleh rasa bangga terhadap bangsa sendiri tanpa merendahkan bangsa lain, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menghormati keberagaman. Nasionalisme yang berlebihan atau sempit justru bisa menimbulkan konflik dan intoleransi. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan nasionalisme yang inklusif dan terbuka dalam kerangka NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

5. Peran Pendidikan dalam Menanamkan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme

   Pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme sejak dini. Melalui kurikulum pendidikan yang menekankan nilai-nilai kebangsaan, siswa dapat memahami pentingnya cinta tanah air, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler dan pengalaman langsung seperti

upacara bendera dan kunjungan sejarah juga dapat memperkuat nilai-nilai tersebut.

6. Tantangan dalam Membangun Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme

   Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, tantangan terhadap wawasan kebangsaan dan nasionalisme semakin kompleks. Arus informasi yang tak terbendung dapat mempengaruhi pola pikir dan nilai generasi muda. Ideologi asing, radikalisme, dan disintegrasi sosial menjadi ancaman nyata. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif dan inovatif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah perubahan zaman.

7. Upaya Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme

   Penguatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme dapat dilakukan melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Program-program seperti bela negara, pembinaan karakter, dan penguatan kearifan lokal dapat menjadi sarana efektif dalam membentuk jiwa nasionalis. Media massa dan platform digital juga harus digunakan secara positif untuk menyebarkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat luas.

BAB IV
TUJUAN DAN FUNGSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

4.1 Pendahuluan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) bukan sekadar mata pelajaran hafalan tentang peraturan dan sejarah bangsa. Mata pelajaran ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki rasa kebangsaan, cerdas, cinta tanah air, demokratis, bertanggung jawab dan partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Nurdiansyah & Dewi, 2021; Estellés & Fischman, 2021; Viciana et al., 2020; Alldred & Fox, 2019).

Isa & Dewi (2021) menjelaskan bahwa PKn membekali individu dengan pemahaman, keterampilan, dan karakter yang dibutuhkan untuk menavigasi kompleksitas dunia modern. Tantangan multidimensi di era globalisasi bisa dilihat dalam bentuk seperti intoleransi, radikalisme, disinformasi, dan erosi nilai-nilai kebangsaan. Keadaan ini menyebabkan peran PKn semakin krusial guna meningkatkan kualitas dan daya saing masyarakat dalam menghadapi kehadiran globalisasi.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara inheren terkait dengan cita-cita dan tujuan nasional suatu bangsa, bahwa

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berkontribusi pada pembangunan karakter bangsa, pengukuatan persatuan dan kesatuan, serta perwujudan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat (Sena & Najicha, 2023).

Melalui bab 4 ini, diharapkan dapat diuraikan secara mendalam tujuan dan fungsi PKn, dan mengelompokkannya ke dalam beberapa aspek utama, serta memberikan contoh konkret untuk memperjelas tentang konsep "warga negara yang baik".

4.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) pada hakikatnya merupakan program pendidikan yang berazaskan nilai-nilai Pancasila, sebagai sarana untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur yang berakar pada budaya bangsa, dan diharapkan menjadi identitas yang terwujud dalam perilaku di masyarakat atau dikenal dengan nilai-nilai moral bangsa (Prasetyo et al., 2023).

Tujuan utama Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah untuk membentuk warga negara yang baik (good citizen) dan cerdas dengan cara memberikan pemahaman yang menyeluruh terkait hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat dan negara, serta membangkitkan semangat kebangsaan dan rasa tanggung jawab sosial (Kusumawardani et al., 2024). Konsep "warga negara yang baik" memiliki dimensi yang luas, mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual (Asyari & Dewi, 2021; Kusman, 2020). Sementara tujuan spesifiknya antara lain,

membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, memperkuat identitas nasional dan nilai-nilai kebangsaan, sarana pengembangan kemampuan intelektual dan kritis dan wahana partisipasi dan tanggung jawab kewarganegaraan:

1. Membentuk Warga Negara yang Demokratis dan Bertanggung Jawab

   Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan upaya sadar dan terencana yang bertujuan mencerdaskan dan memberdayakan warga negara dengan cara menumbuhkan moralitas, jati diri, dan karakter bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban di suatu negara (Prasetyo et al., 2023), selain memiliki fungsi krusial dalam membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Setiyaningsih et al., 2020).

   Menurut Sena & Najicha (2023), PKn secara sistematis menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai warga negara. Proses ini tidak hanya sebatas mengenalkan daftar hak asasi manusia, hak memilih, hak atas pendidikan, dan hak-hak lainnya, namun juga menanamkan pemahaman tentang makna, batasan, dan implikasi dari setiap hak tersebut. Lebih lanjut, PKn juga menekankan pentingnya kewajiban-kewajiban yang seimbang, seperti membayar pajak sebagai kontribusi terhadap negara, menghormati hukum sebagai landasan ketertiban sosial, dan memiliki

kesediaan untuk membela negara sebagai wujud loyalitas dan tanggung jawab kolektif. Kesadaran yang mendalam ini menjadi landasan bagi partisipasi yang tidak hanya aktif, tetapi juga bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara, di mana setiap tindakan dan pilihan didasari oleh pemahaman yang utuh tentang hak dan kewajiban.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara komprehensif membangun pemahaman yang mendalam tentang sistem politik dan pemerintahan yang berlaku di negara. Ini mencakup pengenalan terhadap struktur kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif) beserta fungsi dan mekanisme kerjanya, pemahaman tentang mekanisme demokrasi seperti pemilihan umum, pembentukan opini publik, dan kebebasan berorganisasi, serta pemahaman tentang proses pembuatan kebijakan mulai dari perumusan hingga implementasi (Rachmawaty, 2023). Selain itu, PKn juga mengupas peran berbagai lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan mengartikulasikan kepentingan warga negara. Pemahaman yang solid ini membekali peserta didik dengan kemampuan untuk berpartisipasi politik secara cerdas dan kritis, mampu menganalisis isu-isu politik, mengevaluasi kinerja pemerintah, dan menggunakan hak-hak politiknya secara efektif dan ikut

serta membangun politik yang demokratis (Nurdiansyah & Dewi, 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara berkelanjutan mengembangkan sikap positif terhadap konstitusi dan hukum sebagai pilar utama kehidupan bernegara. Proses ini melibatkan penanaman penghargaan terhadap konstitusi sebagai hukum dasar negara yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta batasan kekuasaan negara. PKn juga menekankan pentingnya supremasi hukum (*rule of law*) sebagai prinsip yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan menjaga ketertiban serta keadilan dalam masyarakat. Sikap positif ini tidak hanya mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan norma-norma yang berlaku, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum dan partisipasi dalam menciptakan budaya hukum yang kuat (Sila, 2024).

(Prasetyo et al., 2023), selanjutnya menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara aktif meningkatkan partisipasi aktif warga negara dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini mencakup dorongan untuk terlibat dalam kegiatan sosial di tingkat lokal (misalnya, gotong royong, kegiatan komunitas), partisipasi dalam proses politik (misalnya, memberikan suara dalam pemilu, menyampaikan aspirasi melalui saluran yang tepat), serta

keterlibatan dalam kegiatan budaya yang memperkaya identitas nasional. Partisipasi aktif ini bukan hanya sekadar tindakan formal, melainkan merupakan wujud tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, PKn tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan motivasi dan keterampilan untuk mendorong keterlibatan yang bertanggung jawab dan cerdas dalam dinamika kehidupan bernegara, yang pada akhirnya memperkuat fondasi demokrasi dan kemajuan bangsa secara keseluruhan (Mansyuri, 2017).

2. Memperkuat Identitas Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan

   Selain membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang sangat signifikan dalam memperkuat identitas nasional dan nilai-nilai kebangsaan sebagai fondasi kokoh bagi persatuan dan kemajuan bangsa (Putri et al., 2022). Upaya penguatan ini diimplementasikan melalui berbagai cara yang saling melengkapi dan bertujuan untuk menanamkan rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

   Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara aktif menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme yang

sehat dan konstruktif (Mansyuri, 2017). Proses ini tidak hanya melibatkan penyampaian informasi tentang keindahan alam Indonesia, kekayaan budaya yang beragam, dan potensi bangsa, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas nasional sebagai bangsa yang besar dengan sejarah perjuangan yang heroik. PKn menggali dan menceritakan sejarah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan, menyoroti nilai-nilai kepahlawanan, semangat persatuan, dan pengorbanan para pendahulu. Pemahaman yang mendalam tentang sejarah ini akan menumbuhkan rasa hormat dan penghargaan terhadap perjuangan bangsa serta memperkuat nasionalisme yang sehat, yaitu rasa cinta tanah air yang tidak chauvinistik, tetapi mendorong persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, PKn membantu peserta didik untuk menginternalisasi identitas nasional sebagai bagian tak terpisahkan dari diri mereka (Mas'ad et al., 2024).

Menurut Yasila & Najicha (2022) PKn memainkan peran krusial dalam memahami dan menghargai keanekaragaman, mengingat Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Materi pembelajaran PKn dirancang untuk mengajarkan pentingnya toleransi sebagai sikap menghormati perbedaan, saling menghormati keyakinan

dan tradisi orang lain, serta mempromosikan hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman. PKn membuka wawasan peserta didik tentang kekayaan budaya setiap daerah, filosofi hidup yang berbeda, dan nilai-nilai unik yang terkandung dalam setiap kelompok masyarakat. Melalui pemahaman ini, diharapkan akan tumbuh kesadaran bahwa keberagaman adalah kekuatan bangsa, bukan sumber perpecahan, dan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama serta berhak untuk dihormati.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara sistematis melestarikan nilai-nilai luhur bangsa yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai fundamental seperti Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, prinsip gotong royong sebagai semangat kebersamaan dan saling membantu, musyawarah mufakat sebagai cara pengambilan keputusan yang demokratis, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa lainnya (seperti sopan santun, kearifan lokal, dan semangat kekeluargaan) dikenalkan, dibahas, dan ditanamkan dalam diri peserta didik (Nasozaro, 2019). PKn tidak hanya menyampaikan definisi nilai-nilai tersebut, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari dan memberikan contoh konkret penerapannya (Ramadhaniar et al., 2020). Dengan demikian, nilai-nilai luhur bangsa ini diharapkan

menjadi landasan moral dan etika dalam setiap tindakan dan interaksi warga negara, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis, adil, dan beradab.

Mutoharoh & Marliyanti (2024) menjelaskan bahwa PKn memiliki fungsi penting dalam memperkuat kesadaran akan sejarah dan perjuangan bangsa. Pemahaman yang mendalam tentang sejarah perjuangan kemerdekaan, pengenalan terhadap tokoh-tokoh pahlawan nasional dan daerah, serta pemahaman akan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah bangsa (seperti Proklamasi Kemerdekaan, Sumpah Pemuda, dan berbagai peristiwa penting lainnya), menumbuhkan rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diraih dengan pengorbanan besar.

Lebih lanjut, pemahaman ini juga menanamkan tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Dengan memahami akar sejarah bangsa, generasi muda diharapkan memiliki perspektif yang lebih luas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi bangsa serta termotivasi untuk berkontribusi positif dalam pembangunan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara holistik berupaya untuk memperkuat identitas nasional sebagai perekat bangsa dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan sebagai kompas moral dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Dengan identitas nasional yang kuat dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang mendalam, diharapkan setiap warga negara Indonesia memiliki rasa cinta, bangga, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya, serta mampu berkontribusi aktif dalam mewujudkan cita-cita luhur bangsa.

3. Sarana Pengembangan Kemampuan Intelektual dan Kritis

   Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak hanya berfungsi dalam pembentukan karakter dan penguatan identitas nasional, tetapi juga berperan penting sebagai sarana pengembangan kemampuan intelektual dan kritis warga negara yang berupa perkembangan individu, pembangunan bangsa dan ekonomi, penghormatan pada nilai-nilai kesetaraan, demokrasi, dan hak asasi manusia (Grossman et al., 2008). Pengembangan aspek ini bertujuan untuk menghasilkan individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban, tetapi juga mampu berpikir secara mandiri, menganalisis informasi secara mendalam, dan berkontribusi secara konstruktif dalam memecahkan permasalahan bangsa (Sutrisno, 2023).

   Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara sistematis meningkatkan pengetahuan tentang kewarganegaraan melalui penyediaan landasan pengetahuan yang komprehensif yang berfokus pada pembentukan nilai-nilai moral karakter bangsa. Ini mencakup pemahaman

mendasar tentang konsep-konsep kewarganegaraan seperti status warga negara, hak dan kewajiban, kedaulatan, dan negara hukum. Lebih lanjut, PKn juga mengenalkan sistem politik yang berlaku, termasuk ideologi negara, bentuk pemerintahan, mekanisme pemilu, dan peran partai politik. Pemahaman tentang hukum sebagai sistem norma-norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk hierarki peraturan perundang-undangan dan lembaga penegak hukum, juga menjadi bagian integral. Selain itu, PKn membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara secara spesifik, serta isu-isu sosial dan politik kontemporer yang relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti isu korupsi, HAM, globalisasi, dan lingkungan hidup. Landasan pengetahuan yang kuat ini menjadi modal awal bagi pengembangan kemampuan intelektual dan kritis guna mewujudkan tujuan nasional yang bersumberkan tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia (Giwangsa, 2018).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara aktif mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Proses ini melibatkan pelatihan untuk menganalisis informasi secara objektif, tidak mudah terpengaruh oleh prasangka atau emosi subjektif. PKn juga melatih kemampuan untuk mengidentifikasi bias atau sudut pandang tertentu yang mungkin mempengaruhi penyajian

informasi. Kemampuan mengevaluasi argumen secara logis dan berdasarkan bukti, serta kemampuan untuk merumuskan pendapat yang rasional dan bertanggung jawab terhadap isu-isu kewarganegaraan menjadi fokus utama. Melalui diskusi, debat, dan analisis kasus, peserta didik didorong untuk mempertanyakan asumsi, mencari berbagai perspektif, dan membangun argumentasi yang kuat berdasarkan fakta dan logika. Kemampuan berpikir kritis ini memungkinkan warga negara untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga mampu menyeleksi, mengevaluasi, dan meresponsnya secara cerdas. Pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks ini harus mengembangkan kemampuan berfikir secara kritis dan lebih tinggi HOTS (Higher Order Thinking Skills) (Sutrisno, 2023).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara metodologis memiliki empat komponen dasar dalam berfikir kritis dan pemecahan masalah yakni "Reason Effectively, Use Systems Thinking, Make Judgments and Decisions, Solve Problems" (Trilling, & Fadel, 2010). Metodologi tersebut mendorong kemampuan problem solving peserta didik. Melalui penggunaan studi kasus yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peserta didik diajak untuk mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisis dampaknya, dan mencari berbagai alternatif solusi. Diskusi

kelompok memberikan kesempatan untuk bertukar ide, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan berkolaborasi dalam merumuskan solusi. Simulasi peran dalam situasi-situasi sosial dan politik memungkinkan peserta didik untuk mempraktikkan kemampuan mengambil keputusan dan menyelesaikan konflik secara efektif dan etis. Proses ini melatih peserta didik untuk tidak hanya mengenali masalah, tetapi juga memiliki kemampuan analitis dan kreatif dalam mencari solusi yang efektif dan etis, yang mempertimbangkan berbagai aspek dan konsekuensi. Berfikir kritis dipandang sebagai suatu hal esensial dalam mengatasi sikap egosentris dan sosio sentris bawaan (Paul & Elder, 2008).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi kewarganegaraan peserta didik terutama jika melibatkan penggunaan teknologi seperti multimedia interaktif, simulasi digital, pembelajaran online, dan media sosial sehingga membuat pembelajaran lebih personal, adaptif, dan berbasis data. Pendekatan mencakup kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Peserta didik dilatih untuk mengakses, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi dari berbagai sumber, termasuk platform digital, media masa (cetak, elektronik, online), dokumen hukum

(undang-undang, peraturan pemerintah), dan sumber-sumber informasi lainnya yang kredibel (Shefira et al., 2024). Literasi kewarganegaraan yang tinggi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara informatif dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan publik (Hernawan & Maulana, 2022).

Dengan demikian, PKn sebagai sarana pengembangan kemampuan intelektual dan kritis membekali warga negara dengan perangkat kognitif yang esensial untuk memahami kompleksitas kehidupan berbangsa dan bernegara, menganalisis isu-isu secara mendalam, merumuskan solusi yang konstruktif, dan berpartisipasi secara cerdas dalam proses demokrasi. Pengembangan kemampuan ini menjadi investasi penting dalam menciptakan warga negara yang tidak hanya patuh, tetapi juga proaktif dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa.

4. Wahana Partisipasi dan Tanggung Jawab Kewarganegaraan

   Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki fungsi vital sebagai wahana partisipasi dan tanggung jawab kewarganegaraan, yang secara aktif mendorong individu untuk tidak hanya menjadi penonton dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi juga menjadi agen perubahan yang terlibat secara konstruktif dan bertanggung jawab. Fungsi ini diwujudkan melalui

berbagai upaya yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, motivasi, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara efektif (Ratnaningsih, 2018).

Masango (2002) menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara aktif mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat di tingkat terdekat dengan individu, yaitu lingkungan dimana mereka tinggal. Partisipasi masyarakat dapat membantu memperkuat ikatan sosial dan kohesi masyarakat, serta kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Motivasi ini ditumbuhkan melalui penanaman kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan sosial, seperti gotong royong yang memperkuat solidaritas dan kebersamaan, partisipasi dalam organisasi kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi dan kepentingan bersama, serta keterlibatan dalam upaya pelestarian lingkungan sebagai wujud tanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tidak hanya mengenalkan konsep-konsep ini, tetapi juga memberikan contoh konkret dan mendorong inisiatif peserta didik untuk berkontribusi secara nyata di lingkungan sekitarnya. Keterlibatan aktif di tingkat masyarakat menjadi fondasi penting bagi partisipasi yang lebih luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara khusus mempersiapkan peserta didik untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dilakukan dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme partisipasi politik, seperti pentingnya dan tatacara pelaksanaan pemilihan umum sebagai sarana menyalurkan suara dan menentukan arah kebijakan negara, serta berbagai tatacara menyampaikan aspirasi secara konstitusional melalui perwakilan rakyat, organisasi masyarakat, atau media masa. Lebih dari sekadar pemahaman, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara aktif mendorong peserta didik untuk menggunakan hak mereka sebagai warga negara (seperti hak memilih, hak menyampaikan pendapat, hak berkumpul) dan melaksanakan kewajiban mereka (seperti membayar pajak, menghormati hukum, berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban) secara bertanggung jawab. Penekanan pada tanggung jawab ini memastikan bahwa partisipasi yang dilakukan didasari oleh kesadaran akan dampak tindakan terhadap kepentingan bersama dan keberlangsungan negara (Istianah & Mazid, 2023).

Menurut Isnainiatin & Setyowati (2023), Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara fundamental menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab sosial pada lingkungan. Kesadaran ini mencakup pemahaman

pentingnya menjaga lingkungan hidup sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang dan tanggung jawab setiap individu untuk berkontribusi dalam upaya pelestariannya. Sementara kesadaran atas tanggung jawab sosial membentuk warga negara yang peduli, solider, dan memiliki komitmen terhadap kebaikan bersama. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diarahkan untuk menanamkan kesadaran pentingnya menghormati hak-hak orang lain tanpa diskriminasi, serta mendorong kontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, baik melalui tindakan nyata maupun melalui dukungan terhadap kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik (Permana, 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) secara metodologis mengembangkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi yang esensial untuk partisipasi yang efektif. Melalui kegiatan kelompok dalam proses pembelajaran, peserta didik dilatih untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama, berbagi tugas dan tanggung jawab, serta menghargai kontribusi setiap anggota. Diskusi dalam berbagai topik kewarganegaraan melatih kemampuan untuk menghargai perbedaan pendapat, mendengarkan secara aktif, menyampaikan argumen secara konstruktif, dan mencapai pemahaman bersama. Selain itu, PKn juga melatih kemampuan untuk mengkomunikasikan ide-ide mereka

secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, kepada berbagai pihak. Keterampilan kolaborasi dan komunikasi ini membekali warga negara dengan kemampuan untuk berinteraksi secara produktif dalam berbagai forum partisipasi dan berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan publik (Rachmawaty, 2023).

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai wahana partisipasi dan tanggung jawab kewarganegaraan secara komprehensif membekali individu dengan motivasi, pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Fungsi ini memastikan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya menghasilkan warga negara yang tahu hak dan kewajibannya, tetapi juga warga negara yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk berpartisipasi secara nyata dalam mewujudkan cita-cita bangsa (Prasetyo et al., 2023).

4.3 Implementasi Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembelajaran

Implementasi yang efektif dari tujuan dan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam proses pembelajaran memerlukan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, serta

mempertimbangkan berbagai aspek pedagogis dan sumber daya yang tersedia. Agar PKn dapat mencapai sasarannya secara optimal, ada beberapa hal krusial perlu diperhatikan dan diimplementasikan secara mendalam:

1. Menurut (Fitriani, 2022), pendekatan pembelajaran aktif dan partisipatif, yang menghubungkan materi PKn dengan konteks kehidupan nyata (pendekatan kontekstual), sangat penting agar pembelajaran menarik dan bermakna. Beberapa metode yang efektif dan memungkinkan untuk dimplemetasikan meliputi diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, proyek kewarganegaraan, dan kunjungan lapangan (Ramdani et al., 2023).
2. Menurut Siswandi et al. (2024) pengintegrasian nilai dalam kurikulum penting untuk menanamkan nilai kewarganegaraan secara holistik. Ini membantu siswa mengembangkan perspektif global, berpikir kritis, memecahkan masalah, dan pembelajaran sosial melalui berbagai mata pelajaran (contoh: nilai kepahlawanan dalam sejarah, komunikasi santun dalam bahasa) serta kegiatan sekolah (ekstrakurikuler, upacara, kegiatan sosial). Integrasi ini memastikan nilai kewarganegaraan tidak hanya teoritis, tetapi terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari siswa.
3. Adanya peran guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai fasilitator dan model, dimana ini sangat signifikan dalam pembelajaran efektif. Guru memandu, memicu diskusi,

memberi umpan balik, dan membantu siswa memahami. Lebih penting lagi, guru harus menjadi contoh warga negara yang baik melalui sikap demokratis, menghargai perbedaan, bertanggung jawab, dan peduli sosial, sehingga nilai kewarganegaraan terinternalisasi lebih mendalam pada siswaal yang memberikan dampak yang lebih mendalam bagi pembentukan karakter peserta didik (Samsudin, 2021).

4. Penggunaan sumber belajar yang variatif sangat penting untuk memperkaya pemahaman konsep dan isu kewarganegaraan. Selain buku teks, guru PKn perlu memanfaatkan artikel media massa, berita aktual, film dokumenter, dan media sosial secara bijak. Guru harus kreatif memilih dan mengolah sumber yang menarik, relevan, dan menyajikan berbagai perspektif. Seorang guru yang kreatif membutuhkan pembelajaran yang dapat meningkatkan dan mengembangkan potensinya sehingga pada akhirnya mereka dapat meningkatkan produktivitasnya (Samsinar, 2019).
5. Menurut Nurhasnah et al. (2023) dan Barokah et al. (2025), evaluasi penting dalam pembelajaran PKn untuk mengukur keberhasilan tujuan, efektivitas metode, dan meningkatkan mutu berkelanjutan. Evaluasi tidak hanya menilai kognitif (pengetahuan), tetapi juga afektif (sikap: toleransi, tanggung jawab, cinta tanah air) dan psikomotorik (keterampilan partisipasi: diskusi, kerjasama, menyampaikan pendapat). Metode evaluasi yang beragam, seperti observasi perilaku,

penilaian proyek, portofolio, dan refleksi diri, dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang perkembangan peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Nurhasnah et al., 2023).

Dengan implementasi yang cermat dan terintegrasi dari kelima aspek ini, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) akan menjadi lebih efektif dalam membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, serta mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4.4 Kesimpulan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) hadir dengan tujuan mulia, yaitu membentuk warga negara yang tidak hanya demokratis dan bertanggung jawab, tetapi juga memiliki identitas nasional yang kokoh, menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sendiri mencakup pembentukan karakter yang kuat, pengembangan kemampuan berpikir intelektual dan kritis, serta menumbuhkan dorongan untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab sebagai warga negara.

BAB V
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI INDONESIA

5.1 Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia memiliki sejarah panjang yang mencerminkan dinamika sosial, politik, dan ideologi bangsa. Perjalanan PKn dimulai pada masa penjajahan Belanda, di mana pendidikan bersifat diskriminatif dan tidak mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan Indonesia. Kurikulum saat itu lebih fokus pada kepentingan kolonial dan tidak memberikan ruang bagi pembentukan identitas nasional. Baru pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), pendidikan mulai diarahkan untuk menanamkan nilai kesetiaan kepada Jepang. Meskipun demikian, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan membuka peluang bagi kebangkitan rasa kebangsaan.

Setelah Indonesia merdeka, pendidikan diarahkan untuk membangun rasa cinta tanah air dan persatuan. Pada tahun 1947, kurikulum "Rencana Pelajaran 1947" diperkenalkan, yang menekankan pada pendidikan moral dan kewarganegaraan dengan dasar Pancasila. Pada 1957, mulai diperkenalkan mata pelajaran

Civics sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter bangsa. Buku pedoman Civics atau Kewarganegaraan yang berisi materi tentang hak dan kewajiban warga negara menjadi acuan dalam pembelajaran PKn.

Masa Orde Baru (1966–1998) membawa perubahan signifikan dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) menjadi mata pelajaran wajib yang diajarkan dari SD hingga perguruan tinggi. Tujuan utamanya adalah menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Namun, PMP sering kali dianggap sebagai alat indoktrinasi politik untuk mendukung kekuasaan rezim. Ketetapan MPR No. 11/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) menjadi landasan dalam pelaksanaan PMP, meskipun penerapannya menuai kritik karena dianggap tidak memberikan ruang bagi pengembangan pemikiran kritis.

Era Reformasi (1998–sekarang) membawa angin perubahan dalam pendidikan kewarganegaraan. Setelah jatuhnya Orde Baru, PMP diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Kurikulum reformasi menekankan pada nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi aktif warga negara. Kurikulum 2006 (KTSP) dan Kurikulum 2013 menempatkan PKn sebagai sarana pembentukan karakter bangsa, dengan pendekatan lebih kritis dan dialogis. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan pengetahuan tentang negara, tetapi juga membekali siswa dengan

keterampilan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada tahun 2013, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013. Kurikulum ini mengintegrasikan pendidikan kewarganegaraan ke dalam semua mata pelajaran. Selain itu, pada tahun 2017, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pendidikan Karakter. Pendidikan karakter mencakup pendidikan kewarganegaraan, moral, agama, etika, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik.

Revitalisasi nilai kewarganegaraan semakin penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi. Pendidikan kewarganegaraan kini tidak hanya berfokus pada nilai-nilai nasional, tetapi juga pada isu global, seperti keberlanjutan, pluralisme, dan kewarganegaraan digital. Kurikulum Merdeka (2022) mendorong pendekatan yang lebih fleksibel dan relevan terhadap pendidikan karakter dan kewarganegaraan. Dalam kurikulum ini, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah, tetapi juga diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran lainnya.

Perubahan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan mencerminkan upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan

zaman dan kebutuhan masyarakat. Namun, perubahan tersebut juga menimbulkan tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah kesenjangan antara kebijakan kurikulum dan praktik di lapangan. Beberapa sekolah masih kesulitan dalam menerapkan kurikulum yang baru, baik karena keterbatasan sumber daya maupun kurangnya pemahaman tentang konsep pendidikan kewarganegaraan yang diinginkan.

Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana mengembangkan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif dan psikomotorik. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu membekali peserta didik dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dalam pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan.

Dalam konteks perguruan tinggi, pendidikan kewarganegaraan juga mengalami perkembangan. Pada tahun 1960-an, terdapat mata kuliah Manipol-USDEK dan Pancasila yang bertujuan untuk membentuk manusia yang susila dan demokratis. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, muncul mata kuliah Filsafat Pancasila yang memiliki kedudukan penting dalam pembentukan kepribadian manusia Indonesia. Pada tahun 1989 hingga 1990-an, diperkenalkan mata kuliah Pendidikan Kewiraan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sejak tahun 2000-an hingga sekarang, mata kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan di perguruan tinggi lebih berfokus pada pengembangan kepribadian mahasiswa dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Peran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sangat penting dalam membentuk karakter mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan yang berkualitas.

Dalam menghadapi era digital, pendidikan kewarganegaraan juga harus mampu mengajarkan literasi digital kepada peserta didik. Literasi digital menjadi penting agar peserta didik dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga harus mampu mengajarkan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan keberagaman dalam masyarakat yang majemuk.

Pendidikan kewarganegaraan juga harus mampu membekali peserta didik dengan keterampilan untuk menghadapi tantangan global. Salah satunya adalah dengan mengajarkan nilai-nilai keberlanjutan dan kesadaran lingkungan. Hal ini penting agar peserta didik memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan dapat berkontribusi dalam menjaga kelestariannya.

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga harus mampu membekali peserta didik dengan keterampilan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah dengan mengajarkan keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Keterampilan ini penting agar peserta didik dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Dalam konteks globalisasi, pendidikan kewarganegaraan juga harus mampu mengajarkan nilai-nilai internasionalisme dan kerja sama antarbangsa. Hal ini penting agar peserta didik memiliki wawasan global dan mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks.

Pendidikan kewarganegaraan juga harus mampu membekali peserta didik dengan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dalam pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan.

Dalam menghadapi tantangan zaman, pendidikan kewarganegaraan harus mampu beradaptasi dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan pengembangan kurikulum secara berkala agar pendidikan kewarganegaraan tetap relevan dan berkualitas.

Peran serta masyarakat juga sangat penting dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Masyarakat harus terlibat aktif dalam proses pendidikan agar nilai-nilai kewarganegaraan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, masyarakat juga harus mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa dan negara. Melalui pendidikan kewarganegaraan, diharapkan dapat lahir warga negara yang memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan kewarganegaraan harus menjadi prioritas dalam sistem pendidikan nasional.

5.2 Nilai-nilai dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu pilar penting dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa. Tujuannya tidak hanya untuk menciptakan warga negara yang cerdas secara intelektual, tetapi juga yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah nilai penting yang terkandung dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang membentuk pribadi warga negara yang demokratis, berkeadilan, dan beradab.

Nilai pertama yang sangat fundamental adalah nilai nasionalisme. Pendidikan Kewarganegaraan menanamkan semangat cinta tanah air, kebanggaan terhadap bangsa dan negara, serta kesediaan untuk membela dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nasionalisme yang dimaksud

tidak bersifat sempit atau chauvinistik, melainkan nasionalisme yang terbuka, toleran, dan menghormati keberagaman.

Nilai kedua adalah demokrasi, yang berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam proses pengambilan keputusan politik. Demokrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan melalui pemahaman tentang partisipasi aktif dalam pemilu, menghargai perbedaan pendapat, serta menjunjung tinggi prinsip musyawarah untuk mufakat. Nilai ini penting untuk membentuk generasi muda yang kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis.

Selain itu, nilai hak asasi manusia (HAM) juga menjadi landasan utama dalam PKn. Pembelajaran HAM melatih peserta didik untuk memahami, menghormati, dan memperjuangkan hak-haknya sendiri dan orang lain. Ini termasuk kesadaran akan pentingnya keadilan, anti diskriminasi, serta penghormatan terhadap martabat manusia dalam segala aspek kehidupan sosial.

Pendidikan Kewarganegaraan juga sarat dengan nilai toleransi dan pluralisme. Indonesia yang multikultural menuntut warganya untuk mampu hidup berdampingan dengan damai dalam perbedaan. Nilai ini membentuk pribadi warga negara yang mampu menghargai keragaman budaya, agama, suku, dan bahasa, serta menolak segala bentuk radikalisme dan intoleransi.

Nilai keadilan sosial menjadi esensi dari tujuan akhir Pendidikan Kewarganegaraan. Keadilan sosial tidak hanya berarti pemerataan ekonomi, tetapi juga keadilan dalam memperoleh hak-

hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Pendidikan kewarganegaraan mengarahkan peserta didik untuk peka terhadap ketimpangan sosial dan mendorong peran aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil.

Nilai kebebasan yang bertanggung jawab juga ditekankan dalam PKn. Kebebasan individu bukan berarti kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang tidak merugikan hak orang lain. Warga negara diajarkan untuk mengekspresikan pendapat secara bebas, namun tetap dalam koridor hukum dan norma yang berlaku. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan mengandung pula nilai kepedulian dan partisipasi aktif. Warga negara ideal tidak hanya menjadi penonton dalam kehidupan politik dan sosial, tetapi harus terlibat aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti gotong royong, pemilu, atau advokasi publik. Kepedulian ini mendorong tumbuhnya semangat solidaritas dan tanggung jawab sosial di antara sesama warga negara.

Nilai integritas dan kejujuran menjadi bagian tak terpisahkan dalam pembentukan karakter warga negara. Dalam konteks berbangsa, integritas adalah komitmen untuk menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, dan moralitas, bahkan ketika tidak diawasi. Nilai ini sangat penting dalam membentuk budaya anti korupsi dan pemerintahan yang bersih.

Dalam Pendidikan Kewarganegaraan juga tertanam nilai ketertiban dan ketaatan hukum. Setiap warga negara harus menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Nilai ini mendorong terciptanya kehidupan sosial yang aman, damai, dan tertib. Masyarakat yang sadar hukum akan cenderung menyelesaikan konflik melalui jalur legal dan menghindari kekerasan.

Nilai persatuan dan kesatuan juga menjadi dasar dalam membangun identitas kebangsaan. PKn mengajarkan pentingnya menjaga keharmonisan dan persaudaraan di tengah perbedaan. Nilai ini mengakar kuat dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang menegaskan bahwa perbedaan bukanlah pemecah, melainkan kekuatan untuk membentuk bangsa yang solid.

Terakhir, Pendidikan Kewarganegaraan mengandung nilai kewarganegaraan aktif (*active citizenship*) yang mendorong warga negara untuk selalu berkontribusi dalam pengambilan keputusan publik dan pembangunan nasional. Warga negara yang aktif tidak hanya patuh terhadap peraturan, tetapi juga mampu menyuarakan aspirasi, menuntut akuntabilitas pemerintah, serta berperan dalam proses perubahan sosial secara damai dan konstitusional.

Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, peserta didik diharapkan menjadi warga negara yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat, berjiwa sosial, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Pendidikan Kewarganegaraan pada akhirnya bukan

sekadar mata pelajaran, melainkan wahana strategis untuk membentuk peradaban dan demokrasi yang berkeadilan di Indonesia.

5.3 Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Lembaga Pendidikan

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, dan memiliki rasa cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif mengenai pengetahuan kewarganegaraan semata, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotorik, seperti sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, keadilan, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaannya sangat vital sebagai sarana pembentukan identitas nasional dalam konteks keberagaman masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan PKn di lembaga pendidikan mulai dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi mengacu pada kurikulum yang telah dirancang oleh pemerintah. Dalam Kurikulum Merdeka maupun kurikulum sebelumnya, PKn diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, memperkuat rasa kebangsaan, dan mengembangkan keterampilan sosial-politik peserta didik. Guru sebagai pelaksana kurikulum memegang peran penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai kewarganegaraan melalui pembelajaran yang kontekstual, dialogis, dan partisipatif.

Di tingkat sekolah dasar, implementasi PKn diarahkan pada pengenalan simbol-simbol negara, aturan sosial sederhana, serta nilai-nilai dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Pendidikan ini masih bersifat konkret dan menggunakan pendekatan tematik yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif anak. Melalui cerita, lagu, dan permainan edukatif, siswa belajar mengenali identitas bangsa serta peran mereka dalam kehidupan sosial.

Pada jenjang sekolah menengah, baik pertama maupun atas, materi PKn mulai berkembang ke arah yang lebih abstrak dan analitis. Siswa diajak untuk memahami sistem pemerintahan, konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip demokrasi. Di sinilah pembelajaran mulai melibatkan analisis isu-isu aktual seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan radikalisme, sehingga menumbuhkan pemikiran kritis dan kesadaran hukum di kalangan remaja.

Pembelajaran PKn pada level pendidikan tinggi lebih kompleks dan menuntut pemahaman multidisipliner. Mahasiswa tidak hanya diajak memahami teori-teori kewarganegaraan, tetapi juga menganalisis persoalan politik, hukum, dan sosial dengan pendekatan ilmiah. Implementasi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi menekankan pada peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial yang berpikir kritis, bersikap etis, dan bertindak aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Metode pembelajaran yang digunakan dalam PKn sangat beragam, mulai dari ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, hingga proyek sosial. Pendekatan ini penting agar siswa tidak hanya pasif menerima informasi, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan nyata. Kegiatan seperti simulasi sidang, debat, dan pengabdian masyarakat menjadi sarana untuk memperkuat keterampilan kewarganegaraan secara praktis.

Selain melalui pembelajaran formal di kelas, implementasi PKn juga didukung oleh kegiatan ekstrakurikuler yang mengembangkan nilai-nilai kebangsaan. Pramuka, organisasi siswa intra sekolah (OSIS), palang merah remaja (PMR), dan kegiatan sosial lainnya menjadi wahana bagi siswa untuk belajar bekerja sama, memimpin, dan mengelola konflik secara konstruktif dalam kerangka nilai Pancasila.

Tantangan dalam implementasi PKn tidak sedikit. Kurangnya pemahaman guru terhadap filosofi PKn, terbatasnya sumber belajar yang kontekstual, dan rendahnya minat siswa menjadi hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, pelatihan guru, pengembangan bahan ajar berbasis lokal, serta inovasi metode pembelajaran sangat diperlukan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan PKn di lembaga pendidikan.

Dalam konteks globalisasi, pendidikan kewarganegaraan harus mampu membekali peserta didik dengan kompetensi global citizenship, yakni kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang

multikultural dan saling terhubung secara digital. Hal ini mencakup penghargaan terhadap perbedaan, pemahaman tentang hak asasi manusia universal, dan komitmen terhadap perdamaian dunia. Dengan demikian, PKn harus adaptif terhadap dinamika zaman tanpa kehilangan akar identitas nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan juga menjadi instrumen penting dalam menangkal paham radikal, intoleran, dan disintegratif. Melalui penanaman nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, peserta didik dibimbing untuk menjadi warga negara yang cinta damai, menjunjung tinggi perbedaan, serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Ini menjadi tugas utama lembaga pendidikan dalam memperkuat ketahanan ideologis bangsa.

Keberhasilan implementasi PKn juga sangat ditentukan oleh sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah perlu didukung oleh keteladanan di rumah dan lingkungan sosial. Ketika nilai-nilai kewarganegaraan dihidupi secara konsisten dalam keseharian, maka akan tumbuh generasi muda yang berintegritas, mandiri, dan cinta tanah air.

Dengan demikian, implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di lembaga pendidikan bukan sekadar transmisi pengetahuan tentang negara, tetapi merupakan proses panjang pembentukan warga negara yang aktif, partisipatif, dan berakhlak mulia. Proses ini memerlukan dukungan kebijakan yang progresif, sumber daya yang memadai, serta komitmen seluruh elemen bangsa dalam

menanamkan nilai-nilai kebangsaan secara holistik dan berkelanjutan.

BAB VI
IDENTITAS DAN INTEGRASI NASIONAL

6.1 Konsep Dasar Identitas Nasional

Identitas nasional merupakan konsep yang merujuk pada ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Ia menjadi simbol jati diri kolektif yang mencakup nilai-nilai, norma, keyakinan, budaya, dan sejarah yang dianut bersama oleh warga suatu negara. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional terbentuk dari proses sejarah panjang yang melibatkan perjuangan melawan penjajahan, keberagaman budaya, serta kesepakatan bersama dalam membentuk negara bangsa yang berlandaskan Pancasila. Identitas nasional bukan hanya sekadar lambang atau atribut formal seperti bendera dan lagu kebangsaan, tetapi lebih dalam, mencerminkan sikap mental, semangat persatuan, serta kesadaran akan keberagaman yang disatukan oleh semangat kebangsaan.

Identitas nasional memiliki peran yang sangat penting dalam membangun integrasi dan kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, identitas nasional berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan berbagai kelompok etnis, budaya, bahasa, dan agama. Ia menjadi landasan dalam menciptakan rasa memiliki terhadap negara, membangun

kesetiaan warga negara terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan menciptakan solidaritas sosial. Tanpa identitas nasional yang kuat, bangsa akan mudah terpecah karena sentimen kesukuan atau kedaerahan yang sempit, yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan disintegrasi.

Pembentukan identitas nasional tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses historis, sosial, dan politik yang kompleks. Dalam kasus Indonesia, perjuangan melawan penjajahan menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk kesadaran nasional. Sejak awal abad ke-20, muncul berbagai organisasi pergerakan nasional yang membawa ide persatuan dan kemerdekaan. Peristiwa penting seperti Sumpah Pemuda tahun 1928 menandai titik balik pembentukan identitas nasional Indonesia. Dalam peristiwa tersebut, para pemuda dari berbagai daerah menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yang kemudian menjadi dasar identitas kebangsaan yang kita kenal saat ini.

Selain itu, identitas nasional juga dibentuk oleh unsur-unsur kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa persatuan, memainkan peran utama dalam membentuk komunikasi lintas budaya dan memperkuat kesadaran kolektif sebagai satu bangsa. Di samping itu, simbol-simbol negara seperti lambang Garuda Pancasila, lagu kebangsaan “Indonesia Raya,” dan bendera Merah Putih, berfungsi sebagai pemersatu sekaligus pengingat akan jati diri bangsa. Pendidikan dan media

massa juga menjadi instrumen penting dalam menanamkan dan mereproduksi nilai-nilai identitas nasional kepada generasi muda.

Pancasila, sebagai ideologi negara dan dasar negara Republik Indonesia, memiliki posisi sentral dalam membentuk dan memelihara identitas nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial mencerminkan semangat kebangsaan yang inklusif dan toleran. Pancasila bukan hanya dokumen politik, melainkan pandangan hidup yang mengikat seluruh elemen masyarakat tanpa membedakan latar belakang etnis, agama, dan budaya. Dengan demikian, Pancasila menjadi fondasi utama dalam merumuskan identitas nasional Indonesia yang pluralistik namun tetap satu.

Dalam perkembangannya, identitas nasional tidak bersifat statis melainkan dinamis. Ia senantiasa mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman. Globalisasi, misalnya, membawa pengaruh besar terhadap identitas nasional. Di satu sisi, globalisasi membuka akses terhadap informasi dan budaya dunia, namun di sisi lain juga dapat mengikis nilai-nilai lokal dan nasional jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk terus memperkuat identitas nasional melalui pendidikan karakter, penguatan budaya lokal, dan pembentukan kesadaran kebangsaan.

Tantangan dalam menjaga identitas nasional juga datang dari dalam negeri, seperti meningkatnya politik identitas, intoleransi,

dan radikalisme. Fenomena ini jika tidak diantisipasi dapat menggerus rasa kebersamaan dan menimbulkan konflik antar kelompok masyarakat. Untuk itu, penting bagi semua elemen bangsa untuk kembali merefleksikan nilai-nilai dasar yang menjadi pemersatu, serta menanamkan semangat kebangsaan sejak dini melalui pendidikan formal maupun informal. Sekolah dan keluarga memegang peran penting dalam membentuk karakter nasional anak-anak bangsa.

Selain aspek sosial dan budaya, identitas nasional juga berkaitan erat dengan legitimasi politik dan kedaulatan negara. Negara yang memiliki identitas nasional yang kuat cenderung lebih stabil secara politik dan lebih disegani dalam pergaulan internasional. Identitas nasional menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang berdaulat serta memperkuat posisi bangsa dalam menghadapi kompetisi global. Dalam hal ini, diplomasi kebudayaan menjadi salah satu strategi yang bisa digunakan untuk memperkenalkan identitas nasional Indonesia kepada dunia.

Penting untuk dipahami bahwa identitas nasional tidak berarti meniadakan identitas lokal atau kultural. Justru, kekayaan budaya lokal merupakan bagian integral dari identitas nasional Indonesia. Dalam kerangka “Bhinneka Tunggal Ika,” keberagaman dipandang sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Oleh karena itu, pelestarian budaya lokal harus dilakukan bersamaan dengan upaya memperkuat identitas nasional. Hal ini menegaskan bahwa menjadi

Indonesia berarti juga mengakui dan menghargai identitas kedaerahan sebagai bagian dari mozaik kebangsaan.

Di tengah arus perubahan sosial dan kemajuan teknologi, identitas nasional tetap harus dijaga dan dikembangkan. Penggunaan media sosial yang massif, misalnya, perlu diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai nasionalisme dan semangat kebangsaan. Pemerintah dan masyarakat sipil dapat bersinergi dalam menciptakan konten-konten digital yang edukatif dan membangun, yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya menjadi konsumen budaya global, tetapi juga menjadi agen pelestari identitas nasional.

Sebagai kesimpulan, identitas nasional adalah pondasi utama dalam membentuk keutuhan dan kekuatan bangsa Indonesia. Ia terbentuk dari sejarah, budaya, bahasa, serta nilai-nilai yang hidup dan dianut oleh masyarakat. Di tengah tantangan globalisasi dan keberagaman yang kompleks, identitas nasional harus terus diperkuat melalui pendidikan, penguatan budaya lokal, serta partisipasi aktif warga negara. Hanya dengan identitas nasional yang kokoh, Indonesia dapat terus bertahan dan berkembang sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat.

6.2 Konsep Integrasi Nasional

Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial, budaya, dan politik dalam suatu negara untuk membentuk identitas nasional yang kuat dan menjaga keutuhan

wilayah. Di Indonesia, integrasi nasional menjadi hal yang sangat penting karena negara ini dikenal dengan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan (SARA). Proses integrasi nasional tidak hanya mencakup aspek politik dan sosial, tetapi juga ekonomi dan budaya.

Salah satu konsep dasar dalam integrasi nasional adalah adanya kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kesadaran ini dapat ditumbuhkan melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan penghargaan terhadap keberagaman. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan juga memainkan peran penting dalam memperkuat integrasi nasional. Bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi yang efektif antarwarga negara dari berbagai latar belakang budaya dan suku.

Selain aspek pendidikan dan bahasa, budaya juga merupakan elemen penting dalam integrasi nasional. Budaya gotong royong, misalnya, merupakan tradisi yang telah lama ada dalam masyarakat Indonesia dan dapat memperkuat rasa kebersamaan. Melalui gotong royong, masyarakat diajarkan untuk saling membantu dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Selain itu, akulturasi dan asimilasi budaya juga dapat menjadi sarana untuk menyatukan berbagai budaya lokal menjadi satu identitas budaya nasional.

Namun, proses integrasi nasional tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti ketimpangan sosial dan ekonomi antarwilayah, konflik antar kelompok etnis dan agama, serta politik identitas

dapat menghambat tercapainya integrasi nasional. Ketimpangan pembangunan antar daerah, misalnya, dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan memperburuk hubungan antar kelompok. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan dan kebijakan yang inklusif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam memperkuat integrasi nasional. Melalui kebijakan yang adil dan merata, pemerintah dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi tercapainya integrasi nasional. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Media massa juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberagaman. Media dapat menjadi alat untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antar kelompok. Namun, media juga harus berhati-hati agar tidak menyebarkan informasi yang dapat memicu konflik dan perpecahan.

Dalam era globalisasi dan digitalisasi, tantangan terhadap integrasi nasional semakin kompleks. Pengaruh budaya asing, arus informasi yang cepat, dan perbedaan ideologi dapat mempengaruhi kohesi sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi media dan pemahaman yang baik tentang nilai-

nilai kebangsaan agar tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak integrasi nasional.

Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan integrasi nasional. Melalui pendidikan kewarganegaraan, generasi muda diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, pentingnya persatuan dan kesatuan, serta cara menyikapi perbedaan dengan bijak. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk karakter bangsa yang toleran, inklusif, dan cinta tanah air.

Dalam konteks internasional, integrasi nasional juga berperan dalam memperkuat posisi bangsa di kancah global. Bangsa yang terintegrasi dengan baik akan memiliki stabilitas politik dan sosial yang tinggi, sehingga dapat berperan aktif dalam berbagai forum internasional. Selain itu, integrasi nasional juga dapat meningkatkan daya saing bangsa dalam bidang ekonomi, teknologi, dan budaya.

Secara keseluruhan, integrasi nasional merupakan proses yang dinamis dan memerlukan upaya bersama dari seluruh elemen bangsa. Dengan komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan, penghargaan terhadap keberagaman, dan kebijakan yang inklusif, integrasi nasional dapat terwujud dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.3 Hubungan antara Identitas Nasional dan Integrasi Nasional

Identitas nasional dan integrasi nasional merupakan dua konsep penting yang saling berkaitan erat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Identitas nasional merujuk pada ciri khas, nilai, simbol, dan kesadaran bersama yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang membedakannya dari bangsa lain. Sementara itu, integrasi nasional adalah proses menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat ke dalam satu kesatuan politik dan sosial yang stabil dan harmonis. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan dalam pembentukan dan pemeliharaan keutuhan suatu negara, khususnya di negara yang majemuk seperti Indonesia.

Identitas nasional merupakan fondasi utama yang mendukung terbentuknya integrasi nasional. Ketika warga negara memiliki kesamaan pandangan, nilai, dan simbol kebangsaan, mereka akan merasa menjadi bagian dari satu bangsa yang sama. Perasaan kebersamaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam proses integrasi. Identitas nasional, yang diwujudkan melalui simbol-simbol negara seperti bendera, lagu kebangsaan, bahasa nasional, dan ideologi negara, mampu menjadi perekat yang menyatukan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang etnis, budaya, dan agama yang berbeda-beda.

Dalam konteks Indonesia, identitas nasional dibangun atas dasar nilai-nilai Pancasila, bahasa Indonesia sebagai bahasa

pemersatu, serta semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Identitas ini dikonstruksi melalui sejarah perjuangan bangsa, pengalaman kolektif, dan cita-cita bersama untuk membangun kehidupan berbangsa yang adil, makmur, dan berdaulat. Tanpa identitas nasional yang kuat, integrasi nasional akan mudah terganggu karena masyarakat tidak memiliki ikatan emosional yang cukup kuat untuk menjaga persatuan.

Sebaliknya, proses integrasi nasional yang baik juga akan memperkuat identitas nasional. Ketika negara berhasil menciptakan kondisi yang inklusif, adil, dan menghargai keberagaman, maka masyarakat akan merasa memiliki dan menjadi bagian dari negara tersebut. Hal ini akan memperkuat rasa nasionalisme dan loyalitas terhadap identitas nasional. Integrasi yang tidak menindas perbedaan, tetapi justru merangkul dan memberdayakan keberagaman, akan menciptakan rasa bangga menjadi bagian dari bangsa tersebut.

Namun, hubungan antara identitas nasional dan integrasi nasional tidak selalu berjalan mulus. Ketika identitas nasional tidak dibangun secara adil dan partisipatif, maka akan muncul perasaan keterasingan atau marginalisasi dari kelompok-kelompok tertentu. Misalnya, jika identitas nasional terlalu didominasi oleh budaya mayoritas dan mengabaikan kekayaan budaya lokal, maka masyarakat dari kelompok minoritas bisa merasa tidak diakui. Hal

ini bisa menjadi ancaman serius bagi proses integrasi nasional karena memunculkan konflik dan disintegrasi.

Pendidikan memainkan peran penting dalam membangun kesadaran akan identitas nasional dan memperkuat integrasi nasional. Melalui pendidikan, nilai-nilai kebangsaan, toleransi, dan pluralisme dapat ditanamkan sejak dini. Sekolah sebagai agen sosialisasi harus mampu mengembangkan kurikulum yang mencerminkan semangat kebangsaan tanpa menghapus identitas kultural lokal. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya mengenal simbol dan nilai nasional, tetapi juga belajar menghargai perbedaan dan membangun solidaritas sosial.

Peran media massa dan teknologi informasi juga sangat strategis dalam menyebarkan nilai-nilai identitas nasional. Di era digital, identitas nasional bisa diperkuat melalui narasi-narasi positif tentang kebhinekaan, sejarah bangsa, dan tokoh-tokoh inspiratif. Media dapat menjadi alat pemersatu jika digunakan untuk memperkuat rasa kebangsaan, tetapi juga bisa menjadi alat pemecah jika dipenuhi dengan konten yang memecah belah dan menyebarkan intoleransi. Oleh karena itu, perlu ada literasi digital yang kuat agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan.

Upaya membangun integrasi nasional juga harus disertai dengan kebijakan publik yang adil dan merata. Pemerataan pembangunan, pengakuan atas hak-hak kelompok minoritas, serta perlindungan terhadap budaya lokal merupakan bagian penting

dari strategi integrasi nasional. Ketika masyarakat merasa diperlakukan secara adil dan hak-haknya dihormati, maka kepercayaan terhadap negara dan rasa memiliki terhadap identitas nasional akan tumbuh dengan sendirinya.

Di sisi lain, globalisasi juga menjadi tantangan dalam menjaga identitas dan integrasi nasional. Pengaruh budaya asing yang begitu kuat dapat menggerus nilai-nilai lokal dan nasional, jika tidak diimbangi dengan penguatan karakter kebangsaan. Dalam hal ini, negara harus mampu menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap dunia luar dan perlindungan terhadap jati diri bangsa. Identitas nasional harus dijaga sebagai tameng sekaligus kompas dalam menghadapi arus global yang serba cepat dan kompleks.

Dengan memahami bahwa identitas nasional dan integrasi nasional saling berkelindan, maka penting bagi semua pihak – pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan media – untuk bekerja sama dalam membangun dan menjaga keduanya. Sebab, integrasi nasional tanpa fondasi identitas nasional yang kuat akan rapuh, sedangkan identitas nasional tanpa penerapan yang inklusif dan adil akan menjadi simbol kosong yang tidak bermakna bagi masyarakat.

Kesimpulannya, identitas nasional adalah perekat utama yang memungkinkan masyarakat hidup dalam kesatuan yang harmonis, sementara integrasi nasional adalah proses konkret dari penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya saling mendukung dan saling memperkuat dalam upaya menjaga

keutuhan dan stabilitas negara. Indonesia sebagai negara plural membutuhkan keduanya secara seimbang untuk mencapai cita-cita nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

6.4 Dinamika Identitas dan Integrasi Nasional di Indonesia

Dinamika identitas dan integrasi nasional di Indonesia merupakan sebuah proses yang kompleks dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di dalam negeri maupun pengaruh global. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, serta beragam bahasa dan agama, memiliki tantangan tersendiri dalam membentuk identitas nasional yang inklusif dan integratif. Sejak masa kemerdekaan, pembentukan identitas nasional diarahkan pada penciptaan rasa kebersamaan sebagai bangsa Indonesia yang satu, meskipun berbeda-beda latar belakang etnis dan budaya

Identitas nasional Indonesia pada dasarnya dibangun dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat kebangsaan yang lahir dari perjuangan melawan penjajahan. Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis dan ideologi negara yang menyatukan keragaman dalam semangat persatuan. Namun, dalam realitasnya, identitas nasional tidaklah statis; ia senantiasa mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman, pergeseran nilai dalam masyarakat, serta tantangan internal dan eksternal bangsa.

Di era reformasi, dinamika identitas nasional semakin mengemuka. Kebebasan berekspresi dan keterbukaan politik pasca-Orde Baru mendorong munculnya kembali identitas-identitas kultural yang sebelumnya ditekan atau diseragamkan. Di satu sisi, hal ini menunjukkan penghormatan terhadap hak-hak kelompok dan penguatan demokrasi, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan fragmentasi sosial apabila tidak diiringi dengan komitmen terhadap persatuan nasional. Konflik sosial bernuansa etnis dan agama di beberapa daerah pada awal 2000-an merupakan salah satu konsekuensi dari ketidakseimbangan antara pengakuan identitas lokal dan integrasi nasional.

Globalisasi juga membawa pengaruh besar terhadap pembentukan identitas masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Akses terhadap budaya luar melalui internet dan media sosial dapat memperkaya wawasan global, namun juga berpotensi melemahkan identitas nasional apabila tidak disertai dengan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Dalam hal ini, pendidikan dan media memiliki peran strategis untuk membangun kesadaran nasional yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa.

Integrasi nasional merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial, budaya, dan ekonomi ke dalam satu kesatuan politik yang stabil dan harmonis. Di Indonesia, proses ini tidak pernah selesai karena terus mengalami tantangan, baik dari dalam maupun luar. Faktor-faktor seperti ketimpangan pembangunan

antar daerah, diskriminasi sosial, radikalisme, dan separatisme menjadi ancaman nyata bagi integrasi nasional. Oleh karena itu, negara dituntut untuk menciptakan kebijakan yang adil, inklusif, dan memberdayakan seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang mereka.

Keberhasilan integrasi nasional sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mewujudkan keadilan sosial. Ketika masyarakat merasa diperlakukan secara adil dan merasakan manfaat dari kehadiran negara, maka loyalitas terhadap negara dan rasa kebangsaan akan tumbuh. Sebaliknya, ketidakadilan dan marginalisasi dapat memicu disintegrasi dan melemahnya identitas nasional. Di sinilah pentingnya pembangunan yang merata dan dialog antar budaya untuk menciptakan kohesi sosial.

Peran lembaga pendidikan dan keluarga dalam membentuk identitas nasional dan memperkuat integrasi juga sangat penting. Sekolah sebagai institusi formal dapat menjadi media pembentukan karakter kebangsaan melalui kurikulum yang memuat nilai-nilai toleransi, kebhinekaan, dan semangat gotong royong. Sedangkan keluarga merupakan lingkungan pertama yang menanamkan nilai-nilai dasar kebangsaan dan identitas budaya lokal kepada anak-anak sejak dini.

Media massa dan media sosial, sebagai alat komunikasi modern, turut memainkan peran ganda dalam dinamika identitas dan integrasi nasional. Di satu sisi, media bisa menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai persatuan dan memperkuat identitas

kebangsaan. Namun di sisi lain, media juga dapat menjadi ruang subur bagi penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan ideologi yang bertentangan dengan semangat kebangsaan. Oleh karena itu, literasi media dan etika digital menjadi aspek yang harus dikembangkan di masyarakat.

Upaya pemerintah dalam memperkuat identitas nasional dan integrasi dapat dilihat melalui berbagai program seperti Bela Negara, Forum Pembauran Kebangsaan, serta revitalisasi nilai-nilai Pancasila melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Program-program ini bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan memperkuat ikatan sosial di tengah masyarakat yang semakin majemuk dan dinamis. Namun, program ini perlu dijalankan secara konsisten, inklusif, dan tidak sekadar simbolis.

Masa depan identitas dan integrasi nasional Indonesia sangat ditentukan oleh generasi muda. Generasi ini hidup di tengah arus informasi global yang deras dan menghadapi tantangan identitas yang lebih kompleks. Maka, penting bagi bangsa Indonesia untuk terus menanamkan nilai-nilai nasionalisme yang kontekstual dengan zaman, bukan nasionalisme yang sempit atau eksklusif, melainkan nasionalisme yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal.

Dengan demikian, dinamika identitas dan integrasi nasional adalah proses yang memerlukan kesadaran kolektif, peran aktif semua elemen masyarakat, serta dukungan kebijakan yang

berpihak pada keadilan dan keberagaman. Indonesia yang majemuk memerlukan semangat persatuan yang terus diperbaharui melalui pendidikan, komunikasi antarbudaya, dan kebijakan negara yang mengayomi seluruh rakyatnya. Hanya dengan itu, integrasi nasional yang kokoh dan identitas nasional yang berakar dapat terus terpelihara.

6.5 Upaya Memperkuat Identitas dan Integrasi Nasional di Era Modern

Identitas dan integrasi nasional merupakan dua elemen penting dalam menjaga keutuhan sebuah negara, terutama negara yang majemuk seperti Indonesia. Identitas nasional mencerminkan jati diri bangsa, yang mencakup nilai-nilai luhur, simbol-simbol negara, bahasa nasional, budaya, dan sejarah bersama. Sementara itu, integrasi nasional adalah proses menyatukan perbedaan dalam masyarakat untuk menciptakan kesatuan dan stabilitas. Di era modern yang ditandai oleh globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan mobilitas sosial yang tinggi, tantangan terhadap identitas dan integrasi nasional menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis untuk memperkuat keduanya agar bangsa Indonesia tetap kokoh di tengah arus perubahan global.

Salah satu upaya penting adalah penguatan pendidikan karakter di berbagai jenjang pendidikan. Melalui pendidikan karakter, generasi muda ditanamkan nilai-nilai seperti cinta tanah

air, toleransi, kejujuran, kerja sama, dan tanggung jawab sosial. Kurikulum Merdeka yang kini diterapkan pemerintah Indonesia, misalnya, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap mata pelajaran. Hal ini diharapkan mampu membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan komitmen terhadap keutuhan bangsa.

Selain pendidikan, media massa dan media sosial memiliki peran strategis dalam membentuk dan menyebarluaskan identitas nasional. Di era digital, arus informasi sangat cepat dan luas, sehingga penting untuk memastikan bahwa konten-konten yang beredar turut memperkuat rasa kebangsaan. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama lembaga-lembaga masyarakat sipil, harus terus mendorong produksi konten digital yang edukatif, inspiratif, dan membangkitkan kebanggaan terhadap budaya lokal. Kampanye digital seperti "Bangga Buatan Indonesia" atau "Cinta Produk Lokal" merupakan contoh konkret yang bisa memperkuat identitas nasional melalui jalur ekonomi kreatif.

Revitalisasi budaya lokal juga menjadi salah satu kunci dalam memperkuat identitas nasional. Budaya daerah yang kaya dan beragam harus terus diangkat dan diperkenalkan kepada generasi muda, baik melalui pendidikan formal maupun kegiatan sosial budaya. Festival budaya, pelatihan seni tradisional, serta program pertukaran pelajar antar daerah dapat meningkatkan saling pengertian dan rasa memiliki antarwarga bangsa. Dengan mengenal

dan mencintai budaya sendiri, masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi penetrasi budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Penguatan identitas nasional juga erat kaitannya dengan peran institusi politik dan hukum dalam menjamin keadilan dan persamaan hak bagi seluruh warga negara. Ketimpangan sosial, diskriminasi, dan korupsi dapat melemahkan rasa kebangsaan dan memicu disintegrasi. Oleh karena itu, reformasi birokrasi, penegakan hukum yang adil, serta pemerataan pembangunan harus menjadi prioritas utama pemerintah. Negara harus hadir secara nyata di seluruh wilayah, termasuk daerah perbatasan dan terpencil, agar semua warga merasa diakui dan dilindungi hak-haknya sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

Peran organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan pemuda juga sangat penting dalam memperkuat integrasi nasional. Organisasi ini sering kali menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat akar rumput. Melalui dialog antaragama, forum lintas budaya, dan kegiatan gotong royong lintas suku, rasa persatuan dapat terus diperkuat. Gerakan sosial yang berbasis komunitas terbukti efektif dalam membangun solidaritas sosial, apalagi jika dikombinasikan dengan pendekatan digital yang sesuai dengan karakter generasi muda.

Selain itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan harus terus dikembangkan dan dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia digital. Meskipun globalisasi mendorong

penggunaan bahasa asing, khususnya Inggris, bahasa Indonesia tetap harus menjadi medium utama dalam komunikasi formal, pendidikan, dan media. Pemerintah dan lembaga bahasa harus aktif mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di berbagai platform, termasuk di media sosial dan konten digital, agar identitas kebahasaan bangsa tetap kuat dan tidak tergeser.

Dari sisi integrasi, pembangunan infrastruktur yang merata dan terhubung antardaerah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan integrasi nasional. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan internet yang merata akan membuka akses informasi, ekonomi, dan pendidikan ke seluruh pelosok tanah air. Ini bukan hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarwilayah, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat rasa kebersamaan dalam bingkai NKRI.

Tidak kalah penting adalah pelibatan aktif generasi muda dalam proses pembangunan nasional. Generasi muda sebagai agen perubahan harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam politik, ekonomi, dan sosial. Program-program seperti wirausaha muda, pelatihan kepemimpinan, dan magang di sektor pemerintahan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Anak muda yang merasa dilibatkan dan dihargai akan lebih termotivasi untuk menjaga keutuhan dan keberagaman bangsa.

Perlu juga dipahami bahwa penguatan identitas dan integrasi nasional tidak boleh bersifat eksklusif atau memaksakan homogenitas. Justru kekuatan Indonesia terletak pada kemampuannya mengelola keberagaman. Oleh karena itu, upaya integrasi harus selalu disertai dengan pendekatan inklusif dan demokratis yang menghargai perbedaan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan publik, agar semua kelompok masyarakat merasa menjadi bagian penting dari bangsa ini.

Akhirnya, dalam menghadapi tantangan global seperti radikalisme, perubahan iklim, dan disinformasi digital, kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil menjadi kunci. Hanya dengan sinergi yang kuat dan kesadaran kolektif, Indonesia dapat memperkuat identitas nasionalnya dan menjaga integrasi sosial-politik di tengah era modern yang terus berubah. Kekuatan bangsa terletak pada solidaritas dan semangat gotong royong yang telah menjadi warisan leluhur, dan harus terus dijaga oleh generasi saat ini dan yang akan datang.

BAB VII
BANGSA DAN IDENTITAS

7.1 Pengertian Bangsa dan Identitas Nasional

Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan identitas kultural, sejarah, bahasa, dan aspirasi politik dalam suatu wilayah tertentu, serta memiliki kehendak untuk hidup bersama dalam suatu sistem kenegaraan. Dalam perspektif modern, bangsa tidak hanya didasarkan pada kesamaan etnis atau keturunan, tetapi juga pada kesepakatan dan perasaan senasib sepenanggungan di antara individu-individu yang tergabung di dalamnya. Konsep bangsa dapat bersifat objektif (kesamaan ras, bahasa, budaya) maupun subjektif (perasaan kebersamaan dan solidaritas). Dalam pemikiran Ernest Renan (meskipun konsep ini lebih tua), bangsa adalah "jiwa dan prinsip spiritual", yaitu kehendak untuk hidup bersama dan memiliki warisan bersama.

1. Pengertian Identitas Nasional

   Identitas nasional adalah karakteristik khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain, mencakup unsur budaya, bahasa, agama, sejarah, simbol-simbol nasional, serta nilai-nilai dan ideologi bersama. Identitas nasional terbentuk melalui proses historis panjang dan dapat berubah atau berkembang seiring waktu. Di

Indonesia, identitas nasional termanifestasi dalam ideologi Pancasila, semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", serta penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Identitas nasional merupakan alat pemersatu bangsa sekaligus menjadi dasar legitimasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Hubungan Bangsa dan Identitas Nasional

   Bangsa dan identitas nasional memiliki hubungan yang erat dan saling membentuk. Sebuah bangsa akan mengembangkan identitas nasionalnya sebagai sarana memperkuat integrasi dan loyalitas warganya. Sebaliknya, identitas nasional yang kuat dapat memperkuat solidaritas kebangsaan, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan fragmentasi sosial. Dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*), pembangunan identitas nasional seringkali menjadi agenda penting dalam kebijakan negara demi memperkuat keutuhan nasional.

3. Tantangan dalam Pembentukan Identitas Nasional

   Dalam era globalisasi, identitas nasional menghadapi berbagai tantangan, seperti arus budaya asing, media digital, dan meningkatnya sentimen kesukuan atau primordial. Negara harus mampu menyeimbangkan antara keterbukaan terhadap perubahan dan pelestarian nilai-nilai inti bangsa. Pendidikan, media massa, dan kebijakan budaya memainkan peranan strategis dalam menanamkan dan

memperkuat identitas nasional di kalangan generasi muda. Di Indonesia, tantangan ini sangat relevan karena keragaman suku, agama, dan budaya sangat tinggi, sehingga pembangunan identitas nasional harus dijalankan secara inklusif dan demokratis.

7.2 Pembentukan dan Perkembangan Identitas Bangsa Indonesia

Identitas bangsa adalah ciri khas yang melekat pada suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Identitas ini meliputi unsur budaya, sejarah, bahasa, ideologi, dan nilai-nilai yang dianut bersama. Di Indonesia, identitas bangsa terbentuk dari keberagaman suku, agama, ras, dan budaya yang kemudian dipersatukan oleh semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan. Identitas ini bukan sesuatu yang statis, melainkan terus berkembang mengikuti dinamika sosial, politik, dan globalisasi.

1. Warisan Sejarah Nusantara

   Pembentukan identitas bangsa Indonesia berakar pada sejarah panjang peradaban Nusantara. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram telah memberikan sumbangan dalam membentuk identitas kolektif. Konsep persatuan dan kebhinekaan sudah tercermin dalam interaksi antarwilayah yang berbeda

bahasa dan budaya namun tetap menjalin hubungan dagang, politik, dan budaya.

2. Penjajahan dan Kesadaran Nasional

   Masa penjajahan oleh bangsa Barat, khususnya Belanda, telah memunculkan kesadaran nasional di kalangan rakyat Indonesia. Penindasan yang merata di seluruh wilayah membangkitkan solidaritas dan rasa senasib sepenanggungan. Dalam konteks ini, identitas bangsa mulai terbentuk sebagai reaksi terhadap penjajahan, yang terlihat jelas melalui kebangkitan nasional pada awal abad ke-20.

3. Sumpah Pemuda dan Bahasa Indonesia

   Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 menjadi tonggak penting pembentukan identitas bangsa. Tiga ikrar utama yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa menjadi simbol persatuan. Pengakuan terhadap Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sangat signifikan karena berhasil menyatukan ratusan suku bangsa yang sebelumnya memiliki bahasa daerah masing-masing.

4. Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi

   Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan penegasan identitas Indonesia sebagai bangsa merdeka. Identitas ini kemudian dilembagakan dalam konstitusi, yakni UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara berperan penting dalam memperkuat identitas bangsa melalui lima prinsip yang mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia.

5. Masa Orde Lama dan Orde Baru

   Pada masa Orde Lama, identitas bangsa dikaitkan dengan semangat anti-kolonialisme dan kedaulatan nasional. Sedangkan pada masa Orde Baru, identitas bangsa ditekankan melalui stabilitas nasional, pembangunan ekonomi, dan ideologi tunggal Pancasila. Meski demikian, pada masa Orde Baru terjadi pemaksaan homogenisasi yang sempat mengabaikan keragaman lokal.

6. Reformasi dan Kebebasan Identitas

   Reformasi 1998 membuka ruang kebebasan ekspresi dan pengakuan terhadap identitas lokal dan minoritas. Euforia demokrasi memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan budaya, bahasa, dan keyakinannya dengan lebih terbuka. Namun, kebebasan ini juga memunculkan tantangan baru berupa konflik identitas dan radikalisme yang mengancam kohesi sosial.

7. Globalisasi dan Tantangan Identitas

   Globalisasi membawa pengaruh budaya luar yang masuk melalui media, teknologi, dan ekonomi. Hal ini memunculkan kekhawatiran terhadap lunturnya identitas bangsa. Generasi muda lebih mengenal budaya luar ketimbang budaya lokal. Oleh karena itu, revitalisasi identitas nasional menjadi penting agar bangsa Indonesia tidak kehilangan jati dirinya.

8. Pendidikan dan Pembentukan Identitas

Pendidikan memainkan peran penting dalam pembentukan dan penguatan identitas bangsa. Kurikulum yang memasukkan nilai-nilai kebangsaan, sejarah perjuangan, dan kebhinekaan menjadi sarana efektif untuk menanamkan identitas sejak dini. Sekolah dan perguruan tinggi harus menjadi tempat pembentukan karakter bangsa yang cinta tanah air.

9. Media Sosial dan Dinamika Identitas

   Perkembangan media sosial turut membentuk identitas bangsa di era digital. Media sosial menjadi arena baru pembentukan opini publik, identitas kultural, dan nasionalisme digital. Namun, disinformasi dan ujaran kebencian juga bisa merusak solidaritas kebangsaan. Oleh karena itu, literasi digital perlu dikembangkan untuk menjaga integritas identitas bangsa.

10. Peran Budaya dan Seni dalam Identitas

    Seni dan budaya merupakan elemen penting dalam memperkuat identitas bangsa. Kesenian tradisional, musik, tarian, dan adat istiadat menjadi simbol kekayaan budaya Indonesia yang harus terus dilestarikan. Festival budaya, pelestarian bahasa daerah, dan promosi pariwisata budaya adalah bentuk konkret dari upaya mempertahankan identitas nasional di tengah arus modernisasi.

11. Kesimpulan dan Refleksi Masa Depan

    Identitas bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan terus berkembang. Nilai-nilai Pancasila, semangat kebhinekaan, serta komitmen terhadap persatuan merupakan fondasi utama. Ke depan, tantangan globalisasi, disintegrasi, dan krisis identitas harus dihadapi dengan memperkuat pendidikan kebangsaan, media yang bertanggung jawab, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga keutuhan bangsa.

7.3 Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengusulan Identitas Nasional

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan mata pelajaran yang memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Di tengah arus globalisasi dan derasnya informasi yang melintasi batas negara, tantangan terhadap eksistensi identitas nasional semakin kompleks. Oleh karena itu, PKn diharapkan menjadi sarana yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan sekaligus memperkuat identitas nasional.

1. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

   PKn adalah proses pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Menurut Sapriya (2008), PKn mencakup aspek pengetahuan

kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan sikap kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Fungsi dan Tujuan PKn

   Fungsi utama PKn adalah membina dan membentuk sikap serta perilaku warga negara yang demokratis. Tujuannya tidak hanya sebatas pada penguasaan materi hukum dan pemerintahan, tetapi juga pada pembentukan karakter bangsa. Pendidikan ini memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban, demokrasi, keadilan, dan pentingnya persatuan dan kesatuan.

3. Identitas Nasional: Konsep dan Unsurnya

   Identitas nasional adalah jati diri kolektif suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Unsur-unsur identitas nasional mencakup bahasa, budaya, sejarah, ideologi, dan simbol-simbol negara. Menurut Kymlicka (2011), identitas nasional memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan sosial dalam suatu negara.

4. Hubungan PKn dengan Identitas Nasional

   PKn memiliki peran vital dalam memperkuat identitas nasional karena menjadi wahana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur bangsa. Melalui pembelajaran PKn, peserta didik dikenalkan pada sejarah perjuangan bangsa, Pancasila, UUD 1945, serta semangat kebhinekaan yang

menjadi ciri khas Indonesia. Ini penting dalam membentuk rasa bangga dan memiliki terhadap bangsa sendiri.

5. Tantangan Globalisasi terhadap Identitas Nasional

   Globalisasi membawa dampak positif dan negatif. Di satu sisi, terbukanya akses informasi memperluas wawasan, tetapi di sisi lain dapat menggerus nilai-nilai lokal dan nasional. Budaya asing yang lebih dominan bisa menimbulkan krisis identitas pada generasi muda. PKn hadir untuk menjadi filter terhadap pengaruh negatif globalisasi.

6. Strategi Penguatan Identitas Nasional melalui PKn

   Penguatan identitas nasional dapat dilakukan melalui kurikulum yang integratif, pendekatan pembelajaran kontekstual, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan secara berkelanjutan. Guru harus menjadi teladan dan fasilitator dalam membimbing siswa mengenal dan mencintai negaranya. Menurut Wibowo (2013), pendekatan partisipatif dalam pembelajaran PKn meningkatkan efektivitas internalisasi nilai kebangsaan.

7. Peran PKn dalam Pendidikan Karakter

   PKn sangat erat kaitannya dengan pendidikan karakter. Nilai-nilai seperti integritas, toleransi, tanggung jawab, dan nasionalisme adalah bagian dari materi PKn. Pendidikan karakter yang kuat akan membentuk warga negara yang

tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan sosial.

8. Implementasi di Sekolah

   Implementasi PKn di sekolah harus berbasis pada prinsip demokrasi dan HAM. Proses pembelajaran harus menghindari indoktrinasi dan lebih mengedepankan diskusi, simulasi, serta studi kasus. Pembelajaran aktif seperti ini akan mendorong siswa berpikir kritis sekaligus menanamkan nilai kebangsaan secara lebih mendalam.

9. Evaluasi Efektivitas PKn

   Evaluasi terhadap efektivitas PKn perlu dilakukan secara berkelanjutan. Penilaian tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotor. Keberhasilan PKn bisa diukur dari partisipasi siswa dalam kegiatan sosial, sikap toleransi, serta kepedulian terhadap isu-isu kebangsaan dan lingkungan sekitar.

10. Peran Stakeholder dalam Penguatan Identitas Nasional

    Selain sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah juga memiliki peran penting dalam memperkuat identitas nasional. Kolaborasi antara ketiganya sangat diperlukan agar nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dapat dilanjutkan di lingkungan rumah dan masyarakat. Media juga perlu berkontribusi dengan menyebarkan konten-konten positif tentang kebangsaan.

7.4 Tantangan dalam Menjaga Identitas Bangsa di Era Globalisasi

Globalisasi merupakan suatu proses integrasi antarbangsa yang dipicu oleh perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi. Globalisasi menciptakan dunia tanpa batas, yang mempermudah pertukaran budaya, informasi, dan nilai-nilai sosial. Di satu sisi, hal ini membuka peluang bagi kemajuan bangsa, namun di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan tantangan besar dalam mempertahankan identitas nasional. Identitas bangsa, yang mencakup bahasa, budaya, nilai, dan sejarah bersama, terancam tergerus oleh arus budaya asing yang masuk tanpa filter.

Salah satu tantangan utama adalah derasnya arus budaya populer asing yang mempengaruhi gaya hidup, pola pikir, dan nilai-nilai masyarakat, khususnya generasi muda. Musik, film, media sosial, dan produk-produk budaya global lainnya seringkali lebih diminati dibandingkan budaya lokal. Hal ini menyebabkan pergeseran nilai-nilai dan orientasi identitas, dari yang semula berbasis kebangsaan menjadi bercorak global atau kosmopolitan. Jika tidak diimbangi dengan penguatan budaya lokal, maka rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap identitas nasional bisa luntur.

Bahasa sebagai salah satu pilar utama identitas bangsa juga mengalami tekanan. Penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari, dunia pendidikan, hingga dunia kerja. Meskipun penguasaan bahasa asing

penting untuk bersaing di era global, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar harus tetap dipertahankan sebagai alat pemersatu bangsa. Kurangnya perhatian terhadap penggunaan bahasa nasional dapat menggerus kesadaran kolektif akan pentingnya identitas kebahasaan nasional.

Tekanan ekonomi global juga menjadi tantangan serius. Sistem ekonomi kapitalistik global sering kali menempatkan negara berkembang seperti Indonesia dalam posisi konsumen, bukan produsen. Dominasi produk asing di pasar dalam negeri bukan hanya berimplikasi pada ketergantungan ekonomi, tetapi juga melemahkan identitas kultural bangsa. Ketika masyarakat lebih memilih produk luar negeri daripada produk dalam negeri, secara tidak langsung mereka turut mereduksi makna kebanggaan nasional.

Dunia pendidikan menjadi arena strategis dalam menjaga identitas bangsa, namun justru mengalami dilema. Kurikulum yang cenderung fokus pada kemampuan kognitif dan penguasaan teknologi, kadang mengesampingkan muatan lokal dan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kebangsaan. Hal ini menyebabkan generasi muda kehilangan pemahaman mendalam tentang sejarah, budaya, dan nilai luhur bangsa. Jika pendidikan tidak difokuskan untuk membentuk identitas nasional yang kuat, maka masyarakat akan mudah terombang-ambing oleh arus global.

Globalisasi juga memperkuat tantangan politik identitas. Dengan kebebasan informasi dan keterbukaan sosial, muncul

berbagai kelompok yang mengedepankan identitas sempit berdasarkan agama, etnis, atau kelompok tertentu, yang bisa bertentangan dengan semangat kebhinekaan. Hal ini memperlemah solidaritas nasional dan membuka potensi konflik sosial. Identitas bangsa Indonesia yang semestinya dibangun di atas prinsip persatuan dalam keberagaman menjadi terfragmentasi oleh kepentingan kelompok.

Media sosial, sebagai bagian dari teknologi global, menjadi alat yang sangat berpengaruh dalam pembentukan identitas masyarakat. Di satu sisi, media sosial dapat digunakan untuk memperkuat narasi kebangsaan dan memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi wadah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten-konten yang merusak nilai-nilai nasional. Kurangnya literasi digital menjadikan masyarakat mudah terpengaruh dan terpolarisasi oleh konten-konten yang tidak mencerminkan jati diri bangsa.

Tantangan berikutnya adalah lunturnya nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Gaya hidup individualistik yang dibawa oleh budaya global menjadikan masyarakat cenderung lebih mementingkan diri sendiri. Nilai-nilai lokal yang selama ini menjadi perekat sosial lambat laun digantikan oleh norma-norma baru yang berorientasi pada efisiensi dan kompetisi. Hal ini mengancam kohesi sosial dan jati diri bangsa.

Ketimpangan akses terhadap informasi dan teknologi juga memperbesar kesenjangan identitas antarwilayah di Indonesia. Masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan cenderung lebih terpapar globalisasi dibandingkan masyarakat pedesaan. Hal ini menyebabkan pembentukan identitas yang timpang dan berpotensi menimbulkan konflik antarbudaya dalam negeri. Pemerataan pembangunan, pendidikan, dan teknologi menjadi kunci untuk menjaga kesatuan identitas nasional

Respon kebijakan pemerintah terhadap globalisasi juga perlu dicermati. Pemerintah harus berperan aktif dalam menyusun kebijakan yang melindungi dan mempromosikan identitas nasional, seperti pelestarian budaya lokal, penguatan industri kreatif berbasis kearifan lokal, serta pengembangan kurikulum pendidikan karakter. Tanpa kebijakan afirmatif yang kuat, maka identitas bangsa akan sulit bertahan di tengah arus perubahan global.

Masyarakat sipil dan generasi muda juga memiliki peran penting dalam menjaga identitas bangsa. Kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dalam pelestarian budaya lokal, penggunaan produk dalam negeri, serta penguatan narasi kebangsaan di ruang publik menjadi wujud nyata dari upaya mempertahankan jati diri bangsa. Identitas nasional bukan sesuatu yang statis, tetapi harus terus dirawat, diperjuangkan, dan ditransformasikan agar tetap relevan dalam dinamika global.

BAB VIII
IDENTITAS NASIONAL INDONESIA

8.1 Konsep Identitas Nasional

Identitas nasional adalah konsep yang merujuk pada karakter, nilai, simbol, dan atribut khas yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang membedakannya dari bangsa lain. Identitas ini mencakup unsur-unsur seperti bahasa, budaya, sejarah, ideologi, agama, dan simbol-simbol kenegaraan. Dalam konteks kenegaraan, identitas nasional memainkan peran sebagai dasar pembentukan integrasi sosial dan politik.

1. Asal Mula dan Pembentukan Identitas Nasional

   Identitas nasional tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibentuk melalui proses historis panjang yang mencakup perjuangan bersama, pengalaman kolektif, serta dinamika interaksi sosial dan budaya. Dalam banyak kasus, perjuangan melawan penjajahan atau penindasan menjadi momen penting dalam pembentukan identitas nasional, seperti halnya di Indonesia melalui perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.

2. Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional

   Beberapa unsur penting dalam pembentukan identitas nasional antara lain: bahasa nasional (seperti Bahasa

Indonesia), simbol negara (seperti bendera dan lambang negara), ideologi (Pancasila), sejarah perjuangan bangsa, kebudayaan nasional, serta nilai-nilai yang dianut bersama. Keseluruhan elemen ini memperkuat rasa kebangsaan dan memperjelas eksistensi suatu negara-bangsa.

3. Fungsi Identitas Nasional

   Identitas nasional berfungsi sebagai alat pemersatu, simbol solidaritas, serta acuan nilai dan norma dalam kehidupan berbangsa. Ia menjadi sarana membangun loyalitas warga negara terhadap negara dan memperkuat legitimasi kekuasaan. Selain itu, identitas nasional juga penting dalam membedakan bangsa satu dengan bangsa lain, baik dalam konteks regional maupun global.

4. Identitas Nasional dalam Perspektif Kultural

   Dalam pendekatan kultural, identitas nasional dibentuk oleh budaya lokal yang melebur menjadi identitas kolektif bangsa. Di Indonesia, keragaman budaya daerah menjadi bagian penting dari mozaik identitas nasional. Proses pembudayaan nilai-nilai lokal ke dalam kerangka nasional dilakukan melalui pendidikan, media massa, serta kebijakan negara.

5. Identitas Nasional dan Globalisasi

   Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap identitas nasional. Masuknya budaya global dapat memperkaya sekaligus mengancam nilai-nilai nasional. Generasi muda,

misalnya, lebih mudah terpapar budaya populer asing yang dapat menggeser nilai-nilai kebangsaan jika tidak diimbangi dengan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan yang kuat.

6. Identitas Nasional dan Negara Multikultural

   Dalam negara multikultural seperti Indonesia, identitas nasional harus mampu merangkul keberagaman tanpa menghilangkan jati diri masing-masing kelompok etnis. Konsep "Bhinneka Tunggal Ika" menjadi landasan utama yang menunjukkan bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan kekayaan yang dapat memperkuat kesatuan bangsa.

7. Pendidikan sebagai Sarana Pembentukan Identitas Nasional

   Pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan identitas nasional sejak dini. Kurikulum yang memuat sejarah perjuangan bangsa, nilai-nilai Pancasila, dan kebhinekaan Indonesia menjadi instrumen penting dalam membentuk kesadaran nasional. Sekolah juga menjadi arena integrasi sosial yang efektif bagi generasi muda dari latar belakang berbeda.

8. Media dan Identitas Nasional

   Media massa dan media digital sangat berperan dalam pembentukan persepsi publik terhadap identitas nasional. Kampanye kebangsaan, tayangan budaya lokal, dan konten edukatif tentang sejarah dan nilai-nilai nasional sangat

efektif dalam memperkuat jati diri bangsa. Namun, media juga dapat menjadi sarana penetrasi budaya asing jika tidak dikendalikan secara bijak.

9. Identitas Nasional dan Politik

   Dalam konteks politik, identitas nasional seringkali menjadi dasar legitimasi kekuasaan. Pemimpin politik yang mampu mewakili aspirasi nasional dan memperjuangkan kepentingan rakyat cenderung mendapatkan dukungan luas. Namun, identitas juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu, seperti memperkuat populisme atau memecah belah masyarakat.

10. Tantangan Identitas Nasional di Era Digital

    Di era digital, penyebaran informasi yang sangat cepat dapat mempercepat transformasi nilai dalam masyarakat. Identitas nasional menghadapi tantangan berupa hoaks, propaganda asing, dan konten negatif yang dapat merusak kohesi sosial. Oleh karena itu, literasi digital dan pendidikan kritis menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan identitas bangsa.

11. Kesimpulan

    Identitas nasional adalah landasan utama dalam menjaga keutuhan dan keberlangsungan suatu negara. Ia terbentuk dari proses sejarah, budaya, dan kesepakatan kolektif. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional harus terus dirawat melalui pendidikan, penguatan budaya lokal, dan

partisipasi warga dalam kehidupan berbangsa. Di tengah arus globalisasi dan tantangan digital, identitas nasional menjadi kunci ketahanan dan daya saing bangsa di panggung dunia.

8.2 Pembentukan Identitas Nasional Indonesia

Pembentukan Identitas Nasional Indonesia merupakan proses historis, sosiologis, dan politis yang membentuk kesadaran kolektif masyarakat Indonesia sebagai satu bangsa yang utuh dan berdaulat. Proses ini tidak terjadi secara instan, tetapi merupakan hasil perjuangan panjang yang melibatkan berbagai unsur: suku, agama, budaya, dan kepentingan politik dalam rangka menuju persatuan dan kesatuan bangsa.

1. Faktor Historis sebagai Landasan Identitas

   Pembentukan identitas nasional Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perjuangan melawan penjajahan. Masa kolonialisme Belanda yang berlangsung selama lebih dari tiga abad telah menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya dalam semangat perjuangan bersama. Rasa senasib sepenanggungan menjadi titik awal munculnya kesadaran nasional sebagai identitas kolektif bangsa Indonesia.

2. Pengaruh Kebangkitan Nasional

   Kebangkitan nasional pada awal abad ke-20 menandai fase penting dalam pembentukan identitas nasional. Organisasi

seperti Budi Utomo (1908) dan Sarekat Islam (1911) memperkenalkan konsep bangsa kepada masyarakat luas. Kesadaran nasional terus berkembang melalui pendidikan dan media massa yang memicu munculnya rasa kebangsaan di berbagai kalangan.

3. Sumpah Pemuda dan Bahasa Indonesia

   Momentum besar dalam pembentukan identitas nasional adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam ikrar tersebut, para pemuda menyatakan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan: Bahasa Indonesia. Bahasa ini berperan sebagai alat pemersatu bangsa yang sebelumnya terdiri dari ratusan bahasa daerah yang berbeda.

4. Proklamasi Kemerdekaan 1945

   Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 memperkuat identitas nasional sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi tersebut menjadi pernyataan resmi bahwa Indonesia bukan sekadar wilayah geografis, tetapi entitas politik dan kultural yang memiliki identitas sendiri. Kemerdekaan ini sekaligus menjadi puncak perjuangan panjang rakyat Indonesia.

5. Pancasila sebagai Dasar Identitas Nasional

   Pancasila sebagai dasar negara juga merupakan pilar utama identitas nasional Indonesia. Lima sila dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa

Indonesia, seperti kepercayaan kepada Tuhan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pancasila menjadi pedoman hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk.

6. Konstitusi dan Simbol-Simbol Negara

   UUD 1945 dan simbol-simbol negara seperti bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" juga menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional. Simbol-simbol ini memiliki fungsi ideologis dan emosional dalam membangun rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional di kalangan rakyat Indonesia.

7. Keberagaman sebagai Bagian dari Identitas

   Indonesia terdiri dari lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan beragam agama serta budaya. Keberagaman ini bukan hambatan, tetapi justru menjadi fondasi yang memperkaya identitas nasional. Konsep "Bhinneka Tunggal Ika" (berbeda-beda tetapi tetap satu) mencerminkan bagaimana identitas nasional Indonesia dibangun dari semangat inklusif terhadap perbedaan.

8. Peran Pendidikan dan Media Massa

   Pendidikan nasional memainkan peran besar dalam pembentukan identitas nasional. Kurikulum pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan, sejarah nasional, dan Pancasila sejak dini telah membantu membentuk

generasi muda yang memiliki identitas nasional yang kuat. Media massa, baik cetak maupun digital, juga turut menyebarluaskan narasi kebangsaan kepada publik luas.

9. Tantangan di Era Reformasi dan Globalisasi

   Sejak era reformasi 1998, Indonesia memasuki babak baru dengan keterbukaan politik dan demokratisasi. Di satu sisi, ini memberi ruang bagi ekspresi budaya lokal, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan terhadap identitas nasional, seperti meningkatnya radikalisme, disintegrasi sosial, dan pengaruh budaya asing yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

10. Strategi Penguatan Identitas Nasional

    Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan strategi penguatan identitas nasional yang melibatkan semua elemen bangsa. Upaya tersebut meliputi peningkatan pendidikan karakter, pelestarian budaya lokal, penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi, serta pembangunan narasi kebangsaan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

11. Kesimpulan: Identitas Nasional sebagai Dinamika Berkelanjutan

    Identitas nasional Indonesia merupakan hasil dari proses historis, sosial, dan kultural yang kompleks. Ia terus berkembang seiring perubahan zaman, namun tetap berpijak pada nilai-nilai dasar seperti persatuan,

kebhinekaan, dan keadilan. Di tengah dunia yang semakin terbuka dan kompleks, penguatan identitas nasional menjadi penting untuk menjaga integritas dan eksistensi bangsa Indonesia.

8.3 Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembentukan Identitas Nasional

PKn menjadi wahana yang sistematis untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Melalui kurikulum yang terstruktur, PKn memperkenalkan kepada peserta didik tentang dasar negara, sejarah perjuangan kemerdekaan, sistem pemerintahan, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini penting untuk membentuk identitas nasional yang kuat dan berkelanjutan.

Beberapa nilai utama yang diajarkan dalam PKn dan berperan dalam pembentukan identitas nasional adalah Pancasila, demokrasi, persatuan, keadilan sosial, toleransi, dan cinta tanah air. Pendidikan ini mengajak peserta didik untuk tidak hanya mengetahui nilai tersebut, tetapi juga menginternalisasi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi efektif dalam mengimplementasikan PKn mencakup pendekatan kontekstual, integrasi nilai budaya lokal, dan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Menurut Wibowo (2013),

pendekatan ini dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terhadap masalah kebangsaan secara lebih nyata.

Guru memiliki peran kunci dalam membentuk identitas nasional melalui PKn. Guru tidak hanya sebagai pengajar materi, tetapi juga sebagai role model dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Guru yang mampu menunjukkan sikap nasionalis dan berintegritas akan memberikan pengaruh positif bagi peserta didik.

Pembentukan identitas nasional tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga melibatkan keluarga dan masyarakat. Lingkungan sosial yang mendukung nilai-nilai kebangsaan akan memperkuat hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting dalam memperkuat identitas nasional.

Evaluasi berkala terhadap kurikulum dan metode pembelajaran PKn diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman. Perlu dilakukan inovasi dalam pembelajaran yang interaktif dan reflektif, seperti diskusi, studi kasus, dan kegiatan kewarganegaraan agar peserta didik tidak hanya menjadi hafal, tetapi juga terlibat secara emosional dan moral.

8.4 Tantangan dan Ancaman terhadap Identitas Nasional di Era Modern

Era modern ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, serta meningkatnya interaksi antarbangsa secara global. Meskipun membawa banyak

kemajuan, era ini juga menghadirkan tantangan besar dalam mempertahankan identitas nasional. Identitas nasional merupakan cerminan jati diri sebuah bangsa yang meliputi nilai-nilai budaya, bahasa, sejarah, dan simbol-simbol yang mengikat rakyatnya dalam satu kesatuan. Dalam era modern, berbagai pengaruh eksternal dan internal dapat mengancam kelangsungan dan keutuhan identitas ini.

Salah satu tantangan utama adalah penetrasi budaya asing yang masif melalui media massa dan platform digital. Globalisasi budaya membuat masyarakat, terutama generasi muda, mudah terpapar gaya hidup, nilai, dan bahasa asing. Hal ini berpotensi menyebabkan alienasi budaya lokal, di mana masyarakat mulai kehilangan rasa bangga dan keterikatan pada tradisi dan kebiasaan nasional mereka sendiri. Akibatnya, terjadi homogenisasi budaya yang melemahkan keberagaman nasional.

Selain pengaruh budaya asing, modernisasi yang tidak disertai dengan kesadaran kritis terhadap identitas nasional juga menjadi ancaman. Modernisasi cenderung membawa perubahan gaya hidup yang lebih individualistis dan materialistis, bertolak belakang dengan nilai-nilai kolektivitas dan gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Jika masyarakat hanya mengejar kemajuan teknologi dan ekonomi tanpa menjaga nilai-nilai tradisional, maka identitas nasional akan terkikis.

Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih turut membawa tantangan lain berupa penyebaran berita palsu,

propaganda, dan radikalisme yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Media sosial sebagai ruang publik digital sering kali menjadi medan pertempuran identitas, di mana narasi kebangsaan bisa terdistorsi oleh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Fragmentasi identitas sosial dan politik ini mengancam soliditas nasional dan harmoni sosial.

Tantangan bahasa nasional juga semakin nyata di era modern. Penggunaan bahasa asing yang semakin dominan dalam pendidikan, bisnis, dan media massa berpotensi melemahkan posisi bahasa nasional sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa nasional bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga medium pewarisan budaya dan sejarah bangsa. Jika bahasa nasional tergantikan oleh bahasa asing, maka identitas bangsa pun turut tergerus.

Globalisasi ekonomi memberikan tantangan tersendiri bagi identitas nasional melalui dominasi produk dan perusahaan multinasional. Produk impor yang lebih murah dan menarik sering kali menggeser produk lokal. Hal ini tidak hanya berdampak pada perekonomian dalam negeri, tetapi juga pada budaya konsumsi masyarakat yang mulai meninggalkan produk dan simbol nasional. Akibatnya, rasa kebanggaan terhadap produk dan budaya nasional menurun.

Di samping itu, ketimpangan pembangunan dan kesenjangan sosial juga menjadi ancaman terhadap identitas nasional. Ketika sebagian besar masyarakat tidak merasakan manfaat dari kemajuan modernisasi, rasa keterikatan pada bangsa bisa menurun.

Ketimpangan ini bisa menimbulkan perasaan terpinggirkan yang memicu konflik sosial dan bahkan perpecahan yang mengancam persatuan nasional.

Modernisasi pendidikan yang berorientasi pada kompetensi global tanpa memasukkan pendidikan karakter dan nilai kebangsaan secara memadai berisiko melemahkan identitas nasional. Pendidikan seharusnya tidak hanya menyiapkan generasi untuk bersaing di dunia global, tetapi juga membentuk mereka sebagai warga negara yang mencintai dan menjaga warisan budaya bangsa. Ketidakseimbangan ini akan menyebabkan generasi muda kurang paham dan terikat dengan identitas nasionalnya.

Ancaman lain berasal dari politik identitas yang semakin marak di era modern. Eksploitasi identitas etnis, agama, atau kelompok tertentu untuk kepentingan politik dapat memperlemah rasa kebangsaan yang inklusif. Ketika identitas sempit ini dipaksakan, maka nilai kebersamaan dan persatuan dalam keberagaman yang menjadi dasar identitas nasional Indonesia menjadi tergeser dan terancam perpecahan.

Ancaman terhadap identitas nasional juga datang dari diaspora dan migrasi. Ketika warga negara meninggalkan tanah air untuk bekerja atau belajar di luar negeri, mereka berhadapan dengan tantangan mempertahankan identitas nasionalnya di tengah budaya asing. Sementara itu, masuknya imigran dan pengaruh budaya baru juga menuntut bangsa untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati diri.

Respons kebijakan pemerintah dan masyarakat terhadap era modern menjadi faktor penentu dalam menghadapi tantangan dan ancaman identitas nasional. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang kuat untuk pelestarian budaya, penguatan bahasa nasional, dan pendidikan karakter. Sementara masyarakat harus aktif melestarikan nilai-nilai tradisional dan mengedepankan semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari agar identitas nasional tetap hidup dan berkembang.

Secara keseluruhan, tantangan dan ancaman terhadap identitas nasional di era modern bersifat multidimensional dan memerlukan perhatian serius dari semua elemen bangsa. Dengan kesadaran kolektif, kebijakan yang tepat, dan partisipasi aktif masyarakat, identitas nasional dapat dipertahankan dan dikembangkan agar tetap relevan dan menjadi sumber kekuatan bangsa di tengah dinamika globalisasi dan modernisasi.

BAB IX
NEGARA KEBANGSAAN INDONESIA

9.1 Konsep Negara Kebangsaan

Konsep Negara Kebangsaan (*nation-state*) merupakan suatu bentuk negara modern yang didasarkan pada kesatuan bangsa yang memiliki identitas nasional yang jelas dan diakui sebagai suatu entitas politik yang berdaulat. Negara kebangsaan lahir dari proses sejarah yang panjang, di mana masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, bahasa, sejarah, dan aspirasi politik bersatu membentuk sebuah negara yang terorganisir. Konsep ini mulai berkembang secara signifikan sejak akhir abad ke-18 dan menjadi model utama dalam sistem internasional modern. Negara kebangsaan menekankan pentingnya identitas nasional sebagai dasar legitimasi politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, sebuah negara kebangsaan bukan sekadar wilayah geografis, melainkan juga sebuah komunitas politik yang merasa memiliki kesatuan nasib dan tujuan bersama.

Identitas nasional dalam negara kebangsaan menjadi pusat pembentukan loyalitas dan rasa memiliki terhadap negara. Dalam konteks ini, negara kebangsaan juga berfungsi sebagai penjaga dan pelindung nilai-nilai budaya, simbol, bahasa, serta sejarah yang membentuk identitas kolektif bangsa tersebut. Negara kebangsaan

idealnya mampu mengintegrasikan keberagaman yang ada di dalam masyarakatnya menjadi satu kesatuan yang kokoh dan harmonis, tanpa menghilangkan keunikan kelompok-kelompok etnis atau budaya yang ada. Sebaliknya, negara kebangsaan juga menghadapi tantangan dalam mengelola pluralitas dan perbedaan, agar tidak menjadi sumber konflik atau fragmentasi sosial.

Dalam praktiknya, konsep negara kebangsaan di Indonesia diterapkan melalui upaya memperkuat identitas nasional yang pluralistik, di mana semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" menjadi prinsip dasar dalam menyatukan berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama. Negara kebangsaan Indonesia didasarkan pada ideologi Pancasila yang menegaskan keberagaman sebagai kekuatan sekaligus fondasi persatuan nasional. Pembentukan negara kebangsaan ini merupakan jawaban terhadap tantangan kolonialisme dan upaya membangun bangsa yang berdaulat dan bermartabat di tengah dunia yang semakin terintegrasi.

Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi membawa tantangan baru bagi konsep negara kebangsaan, karena arus informasi dan budaya global dapat mempengaruhi rasa identitas dan loyalitas warga negara. Di satu sisi, negara kebangsaan harus terbuka dan adaptif terhadap perubahan global, namun di sisi lain, perlu ada upaya menjaga keutuhan identitas nasional agar tidak tergerus oleh homogenisasi budaya global. Pendidikan kebangsaan, penguatan simbol-simbol negara, serta kebijakan kebudayaan

menjadi instrumen penting dalam mempertahankan dan menguatkan konsep negara kebangsaan.

Secara teoretis, konsep negara kebangsaan mengandung dua elemen penting yakni negara (*state*) sebagai entitas politik yang berdaulat dan bangsa (*nation*) sebagai komunitas yang memiliki kesadaran bersama akan identitasnya. Hubungan simbiotik antara negara dan bangsa inilah yang menjadi dasar utama legitimasi kekuasaan serta keutuhan sosial politik dalam negara kebangsaan. Negara kebangsaan berupaya menyeimbangkan kepentingan politik dengan identitas budaya masyarakatnya agar tercipta stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara kebangsaan menunjukkan dinamika yang khas dalam mengelola keragaman dan pluralitas. Perbedaan bahasa daerah, agama, serta suku bangsa diatur dalam kerangka kenegaraan yang mengedepankan prinsip inklusivitas dan toleransi. Pancasila sebagai ideologi negara memberikan landasan normatif yang kokoh untuk menjaga persatuan bangsa dalam bingkai negara kebangsaan. Dalam konteks ini, pembangunan negara kebangsaan di Indonesia bukan hanya soal administrasi politik, tetapi juga soal membangun ikatan sosial dan budaya yang kokoh di antara rakyatnya.

Peran negara kebangsaan juga sangat penting dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti separatisme, konflik etnis, dan tantangan keamanan nasional. Negara kebangsaan harus mampu menjadi mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan

konflik tersebut melalui pendekatan yang menghargai keberagaman sekaligus menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, konsep negara kebangsaan tidak hanya relevan sebagai suatu model politik, tetapi juga sebagai kerangka kerja untuk mewujudkan keadilan sosial dan harmoni dalam masyarakat majemuk.

Lebih jauh, negara kebangsaan memiliki implikasi terhadap hak-hak warga negara dan sistem pemerintahan. Dalam negara kebangsaan, warga negara memiliki hak-hak politik, sosial, dan budaya yang diakui dan dilindungi oleh negara, termasuk hak atas identitas budaya dan partisipasi dalam kehidupan politik. Sistem pemerintahan dalam negara kebangsaan idealnya bersifat demokratis dan inklusif, memastikan bahwa semua kelompok dan komunitas merasa diwakili dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan nasional.

Konsep negara kebangsaan juga mendorong pembentukan institusi-institusi yang mengokohkan identitas dan kedaulatan nasional, seperti lembaga pendidikan, media massa, lembaga kebudayaan, serta aparat keamanan dan hukum. Institusi-institusi ini berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai nasional dan sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Melalui institusi-institusi tersebut, negara kebangsaan berupaya mewujudkan keseimbangan antara modernisasi dan pelestarian nilai-nilai tradisional.

Secara ringkas, konsep negara kebangsaan adalah kerangka yang menggabungkan komunitas budaya dan politik menjadi sebuah negara yang berdaulat dengan identitas nasional yang kuat. Negara kebangsaan menegaskan pentingnya kesatuan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan dan mendorong pembangunan nasional. Di tengah arus globalisasi, negara kebangsaan menghadapi tantangan baru yang menuntut fleksibilitas dan inovasi dalam menjaga kohesi sosial sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman.

9.2 Lahir dan Berkembangnya Negara Kebangsaan Indonesia

Proses lahir dan berkembangnya negara kebangsaan Indonesia merupakan hasil perjalanan panjang yang melibatkan perjuangan, kesadaran kolektif, serta proses sosial-politik yang kompleks. Pada awalnya, wilayah Nusantara terdiri dari berbagai kerajaan dan kesultanan yang memiliki identitas kultural dan politik masing-masing. Namun, kedatangan bangsa Eropa dan kolonialisme Belanda membawa dampak besar yang akhirnya menyatukan berbagai kelompok etnis di bawah tekanan penjajahan. Penjajahan ini memicu tumbuhnya kesadaran nasional bahwa kerjasama dan persatuan adalah kunci untuk melepaskan diri dari cengkeraman asing. Kesadaran ini mulai terorganisir dengan munculnya organisasi-organisasi kebangsaan seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1911), dan Perhimpunan Indonesia yang berperan

dalam menyebarluaskan gagasan nasionalisme dan identitas bersama.

Momen penting dalam pembentukan negara kebangsaan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia. Tiga ikrar sumpah tersebut — bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menggunakan bahasa persatuan — berhasil menyatukan seluruh elemen bangsa meski berbeda suku, budaya, dan agama. Bahasa Indonesia pun menjadi simbol dan alat pemersatu yang sangat efektif dalam menyatukan bangsa. Perjuangan ini mencapai puncaknya dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia berdiri sebagai negara berdaulat dan sebagai entitas politik yang memiliki identitas nasional sendiri. Dalam konteks tersebut, negara kebangsaan Indonesia tidak hanya dilihat sebagai kesatuan geografis tetapi juga sebagai kesatuan ideologi dan budaya yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Peran Pancasila sangat sentral dalam membangun negara kebangsaan Indonesia sebagai ideologi yang mempersatukan seluruh rakyat dari beragam latar belakang. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara, yang mengakomodasi kebhinekaan dalam semangat persatuan. Selain itu, simbol-simbol negara seperti bendera merah putih, lagu kebangsaan “Indonesia Raya”, dan lambang Garuda Pancasila juga menjadi unsur penguat identitas kebangsaan. Pembentukan negara kebangsaan juga berproses melalui berbagai tantangan, termasuk

masa pendudukan Jepang, agresi militer Belanda, serta konflik internal yang menguji solidaritas bangsa. Namun, dengan semangat persatuan dan perjuangan, bangsa Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dan memperkokoh eksistensi negara kebangsaan.

Periode Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan dinamika dalam pengembangan negara kebangsaan Indonesia. Pada masa Orde Lama, identitas negara kebangsaan diwarnai oleh semangat anti-imperialisme dan upaya membangun sistem politik dan ekonomi yang merdeka. Sementara pada masa Orde Baru, terdapat upaya sentralisasi dan homogenisasi identitas nasional demi stabilitas politik dan pembangunan. Meski demikian, kebijakan tersebut kadang mengabaikan keragaman budaya dan menimbulkan ketegangan sosial. Era Reformasi yang dimulai pada 1998 membawa transformasi dalam negara kebangsaan Indonesia dengan membuka ruang demokrasi dan pengakuan yang lebih besar terhadap hak-hak kelompok minoritas dan budaya lokal. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi semakin menguatkan makna negara kebangsaan sebagai kesatuan yang inklusif dan plural.

Globalisasi juga memberikan tantangan baru terhadap negara kebangsaan Indonesia. Arus masuk budaya global dan perkembangan teknologi informasi membuat identitas nasional sering kali terancam oleh budaya asing yang mudah diakses dan cepat menyebar. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai kebangsaan

melalui pendidikan, media, dan kebijakan negara menjadi sangat penting agar negara kebangsaan Indonesia tetap kokoh dan relevan. Pendidikan kewarganegaraan dan pelestarian budaya lokal menjadi sarana strategis dalam membentuk generasi muda yang memiliki rasa cinta tanah air dan kesadaran kebangsaan yang tinggi. Di sisi lain, negara juga harus mampu menjaga harmoni antar kelompok masyarakat agar tidak terjadi fragmentasi sosial yang dapat mengancam kesatuan negara kebangsaan.

Dalam konteks modern, negara kebangsaan Indonesia terus berkembang dengan memperhatikan dinamika global dan domestik. Pemerintah dan masyarakat sipil sama-sama berperan aktif dalam memperkuat solidaritas nasional, melalui berbagai program budaya, pendidikan, serta dialog antaragama dan antarbudaya. Identitas nasional yang inklusif dan adaptif memungkinkan Indonesia untuk terus berkembang sebagai negara kebangsaan yang berdaulat, bersatu, berkeadilan, dan berbudaya. Dengan dasar ini, negara kebangsaan Indonesia tetap menjadi wadah untuk mengekspresikan nilai-nilai kebangsaan sekaligus menampung keberagaman yang ada di tengah masyarakat.

9.3 Dasar – Dasar Negara Kebangsaan Indonesia

Indonesia sebagai negara kebangsaan memiliki dasar-dasar yang kokoh yang menjadi landasan eksistensi dan identitasnya sebagai sebuah negara. Dasar negara ini bukan hanya sebagai simbol formal, melainkan juga sebagai pedoman dalam

penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara historis dan filosofis, dasar-dasar negara kebangsaan Indonesia dapat dipahami melalui Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, serta semangat persatuan dan kesatuan yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila, yang terdiri dari lima sila, menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial mencerminkan cita-cita luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan struktur negara dan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi ini merupakan hasil konsensus nasional yang merefleksikan kesepakatan seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan memajukan negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang demokratis dan berkeadilan. Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, menegaskan pentingnya persatuan dalam keragaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang ada di Indonesia. Konsep ini menjadi dasar untuk merawat keharmonisan sosial dan menjaga stabilitas nasional dari potensi konflik horizontal.

Sebagai negara kebangsaan, Indonesia juga dibangun atas kesadaran kolektif seluruh rakyat bahwa negara ini adalah milik

bersama dan harus dipertahankan serta dikembangkan secara bersama pula. Semangat nasionalisme yang tercermin dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi landasan moral dalam mempertahankan kedaulatan negara serta memperkokoh identitas nasional. Peran pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam menanamkan pemahaman ini kepada generasi muda agar mereka menjadi warga negara yang sadar dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Dalam konteks globalisasi yang menuntut keterbukaan, Indonesia harus tetap menjaga identitas nasionalnya dengan mengedepankan nilai-nilai kebangsaan sebagai dasar pengambilan keputusan dan tindakan di semua lini kehidupan.

Dasar-dasar negara kebangsaan Indonesia tersebut menjadi pondasi utama dalam menjawab berbagai tantangan dan dinamika pembangunan bangsa. Keteguhan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan ideologis dan konstitusional memastikan bahwa segala bentuk kebijakan dan program pembangunan berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Oleh karena itu, memahami dan menginternalisasi dasar-dasar negara ini menjadi keharusan bagi setiap warga negara agar tercipta kehidupan berbangsa yang harmonis, demokratis, dan berdaulat.

9.4 Nilai – Nilai dalam Negara Kebangsaan Indonesia

Nilai-nilai dalam negara kebangsaan Indonesia merupakan fondasi utama yang membentuk identitas, karakter, dan

keberlangsungan bangsa. Nilai-nilai tersebut berakar kuat pada sejarah, budaya, serta cita-cita para pendiri bangsa yang dituangkan secara jelas dalam Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Pancasila memuat lima sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelima sila ini bukan hanya sekadar rumusan filosofis, melainkan juga mencerminkan nilai luhur yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi keberagaman agama dan kepercayaan, sekaligus mengakui pentingnya spiritualitas dalam kehidupan berbangsa. Hal ini tercermin dalam kebebasan beragama dan sikap toleransi antarumat beragama. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia dan memperlakukan sesama manusia secara adil serta bermartabat. Persatuan Indonesia menjadi nilai fundamental yang mengikat seluruh warga negara tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan, sehingga menciptakan rasa kebangsaan yang kokoh di tengah keberagaman.

Nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam

pengambilan keputusan politik dan pemerintahan, yang merupakan ciri khas budaya politik Indonesia. Demokrasi ini harus dijalankan dengan hikmat kebijaksanaan, tidak hanya sekadar mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan. Sementara itu, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan komitmen negara untuk menciptakan kesejahteraan merata dan menghapus ketimpangan sosial, sehingga semua warga negara dapat hidup dengan layak dan bermartabat.

Selain Pancasila, nilai-nilai kebangsaan Indonesia juga tercermin dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semangat ini menjadi landasan bagi Indonesia untuk menerima keberagaman budaya, bahasa, adat istiadat, dan tradisi sebagai kekayaan bangsa yang harus dilestarikan dan dihormati. Dengan demikian, negara kebangsaan Indonesia berusaha menciptakan kesatuan yang harmonis di tengah pluralitas masyarakatnya.

Pendidikan juga menjadi media penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan tersebut. Melalui kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai Pancasila, generasi muda diajak untuk memahami, menghargai, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting agar identitas bangsa tidak luntur oleh pengaruh globalisasi dan perubahan zaman.

Secara praktis, nilai-nilai kebangsaan ini juga menuntut partisipasi aktif seluruh elemen bangsa dalam pembangunan dan penguatan persatuan nasional. Setiap warga negara berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan, menghormati perbedaan, serta berkontribusi dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nilai-nilai ini menjadi panduan dalam menjaga keutuhan NKRI sekaligus menjawab berbagai tantangan modern seperti globalisasi, konflik sosial, dan perubahan sosial budaya.

Penting untuk dicatat bahwa nilai-nilai ini bukan sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan harus terus dijaga serta dikembangkan agar relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budaya dan jati diri bangsa. Dengan menegakkan nilai-nilai kebangsaan tersebut, Indonesia dapat terus maju sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur dengan keragaman yang menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan.

BAB X
PENGEMBANGAN INTEGRASI DI INDONESIA

10.1 Konseptual Integrasi di Indonesia

Secara etimologis, kata "integrasi" berasal dari bahasa Latin *integratio* yang berarti pembaruan secara menyeluruh atau penyatuan. Menurut R. Scott dan P. Marshall dalam *Oxford Dictionary of Sociology* (Scott & Marshall, 2003), integrasi nasional adalah "proses sosial dan politik yang mengarah pada persatuan kelompok-kelompok berbeda ke dalam sistem nasional yang kohesif". Integrasi nasional merupakan suatu konsep yang memiliki dimensi historis, politis, sosial, dan kultural yang kompleks. Dalam kerangka negara-bangsa (*nation-state*), integrasi nasional dipahami sebagai proses mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dengan melihat latar belakang etnis, agama, budaya, dan wilayah geografis ke dalam satu kesatuan politik yang utuh, stabil, dan berdaulat. Konsep ini menjadi semakin penting dalam konteks Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan tingkat heterogenitas yang sangat tinggi.

Emile Durkheim dalam teorinya tentang solidaritas sosial mengklasifikasikan integrasi ke dalam dua jenis utama, yaitu solidaritas mekanik yang terbentuk atas dasar kesamaan, dan

solidaritas organik yang terbentuk atas dasar perbedaan yang saling melengkapi (Durkheim, 1961). Indonesia lebih relevan dikaji melalui solidaritas organik karena keanekaragaman merupakan keniscayaan yang membentuk karakter bangsa. Anderson dalam *Imagined Communities* menyatakan bahwa bangsa adalah sebuah "komunitas terbayang" yang dibentuk melalui kesamaan identitas (Anderson, 2020). Pendidikan Kewarganegaraan menguatkan nasionalisme dengan menanamkan nilai cinta tanah air, sejarah perjuangan bangsa, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika (Sorik, 2019).

Dalam perspektif politik, integrasi nasional merujuk pada keberhasilan negara dalam menciptakan kesetiaan politik (*political loyalty*) dan kepatuhan warga negara terhadap simbol, sistem, serta nilai-nilai konstitusional yang berlaku. Menurut Karl W. Deutsch (1961), integrasi politik adalah "*the attainment, within a territory, of a sense of community and of institutions and practices strong enough and widespread enough to assure, for a long time, dependable expectations of peaceful change among its population*." Dengan kata lain, integrasi bukan sekadar kesatuan teritorial, tetapi lebih kepada kesatuan psikologis dan institusional. Secara yuridis-konstitusional, integrasi nasional di Indonesia dijamin dan diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Penegasan ini menunjukkan bahwa bentuk negara

Indonesia bersifat unitaris, bukan federal, sehingga semua wilayah dan entitas sosial berada dalam satu sistem pemerintahan pusat yang berdaulat. Namun demikian, pengakuan terhadap keberagaman juga ditegaskan dalam Pasal 18A dan 18B yang memberikan ruang bagi otonomi daerah dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Integrasi nasional juga tidak dapat dilepaskan dari aspek budaya. Menurut Clifford Geertz dalam karyanya *The Interpretation of Cultures* (1973), simbol-simbol budaya seperti bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan menjadi alat utama dalam membangun identitas kolektif. Oleh karena itu, dalam konteks Indonesia, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan "Indonesia Raya", serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi instrumen simbolik yang berfungsi sebagai pemersatu identitas kebangsaan.

Selain itu, integrasi nasional mengandung komponen-komponen penting yang saling berkaitan, antara lain:

1. Kesadaran kolektif sebagai satu bangsa – yaitu munculnya rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap tanah air Indonesia, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda.
2. Kepatuhan terhadap konstitusi dan hukum nasional – sebagai fondasi yang menyatukan seluruh warga negara dalam sistem nilai dan norma yang sama.

3. Partisipasi dalam sistem politik dan pembangunan nasional – sebagai wujud tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa.

Integrasi nasional juga dapat dipahami dalam dua dimensi, yaitu:

1. Integrasi vertikal, yaitu integrasi antara pusat dan daerah. Ini mencakup hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, termasuk persepsi masyarakat terhadap keadilan distribusi sumber daya dan pelayanan publik.
2. Integrasi horizontal, yaitu integrasi antarwarga negara di seluruh penjuru tanah air, yang mencakup harmonisasi antar agama, antar-etnis, antargolongan, dan antarbudaya.

Kegagalan dalam mewujudkan kedua dimensi integrasi ini akan berujung pada gejala disintegrasi, seperti separatisme, konflik horisontal, atau ketidakpercayaan terhadap negara. Di Indonesia, integrasi nasional dimaknai sebagai proses mempersatukan perbedaan suku, agama, ras, antargolongan (SARA) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1).

Dengan demikian, integrasi nasional bukan sekadar slogan atau narasi politis, melainkan merupakan fondasi struktural dan kultural yang menopang eksistensi Indonesia sebagai satu bangsa yang majemuk. Konsep ini menuntut keterlibatan aktif dari

seluruh elemen masyarakat – baik negara, masyarakat sipil, maupun sektor pendidikan – untuk senantiasa memelihara semangat persatuan dalam keberagaman.

10.2 Urgensi Pengembangan Integrasi di Indonesia

Urgensi integrasi nasional semakin mengemuka dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang diwarnai oleh dinamika globalisasi, perkembangan teknologi digital, serta meningkatnya tuntutan demokratisasi dan keadilan sosial. Sebagai negara yang multietnis, multikultural, dan multireligius, Indonesia sangat rentan terhadap potensi konflik identitas dan disintegrasi, terutama apabila tidak ditopang oleh integrasi nasional yang kuat. Berdasarkan Laporan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2022 yang diterbitkan oleh BPS dan Bappenas, terdapat penurunan skor pada aspek *kebebasan berkeyakinan* dan *partisipasi politik non-elektoral*. Penurunan ini berkorelasi dengan munculnya konflik sosial di beberapa daerah yang berkaitan dengan intoleransi dan eksklusivisme identitas. Penelitian LIPI (2021) juga menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan tingkat konflik sosial tinggi, seperti Papua dan Kalimantan Tengah, memiliki korelasi kuat dengan ketimpangan sosial-ekonomi yang signifikan. Selain itu, Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2023 yang dirilis oleh Kementerian Agama mencatat skor rata-rata nasional hanya mencapai 73,39 dari skala 100, menurun dibanding tahun sebelumnya. Di beberapa daerah

seperti Aceh, Papua Barat, dan NTB, nilai kerukunan berada di bawah rata-rata nasional. Fakta ini menegaskan bahwa integrasi nasional tidak hanya diuji oleh aspek kebijakan struktural, tetapi juga oleh dinamika sosial kultural masyarakat lokal.

Di bidang digital, laporan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) dan Kominfo pada 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 63% hoaks bermuatan SARA dan politik beredar luas melalui platform media sosial seperti WhatsApp dan Facebook. Fenomena ini memicu segregasi digital (*digital polarization*) yang memperparah fragmentasi sosial, khususnya di kalangan generasi muda. Penelitian Komnas HAM (2022) mengungkapkan bahwa generasi Z di Indonesia menunjukkan tingkat *online intolerance* yang cukup tinggi, terutama terkait isu identitas agama dan politik. Adapun aspek ekonomi yang juga menjadi faktor kritikal dalam integrasi nasional. Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi masih terjadi di kawasan timur Indonesia, seperti Papua (26,8%), NTT (20,2%), dan Maluku (17,4%), dibandingkan dengan Jawa dan Sumatra yang rata-rata di bawah 10%. Ketimpangan pembangunan ini dapat memicu rasa ketidakadilan yang menggerus rasa memiliki terhadap negara (sense of belonging), yang pada akhirnya melemahkan integrasi.

Dalam kerangka pendidikan, data dari Balitbang Kemdikbudristek (2022) menunjukkan bahwa siswa di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) memiliki indeks pemahaman nilai

kebangsaan yang lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal ini menjadi peringatan penting bahwa penguatan pendidikan kewarganegaraan harus dilakukan secara merata, khususnya melalui pendekatan kontekstual yang menghargai kearifan lokal. Di sisi lain, survei Indikator Politik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa 82,4% responden masih mengakui Pancasila sebagai ideologi final, dan 88% menyatakan bahwa Indonesia perlu dipertahankan sebagai negara kesatuan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan serius, masih terdapat modal sosial dan politik yang kuat untuk memperkuat integrasi nasional — asalkan dikelola melalui kebijakan yang responsif dan partisipatif.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta empiris tersebut, maka urgensi integrasi nasional bukan lagi sekadar wacana normatif, tetapi merupakan kebutuhan objektif dan mendesak dalam pembangunan bangsa. Integrasi harus dibangun melalui pendekatan multidimensi: memperkuat kesetaraan sosial-ekonomi, mendesain pendidikan yang membina kesadaran kebangsaan, mendorong literasi digital yang kritis, serta menjamin keadilan hukum dan perlindungan hak asasi.

10.3 Tantangan Kontemporer Integrasi Nasional

Dalam era globalisasi dan disrupsi teknologi, integrasi nasional Indonesia menghadapi beragam tantangan baru yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga kultural, ideologis, dan

digital. Tantangan-tantangan ini bersifat kompleks dan multidimensional, sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang holistik, kontekstual, serta partisipatif.

1. Fragmentasi Sosial Berbasis Identitas Primordial

   Salah satu tantangan paling signifikan bagi integrasi nasional kontemporer adalah menguatnya fragmentasi sosial yang berbasis identitas primordial, seperti suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Meskipun Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip normatif yang diidealkan, dalam praktiknya masih banyak terjadi eksklusivisme sosial yang memicu konflik. Kasus-kasus intoleransi, penolakan rumah ibadah, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas menandakan bahwa semangat multikulturalisme belum sepenuhnya terinternalisasi di semua lapisan masyarakat. Gejala ini menunjukkan masih lemahnya pembinaan nilai-nilai kebhinekaan yang substansial, dan bukan sekadar formal.

2. Ketimpangan Ekonomi dan Ketidakadilan Distribusi Pembangunan

   Ketimpangan sosial-ekonomi antara wilayah barat dan timur Indonesia juga menjadi tantangan serius dalam menjaga integrasi nasional. Ketika sebagian masyarakat merasa terpinggirkan secara ekonomi, maka rasa memiliki terhadap negara pun melemah. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM)

di wilayah Papua dan NTT masih jauh tertinggal dibandingkan DKI Jakarta atau Jawa Barat. Ketimpangan ini memperbesar potensi disintegrasi dan resistensi terhadap pusat kekuasaan. Oleh karena itu, integrasi tidak dapat dilepaskan dari soal keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan.

3. Radikalisme Ideologis dan Politik Identitas

   Tantangan lainnya adalah menguatnya radikalisme keagamaan dan politik identitas, yang memanipulasi sentimen keagamaan maupun etnik untuk tujuan politik jangka pendek. Dalam konteks pemilu, retorika yang memecah belah antarkelompok masyarakat menjadi strategi yang sayangnya masih digunakan. Hal ini mengakibatkan polarisasi sosial yang tidak mudah dipulihkan pasca kontestasi. Radikalisme juga tumbuh subur melalui jaringan digital dan media sosial, di mana algoritma cenderung mengarahkan pengguna pada informasi yang memperkuat bias dan intoleransi.

4. Disinformasi dan Polarisasi di Era Digital

   Perkembangan teknologi digital, meskipun memberikan ruang partisipasi yang lebih luas, juga menghadirkan tantangan baru berupa penyebaran informasi palsu (hoaks) dan ujaran kebencian (hate speech). Platform media sosial seringkali menjadi alat untuk memperkuat segregasi sosial dan memperparah konflik horizontal. MAFINDO dan

Kominfo (2023) melaporkan bahwa mayoritas hoaks yang beredar di Indonesia mengandung muatan SARA dan provokasi terhadap institusi negara. Ketika ruang publik digital tidak lagi menjadi arena dialog rasional, maka integrasi sosial menjadi kian sulit terwujud.

5. Desentralisasi yang Belum Sinkron dengan Spirit NKRI

   Pelaksanaan otonomi daerah sejak era reformasi dimaksudkan untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat daerah. Namun dalam praktiknya, desentralisasi seringkali disalahartikan sebagai fragmentasi kewenangan, bahkan dalam beberapa kasus justru memperkuat identitas lokal secara eksklusif. Beberapa pemerintah daerah menunjukkan resistensi terhadap kebijakan pusat, bahkan dalam isu-isu sensitif seperti pendidikan, agama, dan lingkungan. Jika tidak diimbangi dengan semangat kebangsaan, maka desentralisasi berpotensi menciptakan loyalitas ganda dan melemahkan kohesi nasional.

6. Tuntutan Identitas Daerah dan Pengakuan Budaya Lokal

   Di berbagai daerah, terdapat aspirasi kuat untuk menghidupkan kembali identitas budaya lokal. Meskipun secara positif ini mencerminkan semangat pelestarian budaya, namun dalam beberapa kasus menimbulkan konflik antara nilai lokal dengan nilai nasional. Ketegangan ini sering terjadi dalam isu pendidikan, hukum adat, serta

kebijakan sosial. Negara perlu merumuskan strategi interkultural citizenship yang mampu menjembatani nilai lokal dan nasional secara sinergis, bukan antagonistik.

Tantangan-tantangan kontemporer di atas mengindikasikan bahwa integrasi nasional bukanlah kondisi yang statis, melainkan sebuah proses yang terus-menerus harus diperjuangkan melalui pendekatan yang progresif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Negara harus mampu merumuskan kebijakan integratif yang berbasis data, adil secara struktural, serta inklusif terhadap aspirasi kultural masyarakat. Sementara itu, masyarakat sipil, dunia pendidikan, dan media massa harus menjadi aktor aktif dalam membangun narasi persatuan yang otentik, bukan sekadar slogan simbolik.

10.4 Studi Kasus: Papua dan Ancaman Disintegrasi Nasional

Dalam membahas integrasi nasional, tidak cukup bagi kita untuk hanya memahami konsep-konsep normatif dan strategi teoritis tanpa mengaitkannya dengan dinamika riil yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, bagian ini disusun sebagai upaya untuk mengintegrasikan pendekatan konseptual dengan studi kasus konkret yang merepresentasikan kompleksitas tantangan integrasi di Indonesia, khususnya melalui lensa persoalan Papua dan beberapa wilayah lain yang pernah mengalami dinamika serupa.

1. Papua: Dinamika Separatisme dan Ketegangan Sosial

   Dalam membahas integrasi nasional, tidak cukup bagi kita untuk hanya memahami konsep-konsep normatif dan strategi teoritis tanpa mengaitkannya dengan dinamika riil yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, bagian ini disusun sebagai upaya untuk mengintegrasikan pendekatan konseptual dengan studi kasus konkret yang merepresentasikan kompleksitas tantangan integrasi di Indonesia, khususnya melalui lensa persoalan Papua dan beberapa wilayah lain yang pernah mengalami dinamika serupa.

   Papua merupakan wilayah yang secara historis dan politis memiliki dinamika kompleks dalam konteks integrasi nasional. Sejak integrasinya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, muncul berbagai gerakan separatis yang menuntut kemerdekaan, seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

   Beberapa insiden yang mencerminkan ketegangan di Papua antara lain:

   a. Penyerangan Pekerja Trans Papua (2018):

      Kelompok bersenjata menyerang pekerja proyek infrastruktur di Nduga, menewaskan belasan orang. Insiden ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap

pembangunan yang dianggap tidak melibatkan masyarakat lokal secara adil.

b. Kerusuhan Wamena (2023):

Kerusuhan terjadi di Wamena, dipicu oleh isu penculikan anak yang beredar di media sosial. Bentrokan antara warga dan aparat keamanan menyebabkan 12 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka.

c. Serangan Maybrat (2021):

TPNPB menyerang pos militer di Maybrat, menewaskan empat prajurit TNI dan menyebabkan lebih dari 5.000 warga mengungsi.

2. Kasus Serupa di Wilayah Lain

Selain Papua, beberapa wilayah di Indonesia juga mengalami dinamika disintegrasi nasional (Kompas, 2022):

a. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berjuang untuk kemerdekaan sejak 1976 hingga tercapainya perjanjian damai pada 2005. Konflik ini menewaskan lebih dari 15.000 orang.

b. Republik Maluku Selatan Diproklamasikan pada 1950, RMS berupaya memisahkan diri dari Indonesia. Meskipun gerakan ini berhasil ditekan, simpatisannya masih aktif di luar negeri, khususnya di Belanda.

c. Konflik Sampit Kerusuhan etnis antara suku Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah menyebabkan ratusan orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi.

3. Tabel Kasus Dis Integrasi Nasional

Wilayah	Peristiwa	Tahun	Dampak Utama
Papua	Penyerangan Pekerja Trans Papua	2018	Belasan pekerja tewas
Papua	Kerusuhan Wamena	2023	12 orang tewas, puluhan luka-luka
Papua	Serangan Maybrat	2021	4 prajurit TNI tewas, 5.000+ warga mengungsi
Aceh	Konflik GAM	1976–2005	15.000+ orang tewas
Maluku	Pemberontakan RMS	1950–1963	Gerakan separatis ditekan, simpatisan aktif

Kalimantan	Konflik Sampit	2001	Ratusan tewas, ribuan mengungsi

10.5 Strategi Penguatan Integrasi Nasional

Integrasi nasional bukanlah sebuah kondisi yang tercipta secara alamiah, melainkan hasil dari proses rekayasa sosial dan politik yang berkesinambungan. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, strategi penguatan integrasi nasional harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan struktural, kultural, dan simbolik yang saling menguatkan (Effendi, 2015). Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran kolektif sebagai satu bangsa yang berdaulat, adil, dan berkeadaban, tanpa mengabaikan pluralitas identitas yang hidup di dalamnya.

1. Penguatan Ekonomi Berbasis Keadilan Sosial dan Wilayah

   Integrasi nasional dapat dibangun tanpa fondasi ekonomi yang berkeadilan. Ketimpangan regional harus diatasi melalui distribusi pembangunan yang proporsional dan berbasis potensi lokal. Pemerintah pusat perlu memperkuat kebijakan fiskal dan infrastruktur yang mendukung percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia dan daerah tertinggal lainnya. Program Dana Desa, pengembangan ekonomi digital di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), serta penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal menjadi instrumen konkret yang

mendukung agenda integrasi sosial-ekonomi. Selain itu, afirmasi terhadap pelaku UMKM lokal dan BUMDes dapat menjadi katalisator integrasi berbasis partisipasi ekonomi masyarakat.

2. Optimalisasi Peran Media dan Teknologi Informasi sebagai Alat Integratif

   Media massa dan platform digital memiliki peran sentral dalam membentuk persepsi publik dan identitas kolektif. Dalam rangka penguatan integrasi nasional, diperlukan kebijakan dan gerakan literasi digital nasional yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, agar tidak terjerumus dalam disinformasi dan ujaran kebencian yang memecah belah. Pemerintah perlu bekerja sama dengan platform digital dan komunitas sipil dalam mendeteksi serta menghapus konten yang memuat propaganda intoleransi. Selain itu, kampanye digital tentang narasi persatuan, tokoh lintas budaya, dan sejarah kolaborasi antarsuku di Indonesia dapat diangkat untuk memperkuat ingatan kolektif sebagai bangsa yang inklusif dan toleran.

3. Penguatan Simbol dan Ritual Kebangsaan sebagai Ikatan Emosional

   Strategi simbolik seperti pengibaran bendera, pelafalan Pancasila, dan perayaan hari nasional tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif, tetapi harus diformulasikan menjadi ritual kebangsaan yang bermakna. Integrasi

nasional dapat dipupuk melalui pembudayaan simbol-simbol negara yang mampu membangkitkan rasa cinta tanah air dan tanggung jawab kebangsaan. Pendidikan sejarah nasional, kesenian nusantara, serta narasi perjuangan lintas etnik dalam kemerdekaan Indonesia perlu lebih dieksplorasi dalam ruang-ruang publik dan media edukatif. Dengan demikian, integrasi nasional tidak hanya terbentuk oleh regulasi, tetapi juga melalui kesadaran emosional dan kultural yang hidup dalam diri setiap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, M. (2010). Nilai-Nilai Dasar Integrasi Nasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Alldred, P., & Fox, N. J. (2019). Assembling Citizenship: Sexualities Education, Micropolitics and the Becoming-Citizen. *Sociology*, *53*(4), 689–706. 9

Alvin Priambodo. (2025). Urgensi Integrasi Nasional. Kompasiana.

Ananta, A., Arifin, E. N., Hasbullah, M. S., Handayani, N. B., & Pramono, A. (2015). Demography of Indonesia's Ethnicity. Institute of Southeast Asian Studies.

Anderson, B. (2020). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism. In *The new social theory reader* (pp. 282–288). Routledge.

Anshori, Saiful. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan: Membentuk Warga Negara Demokratis. Yogyakarta: UNY Press.

Anwar, S. (2009). Integrasi Nasional: Konsep dan Tantangan dalam Masyarakat Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Anwar, S. (2010). Pendidikan dan Tantangan Globalisasi: Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Arifin, M. (2019) *Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Karakter Bangsa*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ashri, M. (2018). *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Aspinall, Edward & Mietzner, Marcus (Eds.). (2010). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Institute of Southeast Asian Studies.

Asril, A., Jaenam, J., Syahrizal, S., Armalena, A., & Yuherman, Y. (2023). Peningkatan nilai-nilai demokrasi dan nasionalisme pada mahasiswa melalui pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, *8*(3), 1300–1309.

Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asyari, D., & Dewi, D. A. (2021). Peran Pendidikan Kewarganegaraan bagi Generasi Milenial dalam Menanamkan Jiwa Nasionalisme Di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, *3*(2), 30–41. 8

Aziz, S., & Najicha, F. U. (2024). Peran Pendidikan Pancasila Dalam Mewujudkan Cita-Cita Sustainable Development Goals (SDGS) Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *8*(1), 11–21.

Azra, A. (2007). Identitas dan Krisis Kebangsaan. Jakarta: Kompas.

Azra, A. (2011). Identitas dan Krisis Integrasi Nasional. Jakarta: Kompas.

Azra, Azyumardi. (2007). *Identitas dan Krisis Kebangsaan*. Jakarta: Prenada Media.

Azra, Azyumardi. (2011). Indonesia, Islam, dan Demokrasi. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2019). Buku Saku Pembinaan Ideologi Pancasila. Jakarta: BPIP.

BAMS. (2025). Integrasi Nasional: Pengertian, Konsep, Syarat, dan Faktor.

Barokah, A., Nugraha, R., & Muthi'ah, S. (2025). Studi Literatur: Peran Penting Evaluasi Pembelajaran Pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar Berbasis Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *9*(1), 5141–5145.

Buehler, Michael. (2016). *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge University Press.

Bukoting, S. (2023). Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan karakter siswa sekolah dasar. *EDUCATOR: Jurnal Inovasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan*, *3*(2), 70–82.

Burke, P. (2015). *Sejarah dan teori sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Butarbutar, F. S. J., & Triadi, I. (2024). Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, *2*(3), 264–273.

Butt, Simon & Lindsey, Tim. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Oxford: Hart Publishing.

Dahana, A. (2008). Identitas Nasional dalam Globalisasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). Panduan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.

Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice* (3rd ed.). Cornell University Press.

Durkheim, E. (1961). Durkheim, Emile. *Moral Education: A Study in Theory and Application of the Sociology of Education*.

Dwi Septiwiharti, S. S. (2024). *Filsafat Pendidikan: Memahami Pendidikan dari Socrates sampai Fuad Hassan*. Prenada Media.

Dzargon. (2025). Makalah Sejarah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

Effendi, N. (2015). Kearifan lokal menuju penguatan karakter sosial: Suatu tantangan dari kemajemukan budaya di Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, *16*(2), 107–115.

Estellés, M., & Fischman, G. E. (2021). Who Needs Global Citizenship Education? A Review of the Literature on Teacher Education. *Journal of Teacher Education*, *72*(2), 223–236.

Fadullah, Muhammad Yusuf. (2016). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam Dinamika Sosial Politik pada Jenjang Perguruan Tinggi. Universitas Pendidikan Indonesia.

Fajri, H. M., Maksum, A., & Marini, A. (2024). Desain Pendidikan Multikultural pada Pendidikan Dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, *8*(1), 235–249.

Fauzi, A. (2018) *Globalisasi dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Penerbit ITB.

Fitriani, S. E. (2022). *Pendekatan Pembelajaran PPKN di Sekolah Dasar* [Ilmu Sosbud]. Kompasina.

Freeman, M. (2017). *Human Rights: An Interdisciplinary Approach* (3rd ed.). Polity Press.

Giwangsa, S. F. (2018). Pentingnya Pendidikan Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Madrosatuna : Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, *1*(1), 26–40.

Grossman, D. L., Li, R. A., & Kennedy, K. J. (2008). *Citizenship curriculum in Asia and the Pacific*. Springer.

Hadiz, Vedi R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.

Hadjon, Philipus M. (2012). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hamidah, A. (2021). Urgensi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarus-utamaan kesetaraan gender. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *51*(3), 677–697.

Handayani, H., Adrias, A., & Zulkarnaini, A. P. (2025). Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan Membaca pada Siswa SD. *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, *3*(2), 337–350.

Handayani, P. T., Zakiah, L., Maulida, N., Zahra, A. S., & Jaya, I. (2024). Pentingnya Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Dalam Menghargai Keberagaman: Studi Literatur. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *9*(2), 2890–2905.

Hari Sriyanto. (2021). Integrasi Nasional. Binus University.

Haryanto, J. (2011). Pancasila dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Kencana.

Haryatmoko. (2016). Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Gramedia.

Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, *2*(1), 44–54.

Hasyim, S. (2020). Politik Kebangsaan dan Tantangan Radikalisme di Era Digital. Jakarta: Mizan.

Hernawan, H., & Maulana, E. A. (2022, January 6). *Literasi Kewarganegaraan: Langkah Memahami Hak dan Kewajiban Warga Negara* [Lasan]. Yoursay.id.

Heryanto, A. (2018). Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia. Yogyakarta: Buku Obor Indonesia.

Hiariej, Eric & Kristian Stokke (2017) *Politics of Citizenship In Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Hidayat, D. (2011). *Cinta Tanah Air: Perspektif Sosiologis*. Bandung: Alfabeta.

Hidayat, R. (2020) *Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hidayat, S. (2013). Pendidikan Kewarganegaraan: Membentuk Warga Negara yang Demokratis dan Religius. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hidayat, Syarif. (2007). *Korupsi di Negeri Para Raja: Studi tentang Patrimonialisme dan Kekuasaan di Indonesia*. LIPI Press.

Hulu, M. S., Lase, B. P., Harefa, H. O. N., & Lase, F. (2024). Pembelajaran Berbasis Proyek dalam Meningkatkan Civic Skill Siswa pada Mata Pelajaran PPKn. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(9), 10754–10761.

Hutabarat, P. K., Fahmi, R., & Pelas, M. U. (2025). ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK INDONESIA. *CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)*, *11*(1), 23–29.

Indrati, Maria Farida. (2010). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.

Isa, S. F. P., & Dewi, D. A. (2021). Peran dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mengembangkan Karakter Siswa di Era Globalisasi. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, *6*(1), 66–71.

Isnainiatin, R., & Setyowati, R. R. N. (2023). Pengembangan Sikap Kesetiakawanan Sosial Peserta Didik Oleh Guru PPKn Di SMA Negeri 22 Surabaya. *Journal of Civics and Moral Studies*, *8*(2), 56–64.

Istianah, A., & Mazid, S. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan: Membangun Sekolah Damai Untuk Wujudkan Lingkungan Masyarakat Aman dan Sejahtera. *Al-I'timad: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam*, *1*(2), 181–198.

Januardi, A., Superman, S., & Nur, S. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Tradisi Masyarakat Sambas dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, *4*(2), 794–805.

Kaelan. (2010). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.

Kaelan. (2013). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Strategi Nasional Penguatan Karakter. Jakarta: Kemendikbud RI.

Kleden, I. (2012). Globalisasi dan Budaya Indonesia: Menatap Masa Depan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kleden, Ignas. (2018). Globalisasi dan Identitas Budaya. Jakarta: Gramedia.

Koentjaraningrat. (2009). Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Komarudin. (2019). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Bandung: Alfabeta.

Komnas HAM RI. (2020). *Laporan Tahunan Komnas HAM 2020*. Jakarta: Komnas HAM.

Kompas. (2022). *Gerakan Aceh Merdeka: Penyebab, Kronologi Konflik, dan Kesepakatan Helsinki*. https://regional.kompas.com/read/2022/03/15/141817678/gerakan-aceh-merdeka-penyebab-kronologi-konflik-dan-kesepakatan-helsinki?page=all

Kompasiana. (2025). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

Kusman. (2020). Peran pendidikan kewarganegaraan (PKn) untuk generasi muda Indonesia. *Educatif Journal of Education Research*, *2*(3), 31–37.

Kusnadi, K. (2024). Filantropi Berbasis Pendidikan Kewarganegaraan: Pembelajaran Untuk Memperkuat Karakter Kepedulian Sosial Warga Negara. *Jurnal Civic Hukum*, *9*(2).

Kusumawardani, S. S., Budimansyah, D., Triyanto, T., Wibowo, W., & Copik, M. (2024). *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi Pendidikan Kewarganegaraan*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2024.

Kusumawati, D. (2018) *Identitas Kebangsaan dalam Era Modern*. Jakarta: Grafindo.

Kymlicka, W. (2011). Multicultural Citizenship. Oxford: Oxford University Press.

Kymlicka, W. (2011). Multiculturalism and the Welfare State: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies. Oxford: Oxford University Press.

Kymlicka, Will. (2010). Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity. Oxford: Oxford University Press.

Liddle, R. William. (2008). *Indonesia's Democratic Transition: Playing by the Rules*. In *Southeast Asian Affairs 2008*, ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Liputan6.com. (2025). Arti Integrasi Nasional: Pengertian, Tujuan, dan Implementasinya di Indonesia.

Madjid, N. (2015). Islam, Kebangsaan, dan Masa Depan Indonesia. Jakarta: Paramadina.

Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Makarim, N.H. (2018). *Menguatkan Pendidikan Karakter di Era Digital*. Jakarta: Kemendikbud.

Mansyuri, A. (2017). *Kewarganegaraan*. Buana Pustaka.

Mas'ad, Arif, A., & Munandar, A. (2024). Hubungan antara Pemahaman Konsep Sejarah dengan Pembentukan Identitas

Nasional Siswa Sekolah Dasar. *Ibtida'iy : Jurnal Prodi PGMI*, *9*(2), 25–36.

Masango, R. (2002). Public Participation: A Critical Ingredient of Good Governance. *Politeia: Journal for Political Science and Public Administratio*, *21*(2), 52–65. 8

Mazna, U., Nazirah, F., Farhana, I., & Marsitah, I. (2024). Perencanaan pembelajaran yang interaktif dalam menumbuhkan critical thinking siswa. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, *1*(4), 10.

Mietzner, Marcus. (2009). *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*. Institute of Southeast Asian Studies.

Moeckli, D., Shah, S., & Sivakumaran, S. (2018). *International Human Rights Law* (3rd ed.). Oxford University Press.

Moedjiono & Dimyati. (2009). *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.

Mulyana, D. (2008). Komunikasi dan Integrasi Nasional. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, D. (2010). Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. (2009). *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, Deddy. (2009). Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang Berbeda Budaya. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mutoharoh, N., & Marliyanti, V. (2024). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembentukan Identitas Nasional*). ReseacrhGate.

Najicha, F. U., & Kurniawati, A. (2023). Pentingnya Peningkatan Kesadaran Kewarganegaraan Pada Mahasiswa Di Lingkungan Kampus. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, *12*(2), 98–109.

Nasikun. (2010). Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Nasozaro, H. O. (2019). Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Warta*, *62*(1), 24–33.

Nazmi, R., Susilowati, I., Judijanto, L., Yuliah, A., Jamurin, J., Entaresmen, R. A., Furqon, W., & Johara, J. (2025). *Pendidikan Kewarganegaraan: Kewarganegaraan yang Berbasis Hukum dan Demokrasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Nickel, J. W. (2019). *Making Sense of Human Rights* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Nugroho, B. (2015) *Partisipasi Politik dan Peran Serta Warga Negara*. Surabaya: UB Press.

Nugroho, R. (2011). Kebijakan Publik untuk Negara Berkebudayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, R. (2019). Globalisasi dan Politik Identitas di Indonesia. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Nurdiansyah, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, *2*(2), 105–115.

Nurhasnah, N., Remiswal, R., & Sabri, A. (2023). Ranah Kognitif, Afektif, dan Psikomotorik sebagai Objek Evaluasi Hasil Belajar. Jenis dan Model Evaluasi Pendidikan, serta Implikasinya dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, *7*(3), 28204–28220.

Nurhayati, N., Tarigan, S., & Lubis, M. (2025). Implementasi dan Tantangan Kurikulum Merdeka di SMA: Strategi Pengajaran Berpusat pada Siswa untuk Pembelajaran yang Lebih Fleksibel dan Kreatif. *Jurnal Pendidikan*, *13*(1), 69–79.

Pangaribuan, R. R. F., Palilingan, T. N., & Mewengkang, F. S. (2023). Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. *Lex Administratum*, *11*(5).

Paul, R., & Elder, L. (2008). *The Miniature Guide to Critical Thinking "Concepts & Tools"*. The Foundation of Critical Thinking.

Permana, U. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Lovrinz Publishing.

PKN Institute. (2025). Sejarah Singkat Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

Pradanna, S. A. (2023). MENAKLUKKAN GELOMBANG REVOLUSI INDUSTRI: BAGAIMANA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BISA MENJADI KUNCI? *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *7*(2), 178–195.

Pranowo, Y. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kencana.

Prasetyo, D., Danurahman, J., & Hermawan, H. (2023). Implementasi pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan warga negara baik dan cerdas. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, *8*(1), 15–23.

Pratama, F. F., & Rahmat, R. (2018). Peran karang taruna dalam mewujudkan tanggung jawab sosial pemuda sebagai gerakan warga negara. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *15*(2), 170–179.

Putri, A. L., Dewi, D. A., & Furnamasar, Y. F. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Bangsa. *Edumaspul - Jurnal Pendidikan*, *6*(1), 126–130.

Rachmawaty, S. (2023). Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Generasi Penerus Bangsa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik*, *1*(1), 34–42.

Radar Tulungagung. (2025). Pengertian Integrasi Nasional: Konsep, Tujuan, dan Implementasinya di Indonesia.

Rahardjo, Satjipto. (2009). *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas.

Ramadhaniar, N., Hidayat, T., & Taufiq, M. (2020). Harmoni Pengetahuan dan Sikap Toleransi pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SDI Saroja Surabaya. *Bina Gogik*, *7*(2), 1–11.

Ramdan Kurniawan. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan: Sejarah PKn.

Ramdani, N. G., Fauziyyah, N., Fuadah, R., Rudiyono, S., Septiyaningrum, Y. A., Salamatussa'adah, N., & Hayani, A. (2023). Definisi Dan Teori Pendekatan, Strategi, Dan Metode Pembelajaran. *Indonesian Journal of Elementary Education and Teaching Innovation*, 2(1).20-31

Ramlan Surbakti. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Ratnaningsih, R. (2018). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi Untuk Menumbuhkan Partisipasi Aktif Warganegara Dalam Era Globalisasi. *Seminar*

Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan, 15.

Riswandie, I. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality Before The Law." *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, *1*(2), 298–310.

Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *5*(2), 374–388. 8

Romadhon, N. R., & Winahyu, S. E. (2024). ANALISIS PERKEMBANGAN SIKAP DEMOKRATIS PESERTA DIDIK KELAS 2 SD MELALUI PEMBELAJARAN PPKN DI SDN KIDULDALEM 2 KOTA MALANG. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, Dan Pengelolaan Pendidikan*, *4*(3), 13.

Rusmiati, E. T. (2023). Penanaman nilai-nilai toleransi pada anak usia dini. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, *6*(2), 248–256.

Samsinar, S. (2019). Urgensi learning resources (sumber belajar) dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Didaktika : Jurnal Kependidikan*, *13*(2), 194–205.

Samsudin, A. M. A. (2021). Peran Guru Profesional Sebagai Fasilitator Dan Komunikator Dalam Kegiatan Belajar Mengajar. *Edupedia*, *5*(2), 124–132.

Sapriya. (2009). Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sari, F., Sesmiarni, Z., & Febriani, S. (2024). Implementasi pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 5 Payakumbuh. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, *11*(3), 281–288.

Sari, I. (2016) *Demokrasi dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Salemba Empat.

Scott, J., & Marshall, G. (2003). *Oxford Dictionary of Sociology."Eds."* Oxford University Press.

Scribd. (2025). Sejarah PPKn di Indonesia dan PPKn dalam Kurikulum 2013.

Sena, R. J. F., & Najicha, F. U. (2023). Pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Karakter Warga Negara Indonesia di Era Modern. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, *8*(1), 76–84.

Setiyaningsih, D., Rosmi, F., Santoso, G., & Virginia, A. (2020). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar. *Dikdas Matappa: Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, *3*(2), 279–286.

Shefira, A., Dewi, N. R., & Octaviani, R. (2024). Inovasi Pembelajaran PKN di Era Digital dengan Pemanfaatan Teknologi dalam

Meningkatkan Pemahaman Siswa. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, *1*(3), 10..447

Sihaloho, W., Tanjung, D. R., Harahap, S. A., Barus, A., Ningsih, S. P., & Rohali, A. (2023). Pendidikan dan Perubahan Sosial. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, *5*(3), 829–841.

Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, *2*(1), 8–14.

Simanjuntak, A. C. N., Andriani, A., Pradityo, K. W., Wahidah, K., Putri, T. N., & Nababan, R. (2023). Analisis Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pedoman Membangun Sikap Toleransi Dalam Memperkuat Integrasi Bangsa Indonesia Di SMAN 12 Medan. *JUPENJI: Jurnal Pendidikan Jompa Indonesia*, *2*(4), 69–80.

Simanullang, M. F. J., Anzalia, B. A., Halimah, H., Hasugian, P. M., Purba, F. L., & Batubara, A. (2024). Penyebab Kurangnya Keaktifan Siswa SMP Hangtuah 1 Belawan dalam Pembelajaran PPKN Menimbulkan Nilai Rendah. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, *2*(3), 1–7.

Siswandi, R. D., Sari, D. P., Rusli, R., & Nursyifa, A. (2024). Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan Global Dalam Kurikulum Nasional. *Seminar Nasional Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *4*.

Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Saragih, K. W., & Ukur, J. (2024). Kepemimpinan sekolah penentu karakter peserta didik peran guru dalam membentuk karakter siswa melalui pembelajaran PPKN di sekolah dasar untuk menghadapi tantangan Society 5.0. *Jurnal Pendidikan: Kajian Dan Implementasi*, *6*(1).

Smith, R. K. M. (2018). *Textbook on International Human Rights* (8th ed.). Oxford University Press.

Soedjatmoko. (2009). *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Soehino. (2011). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Sofha, G. F., Nabila, I., Yusriyyah, M. Z., & Annisa, N. (2023). Peran pendidikan kewarganegaraan terhadap pembangunan karakter bangsa. *Advances In Social Humanities Research*, *1*(4), 408–420.

Somantri, N. (2008). Menggagas Pembaharuan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Somantri, N. (2008). Menggagas Pembaharuan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Somantri, N. (2008). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa dan Guru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Somantri, N. (2008). Pendidikan Kewarganegaraan: Perspektif Internasional. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Sorik, S. (2019). Inconsistency And Incoherence In The Amended Constitution Of Indonesia: Kaelan.(2017). Inkonsistensi dan Inkoherensi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen (Kajian Filosofis-Yuridis), Jakarta: Paradigma. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, *9*(1), 91–93.

Studocu. (2025). Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

Subekti, Anita. (2014). Multikulturalisme dan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sudjati, A. (2010). Multikulturalisme dan Identitas Nasional. Surabaya: Unesa University Press.

Suharto, E. (2009). *Kebijakan Sosial: Sebagai Respons terhadap Masalah dan Kebutuhan Sosial*. Alfabeta.

Suharyadi, E. (2017) *Dasar-Dasar Kewarganegaraan dalam Konteks Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Andi.

Suma, M. A. (n.d.). *Piagam Madinah dan teori kontrak sosial Jean Jacques Rousseau*.

Suryadi, (2019) *Pendidikan Kewarganegaraan: Landasan Nilai dan Implementasinya dalam Kurikulum*. Jakarta: Pustaka Pendidikan.

Suryadinata, L. (2009). Identitas Etnik dan Nation-Building di Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Suryadinata, L. (2019). Nation-Building in Indonesia: The Challenge of Globalization. Singapore: ISEAS Publishing.

Suryadinata, Leo. (2013). Bangsa dan Identitas Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Suryanto, A. (2009). Kewarganegaraan: Identitas dan Partisipasi Demokratis. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Suryomenggolo, J. (2017). *Nasionalisme dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Sutaryo, D. (2012). Media dan Identitas Kebangsaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutrisno, S. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan Berwawasan Global Untuk Penanaman Kecakapan Belajar Dan Berinovasi Warga Negara Abad Ke-21. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, *11*(1), 57–66.

Suwarno, Agus. (2011). Revitalisasi Identitas Bangsa di Era Globalisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suwondo, Bambang. (2013). Identitas Nasional dan Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syamsidar, S., Muhammad Reza, Z., Eka Ari, E., & Retno Sari, D. (2023). *Tantangan dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat di Era Digital*.

Tekno Bgt. (2025). Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

Teknologi. (2013). Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.

Tempo. (2025). Sudah Berganti 9 Kali, Begini Sejarah Pelajaran Pancasila.

Tilaar, H. A. R. (2017). Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo.

Tilaar, H.A.R. (2009). Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Tilaar, H.A.R. (2012). Multikulturalisme untuk Indonesia Baru. Jakarta: Kompas.

Trilling, B., & Fadel, C. (2010). 21St Century Skills: Learning for Life in Our Times. *Choice Reviews Online*, *47*(10), 47–5788.

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: UN Publishing.

Viciana, J., Casado-Robles, C., Pérez-Macías, L., & Mayorga-Vega, D. (2020). A Sport Education teaching unit as a citizenship education strategy in Physical Education. A group- randomized controlled trial. *Retos*, *38*(2), 44–52.

Wahab, A. & Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.

Wahab, A., & Sapriya. (2011). Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Wahab, A., & Sapriya. (2011). Teori dan Praktik Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Cipta.

Wahid, A. (2009). Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. Jakarta: Wahid Institute.

Wahid, Abdul & Labib, Muhammad. (2014). *Hukum Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, Abdurrahman. (2009). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.

Wahid, Abdurrahman. (2009). Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. Jakarta: The Wahid Institute.

Wahid, Abdurrahman. (2009). Ilusi Negara Islam. Jakarta: The Wahid Institute.

Wahono, R.S. (2010). *Wawasan Kebangsaan dalam Dinamika Kebudayaan dan Globalisasi*. Surabaya: Unesa University Press.

Wahyuni, I. (2014). Identitas Nasional dan Globalisasi: Tantangan bagi Generasi Muda Indonesia. Malang: UB Press.

Wahyuni, R., & Desiandri, Y. S. (2024). Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, *5*(3), 961–966.

Warburton, Eve & Aspinall, Edward (Eds.). (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.

Wibowo, A. (2013). Pendidikan Karakter: Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wibowo, Agus. (2012). Pendidikan Karakter Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wikipedia. (2025). Pancasila Ideology Development Agency.

Winarno, S. (2013). Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM dan Civil Society. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Suripto. (2012). Globalisasi dan Identitas Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.

Winataputra, U. S. (2009). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional. Jakarta: Universitas Terbuka.

Wulansari, F., Nurdin, E. S., & Ruyadi, Y. (2025). Penguatan Karakter Pancasila Melalui Keteladanan Guru Pendidikan Kewarganegaraan. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, *5*(1), 35–53.

Yasila, K. M. M., & Najicha, F. U. (2022). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan di Tengah Pluralitas Masyarakat Indonesia. *Jurnal Global Citizen*, *11*(1), 14–20.

Yudhoyono, S. B. (2009). Indonesia on the Move. Jakarta: Presidential Office.

Yudi Latif. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia.

Zainuddin, M. (2018). Revitalisasi Nilai Budaya Nusantara untuk Memperkuat Jati Diri Bangsa. Yogyakarta: Deepublish.

Zuchdi, D. (2009). Humanisasi Pendidikan: Menumbuhkan Kemanusiaan dalam Proses Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zuchdi, D. (2013). Pendidikan Karakter: Konsep Dasar dan Implementasinya di Sekolah. Yogyakarta: UNY Press.

Zuhairini, dkk. (2010). Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.

Zuhro, R. S. (2014). Politik Identitas dan Masa Depan Integrasi Bangsa. Jakarta: LIPI Press.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan Kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkarakter, serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui pendidikan ini, individu dibekali pengetahuan tentang Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta ditanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan cinta tanah air guna memperkuat identitas nasional dan menjaga keutuhan bangsa.

CV. ASKARA SASTRA MEDIA

CV. ASKARA SASTRA MEDIA
Jl. Al-Hidayah, Jawa Timur 61481
www.askarasastramedia.com